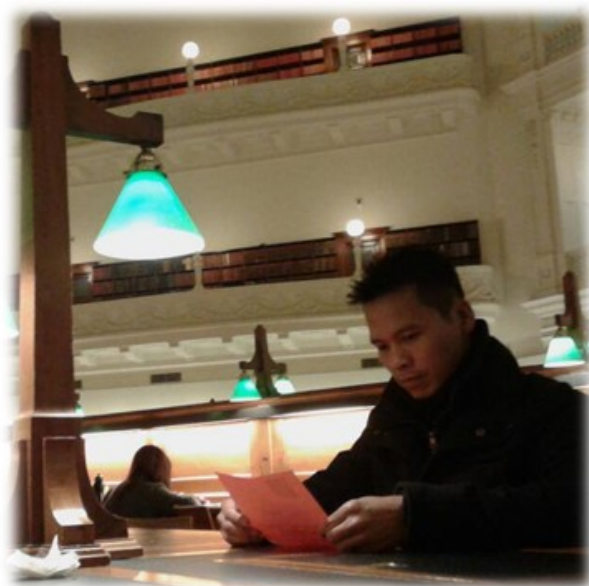




Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. Rektor SGD Bandung



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Penulis:

**Deni Kamaludin Yusup, AH. Fathoni,
Burhanuddin**

Judul Buku:

**Model pengembangan klinik bantuan hukum
universitas**

Penerbit:

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
UIN SGD Bandung**

Bandung, 05 November 2018

ISBN 978-602-5823-61-9



9 786025 823619

MODEL PENGEMBANGAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS

Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan awal Tim Peneliti selama tahun 2012-2016 pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Keduanya memiliki banyak persamaan dan perbedaan, termasuk pula kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun yang paling menarik untuk dikaji adalah keduanya telah banyak memberi kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas, model pembelajarannya, peluang dan tantangan yang dihadapi, solusi dan strategi pengembangannya, serta kontribusi klinik bantuan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otoritas hukum, teori klinik hukum, dan teori pengembangan klinik bantuan hukum universitas.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan metode deskriptif-empirik (*descriptive-empirical research*), serta pendekatan komparatif (*comparative study*). Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur dan data lapangan yang erat kaitannya dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Teknik pengumpulan data diperoleh dari book review, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, pengembangan konsep dan operasional Klinik Bantuan Hukum Universitas dilakukan melalui proses pembelajaran sistematis dan memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menangani perkara-perkara yang diajukan oleh klien; *kedua*, model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan 1 tahun dengan bobot 4 SKS (2 SKS Perkuliahan dan 2 SKS Praktikum Keahlian). Sedangkan di Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dilaksanakan 2 Tahun dengan bobot 18 SKS (6 SKS Perkuliahan dan 12 SKS Praktikum Keahlian); *ketiga*, kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa serta minimnya dukungan pihak universitas atau fakultas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi; *keempat*, strategi pengembangan mencakup: (a) perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum ke dalam sistem kurikulum; (b) melaksanakan *training personal capacity building*; (c) memberikan payung hukum yang jelas; (d) bertukar pengalaman dengan lembaga sejenis; dan (e) kerjasama dengan lembaga terkait; dan *kelima*, kedua lembaga tersebut telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*).



Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Tahun
2016

MODEL PENGEMBANGAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS

Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag.
Dr. Ah. Fathonih, M.Ag.
H. Burhanuddin, M.H.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2016

MODEL PENGEMBANGAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS

**(Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance
Program Faculty of Law Monash University
Melbourne Australia)**

LAPORAN PENELITIAN

**Mendapatkan Bantuan Dana dari DIPA-BOPTN UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2016**

Sesuai dengan Kontrak Nomor: B-200/C3-05/V.2/PP.00.9/06/2016

KATEGORI:

Unggulan Internasional

TIM PENELITIAN:

**Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag
Dr. Ahmad Fathoni, M.Ag
H. Burhanuddin, M.H.**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**1438 H
2016 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan awal Tim Peneliti selama tahun 2012-2016 pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Keduanya memiliki banyak persamaan dan perbedaan, termasuk pula kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun yang paling menarik untuk dikaji adalah keduanya telah banyak memberi kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas, model pembelajarannya, peluang dan tantangan yang dihadapi, solusi dan strategi pengembangannya, serta kontribusi klinik bantuan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otoritas hukum, teori klinik hukum, dan teori pengembangan klinik bantuan hukum universitas.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan metode deskriptif-empirik (*descriptive-empirical research*), serta pendekatan komparatif (*comparative study*). Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur dan data lapangan yang erat kaitannya dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Teknik pengumpulan data diperoleh dari book review, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan: **pertama**, pengembangan konsep dan operasional Klinik Bantuan Hukum Universitas dilakukan melalui proses pembelajaran sistematis dan memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menangani perkara-perkara yang diajukan oleh klien; **kedua**, model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan 1 tahun dengan bobot 4 SKS (2 SKS Perkuliahan dan 2 SKS Praktikum Keahlian). Sedangkan di Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dilaksanakan 2 Tahun dengan bobot 18 SKS (6 SKS Perkuliahan dan 12 SKS Praktikum Keahlian); **ketiga**, kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa serta minimnya dukungan pihak universitas atau fakultas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi; **keempat**, strategi pengembangan mencakup: (a) perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum ke dalam sistem kurikulum; (b) melaksanakan *training personal capacity building*; (c) memberikan payung hukum yang jelas; (d) bertukar pengalaman dengan lembaga sejenis; dan (e) kerjasama dengan lembaga terkait; dan **kelima**, kedua lembaga tersebut telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*).

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebagai penelitian pada lembaga lainnya, baik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian yang dilakukan dengan tanpa bantuan pihak lain;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali karya tulis yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hak atas karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 10 November 2016

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Deni K. Yusup, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	h
خ	kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

ط	th
ظ	zh
ع	‘
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	’
ي	y
ة	t/h

Untuk Madd dan Diftong

آ	a panjang	ā
إِي	i panjang	ī
أُو	u panjang	ū
أُو	diftong	au
أَيَّ	diftong	ai

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan segala kuasa dan iradah-Nya, serta dengan segala taufiq dan hidayah-Nya, alhamdulillah peneliti dengan susah payah mampu menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan membawa ajaran mulia bagi penulis pada khususnya dan semua umat pada umumnya.

Kajian awal dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan awal Tim Peneliti selama tahun 2012-2016 pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Keduanya memiliki banyak persamaan dan perbedaan, termasuk pula kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun yang paling menarik untuk dikaji lebih dalam adalah keduanya telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

Meskipun keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya sebagai lembaga penunjang (non struktural), namun ia diberikan otonomi untuk mengelola dan melaksanakan tupoksinya secara mandiri dan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum baik dalam internal UIN Bandung maupun bagi masyarakat umum. Fungsi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat - dalam hal ini – memberikan bantuan konsultasi hukum, sosialisasi peraturan, desiminasi, pembuatan berkas perkara dan pendampingan/advokasi baik litigasi maupun non litigasi.

Demikian pula dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia menjadi wadah bagi mahasiswa agar mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum. Mereka dapat belajar untuk menjadi pengacara dan membantu mereka yang paling rentan, baik secara *pro bono* atau profesional, dengan mengejar karir di kantor-kantor firma hukum, atau organisasi bantuan hukum atau lembaga yang melayani kepentingan umum. Efek positif yakni mendorong mahasiswa untuk membantu orang lain yang sedang mengalami masalah hukum atau sekurang-kurangnya mengatasi masalah hukum yang sedang mereka hadapi sendiri.

Melalui penelitian penulis menemukan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan dua model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*). Selain itu, Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut juga telah menjadi **pembeda (*distingsi*)** dan sekaligus **keunggulan (*ekselensi*)** yang harus terus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan keberlangsungannya di masa depan..

Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, baik dosen, teman sejawat, lembaga atau institusi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada peneliti hingga penelitian ini selesai. Secara khusus, rasa terima kasih disampaikan kepada:

1. Professor Malcom Bennet, Ms. Chelsea Trang, Ms. Jenny Tam, Ms. Jasmine dan Ms. Taylor, serta semua kolega terbaik pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang dengan penuh hangat telah menyisihkan waktu untuk saling berbagi informasi dan bertukar pengalaman hingga penelitian dapat diselesaikan;

2. Professor Tim Lindsey dari Center of Islamic Law dan Indonesia Studies (CILIS) University of Melbourne Australia dan Mr. Dan Nicholson dari Victoria Legal Aid Service (VLAS) yang telah membantu peneliti selama penelitian;
3. Mr. Craig Ewers, Ms. Cate Sumner, Ms. Jennifer Linsdstrom, Mr. Peter De Meij, Mr. Drs. Wahyu Widiana, MA, Mr. Nurkholis Hidayat, SH, L.LM dan Ms. Hilda Suherman, SH, L.LM, Mr. Binziad Kadafi, SH, L.LM serta semua kolega terbaik di Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) yang telah membantu kami selama melaksanakan kegiatan penelitian;
4. Bapak Purwo Susilo, SH, MH (Mantan Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia), Bapak Drs. H. Chotib Basri, SH, MH (Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat), Bapak Drs. H. Dudung Abdil Halim, MH (Mantan Ketua Pengadilan Agama Cimahi), dan Bapak Drs. H. Acep Saefudin, MH (Hakim Pengadilan Agama Sumedang) segala dorongan dan perhatiannya selama peneliti mengelola Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Bapak Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si (Mantan Dekan FSH yang kini menjadi Wakil Rektor II UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang selalu memberikan motivasi dan mencurahkan semua perhatiannya kepada peneliti selama menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak Dr. Munir, MA (Ketua LP2M) dan Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag (Kepala Pusat Penelitian), yang selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini;
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan, mahasiswa, serta sahabat dan teman sejawat yang tidak dituliskan namanya satu per satu dalam pengantar ini, yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Pada akhirnya, peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti yang tak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal atas segala kebaikan dan pertolongannya bagi peneliti. Besar harapan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Islam. *Amiin ya robbal 'alamiin...*

Bandung, 10 November 2016

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kajian Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Sistematika Penelitian	28
BAB II KONSEP DAN TEORI PENGEMBANGAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS	29
A. Konsep dan Teori Klinik Hukum	29
1. Pengertian Klinik Hukum	29
2. Dasar dan Tujuan Klinik Hukum	35
3. Sejarah Perkembangan Klinik Hukum	45
4. Tahapan dan Bentuk Klinik Hukum	48
5. Peran Klinik Hukum dalam Penegakan Hukum.	51
B. Konsep dan Teori Bantuan Hukum	53
1. Pengertian Bantuan Hukum	53
2. Dasar dan Tujuan Bantuan Hukum	65

3. Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum	71
4. Bentuk-bentuk Organisasi Bantuan Hukum	95
5. Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum	102
C. Konsep dan Teori Pengembangan Klinik Bantuan Universitas	108
1. Pengertian Klinik Bantuan Hukum Universitas.	108
2. Dasar dan Tujuan Berdirinya Klinik Bantuan Hukum Universitas	113
3. Sejarah Perkembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas	118
4. Bentuk-bentuk Lembaga Klinik Bantuan Hukum Universitas	125
5. Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Penegakan Hukum	128
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	135
A. Obyek Penelitian	135
B. Metode Penelitian	135
C. Jenis Data Penelitian	138
D. Sumber Data Penelitian	139
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	141
F. Analisis Data Penelitian	144
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	145
A. Gambaran Umum Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	145

1. Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	145
a. Sejarah Pendirian	145
b. Dasar Hukum dan Tujuan Pendirian	155
c. Manajemen dan Tata Kelola Organisasi	159
d. Program Kerja	168
e. Rekam Jejak Penanganan Perkara	171
2. Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia ...	174
a. Sejarah Pendirian	174
b. Dasar Hukum dan Tujuan Pendirian	180
c. Manajemen dan Tata Kelola Organisasi	182
d. Program Kerja	189
e. Rekam Jejak Penanganan Perkara	193
B. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	196
1. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	196
2. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	199
C. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas Yang Dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati	

Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	203
1. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	203
2. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	215
D. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	221
1. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	221
2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia ...	226
E. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	231
1. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	231

2. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia	261
F. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam Penegakan Hukum dan Keadilan	272
1. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan	272
2. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam Penegakan Hukum dan Keadilan	278
BAB V PENUTUP	295
A. Kesimpulan	295
B. Rekomendasi	299
DAFTAR PUSTAKA	301
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan awal dan pengalaman Tim Peneliti selama tahun 2012-2016 dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).¹ Salah satu temuan awal tersebut adalah adanya persamaan dan perbedaan tentang model pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang dilakukan oleh Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.²

Berpijak pada semangat Tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan perhatian besar dalam pengabdian kepada masyarakat, maka dikembangkanlah Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU). Praktik pelayanan konsultasi dan bantuan hukum di universitas pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan lembaga-lembaga konsultansi dan bantuan umum pada umumnya. Bahkan hingga saat ini, KBHU bukan hanya melaksanakan praktik di dalam lingkungan universitas, melainkan pula di sekitar lingkungan pengadilan. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Mahkamah Agung. Keberadaan KBHU di sekitar pengadilan yang bertujuan salah satunya untuk membantu masyarakat

¹ Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

² Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.

kurang mampu dan pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum itu sendiri.

Tercatat selama kurun waktu tahun 2012-2016, ada pengalaman menarik yang terdokumentasi dalam program kerjasama antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* di bidang pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU), yaitu KBHU terbukti telah menjadi “magnet positif” bagi kalangan Perguruan Tinggi untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*), seperti masyarakat miskin, perempuan (*single parent*), anak-anak, dan penyandang disabilitas.³

Terlebih lagi dewasa ini kebanyakan masyarakat belum begitu mengetahui keberadaan klinik bantuan hukum universitas. Kebanyakan masyarakat mungkin lebih mengenal Lembaga Bantuan Hukum atau Kantor Firma Hukum. Keduanya merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang banyak memberikan kontribusi dalam pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun kedua organisasi tersebut pada umumnya memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum profesional atau tidak gratis (*non prodeo*). Sehingga hanya kalangan masyarakat mampu saja yang mendapatkan bantuan hukum, sedangkan masyarakat miskin justru tidak mendapatkannya karena tidak memiliki biaya untuk membayar para advokat, pengacara, atau paralegal.

³ KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah menjalin kerjasama dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dibawah supervisi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), terutama dalam pengembangan Program Klinik Bantuan Hukum dan Identitas Hukum.

Dalam diskursus ilmu hukum, istilah bantuan hukum sering diidentikkan dengan *legal aid*, *legal services* atau *legal assistance*.⁴ Sekilas makna ketiganya hampir sama yakni jasa hukum yang diberikan oleh advokat, pengacara, atau paralegal kepada kalangan masyarakat pencari keadilan. Bahkan dalam hukum Islam, profesi tersebut mendapatkan tempat yang mulia dan banyak dikaji pada ranah fikih bantuan hukum (*fiqh al-mahammy*),⁵ sebagai turunan dari prinsip arbitrase (*tahkim*).

Pada awalnya profesi advokat, pengacara, atau paralegal syarat dengan idealisme karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan sekaligus pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) kepada semua orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum.⁶ Namun dalam perkembangan sekarang ini maknanya telah jauh berubah, yakni menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.⁷

Adanya kesamaan ide dan gagasan di kalangan akademisi dengan praktisi bantuan hukum telah mendorong mereka untuk membentuk Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU) yang sekaligus merupakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat di

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia* dalam *Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 3-4.

⁵ Lihat penjelasan Muslim Muhammad Zaudat al-Yusufi, *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al-Syariat al-Islamy*, (Cairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th), hlm. 1. Bandingkan dengan penjelasan dari Ali Jar al-Naby, *Al-Mahammah wa Afaqa al-Qanuni fi al-Mustaqbal*, lihat dalam <http://www.brbrnet.net/vb/archive/index.php/t-2106.html> dan lihat pula tulisan Anonymous, *Hukm al-Mahammah ladi al-Muhakimu al-Wadh'iyati* dalam <http://www.muslimuzbekistan.net/ar/islam/fatawa/article.php?ID=8501> diakses 12 Februari 2016.

⁶ Rahmat Rosyadi, *Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembudayaan Hukum di Masyarakat*, karya tulis ilmiah Jurnalistik bidang hukum antar Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dan Banten oleh Forum Diskusi Hukum (FORDIKUM) dan diterbitkan dalam HU Pikiran Rakyat, 2000, hlm. 4.

⁷ Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), hlm. 294-295.

bidang hukum. Dalam perkembangannya KBHU berhasil membangun interaksi dan kerjasama dengan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) dan lain-lain.

Kemampuan KBHU dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat tampak berbeda dengan LBH pada umumnya yang memiliki banyak pengacara profesional. Meskipun demikian paralegal yang menjadi mahasiswa magang (*volunteer*) di KBHU juga memiliki kekuatan akses pada tingkat birokrasi yang memperkuat eksistensi dan posisi mereka dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum bagi masyarakat miskin di dalam peradilan (*litigasi*) dan di luar peradilan (*non litigasi*).

Sebagai catatan penting dalam penelitian ini adalah sejak 2011 sampai 2015 keberadaan KBHU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah berkiprah dalam praktik kepengacaraan di Peradilan Agama. Meskipun praktik kepengacaraan tersebut sebagian besar bersifat non litigasi, namun peran paralegal di KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memberikan jasa pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, praktik klinik bantuan hukum di KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung kebanyakan merupakan model bantuan hukum cuma-cuma dan bukan bantuan hukum struktural yang bersifat profesional (diupah).

Mengutip laporan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tahun 1995, frekuensi dan proporsi perkara yang diterima oleh Peradilan Agama seluruh Indonesia menunjukkan banyak kasus yang melibatkan kepengacaraan dan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara,

yakni penetapan ikrar talak 47.355 (32,14 %), perceraian 42.699 (28,28%), dan ta'lik talak 42.085 (28,56%).⁸ Ada suatu kecenderungan, di mana penyelesaian perkara banyak dibantu oleh kalangan advokasi bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) dan bantuan hukum profesional (mendapatkan *fee/honorarium* dari kliennya).⁹ Dengan kata lain, menggunakan advokasi bantuan hukum dan bantuan hukum profesional lebih dari sekedar kesadaran hukum masyarakat dan upaya pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, tetapi juga karena tuntutan ingin memperoleh keadilan (*access to justice*).¹⁰

Apabila dikaji dari prinsip *access to justice*, Achmad Santosa mendukung bagi adanya bantuan hukum di semua lembaga peradilan bagi kepentingan *access to justice*. Dengan kata lain, klinik bantuan hukum merupakan bagian dari suatu kemampuan rakyat untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar hak asasi manusia. Pendapat tersebut sejalan dengan definisi bantuan hukum dari UNDP bahwa *access to justice* adalah kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-hanya melalui institusi-institusi peradilan formal ataupun informal dan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.¹¹

⁸ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 19-20.

⁹ Rahmat Rosyadi, "*Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembudayaan Hukum di Masyarakat*", karya tulis ilmiah Jurnalistik bidang hukum antar Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dan Banten oleh Forum Diskusi Hukum (FORDIKUM) dan diterbitkan dalam HU Pikiran Rakyat, 2000, hlm. 4.

¹⁰ Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), hlm. 294-295.

¹¹ Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza), (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 232-233.

Oleh karena itu, *access to justice* yang diusung dalam praktik Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU) diarahkan bagi penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*). Aspek permintaan (*justice demander*) yang meliputi: pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar; kedua, meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak terpenuhi. Sedangkan aspek pemasokan (*justice provider*) yaitu mendorong dan mempengaruhi para penentu kebijakan kunci (elemen negara) agar membangun dan memberlakukan hukum dan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional dan internasional, yang meliputi: pertama, memihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marjinal; kedua, berdimensi pemberdayaan masyarakat; dan ketiga, berdimensi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua program tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip *equality before the law*.¹²

Hingga saat ini, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum melalui KBHU seperti yang dijalankan oleh KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Monash University Melbourne memiliki banyak manfaat, antara lain: pertama, KBHU menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk mengaplikasikan hasil belajar di bidang kemahiran hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tidak sedikit dosen dan mahasiswa banyak menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis dari para pengacara profesional (*lawyer*) yang turut membantu mereka dalam

¹² Executive Summary hasil wawancara Tim Peneliti dengan Nurkholis Hidayat dan Jennifer Lindstrom berkaitan dengan Program *Access to Justice* yang dilaksanakan LBH Jakarta bekerjasama dengan AIPJ selama tahun 2011-2015 (Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2016).

praktik konsultasi dan bantuan hukum di lapangan; kedua, KBHU menjadi lembaga alternatif bagi masyarakat pencari keadilan, terutama kalangan perempuan miskin, anak-anak yang tidak memiliki identitas hukum, penyandang buta huruf, pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, dan para penyandang disabilitas. Karena hingga saat ini merekalah yang nyaris sama sekali tidak mendapatkan pengakuan hak identitas hukum dan akses kepada keadilan; dan ketiga, KBHU menjadi mitra strategis bagi para pengampu kebijakan pada lembaga pemerintah dan koalisi organisasi sosial masyarakat untuk membantu mendampingi, mengadvokasi, dan memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kerjasama antara ketiganya sangat dibutuhkan untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi apapun.

Meskipun keberadaan KBHU bukan sesuatu yang baru, tetapi berpijak kepada semangat Tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan perhatian lebih besar dalam pengabdian kepada masyarakat, maka dikembangkanlah Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU). Fakta menunjukkan bahwa setiap perguruan tinggi pada kenyataannya belum memberikan perhatian yang besar. Padahal keberadaan KBHU dirasakan sangat penting. Terlebih lagi pada Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah dituntut mampu berperan lebih untuk membantu masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*). Hal ini menjadi bagian dari pemenuhan sebagian tanggung jawab pemerintah (*state responsibility*) dalam pemenuhan hak konstitusional atas hukum dan keadilan.

Sebagai gambaran awal, perbandingan pengalaman klinik hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah merilis dalam laporan tahunannya, bahwa para mahasiswa senior yang

magang di KBHU telah mampu membantu dan mendampingi penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2493 kasus (Tahun 2013) dan 2171 kasus (Tahun 2014).¹³ Sebagian besar merupakan kasus-kasus yang dibantu melalui upaya non litigasi dan sebagian lainnya litigasi. Sementara itu, selama tahun 2013, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga memiliki pengalaman yang serupa yakni telah didatangi dan memberikan bantuan pendampingan hukum kepada 1323 klien dan 962 klien lainnya telah mendapatkan bantuan konsultasi hukum.¹⁴

Tim Peneliti mengamati bahwa kesulitan terbesar yang mungkin dirasakan saat ini adalah menumbuhkan minat dan motivasi para mahasiswa untuk terlibat aktif dalam praktik konsultasi dan bantuan hukum di KBHU. Jumlahnya masih sangat terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh minat dan peluang magang yang masih sedikit. Tidak setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk magang, karena mereka terlebih dahulu harus sudah lulus mata kuliah dasar di bidang ilmu hukum, etika profesi hukum, dan hukum acara.

Kesulitan berikutnya adalah masih terbatasnya dukungan dan perhatian dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengalokasikan sebagian anggarannya bagi pengembangan KBHU. Dukungan dan perhatian pimpinan perguruan tinggi dalam bentuk pengalokasian dana tentu sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, KBHU tentunya akan terbuka ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan di masyarakat secara langsung.

¹³ Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

¹⁴ Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.

Perbandingan pengalaman tersebut tentu sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Namun seiring dengan tuntutan perubahan sosial dan hukum, saat ini setiap perguruan tinggi ditantang untuk mampu mengembangkan model perkuliahan hukum yang mampu menyajikan keseimbangan antara teori dan praktik. Hal ini tidak cukup hanya dengan menyelenggarakan kuliah, praktikum, atau simulasi persidangan di dalam kampus, tapi juga harus didukung pula dengan praktiknya di lapangan agar mahasiswa memiliki keahlian khusus setelah lulus kuliah.

Berdasarkan kepada latar belakang di atas, Tim Peneliti sangat tertarik untuk mengkaji model pengembangan klinik bantuan hukum universitas lebih komprehensif baik secara konsepsional maupun operasional. Tim Peneliti ingin mengangkat obyek tersebut menjadi judul penelitian yaitu ***Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas (Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia).***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menganggap obyek tersebut penting untuk diteliti disebabkan tiga alasan berikut: pertama, konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang diinduksi dari praktik bantuan hukum secara umum belum terumuskan secara sistematis; kedua, setiap perguruan tinggi tampaknya menerapkan model pembelajaran yang berbeda-beda dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di bidang klinik bantuan hukum; ketiga, setiap perguruan tinggi tampaknya memiliki peluang dan tantangan yang berbeda-beda dalam mengembangkan klinik bantuan hukum; keempat, setiap perguruan tinggi tampaknya memiliki strategi yang berbeda-beda pula dalam mengembangkan klinik bantuan hukum; dan yang

kelima, setiap perguruan tinggi yang memiliki klinik bantuan hukum tampaknya belum memberikan kontribusi yang optimal dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*).

C. Perumusan Masalah

Tim peneliti merumuskan masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana model klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*). Tim peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne?
2. Bagaimana model pembelajaran klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne?
3. Apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash

University Melbourne dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan klinik bantuan hukum universitas?

5. Bagaimana kontribusi klinik bantuan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne;
2. model pembelajaran klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne;
3. peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas;
4. strategi yang dilakukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan klinik bantuan hukum universitas;
5. kontribusi klinik bantuan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau signifikansi dari penelitian ini, secara akademik diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yakni terumuskan kerangka konseptual dan operasional model pengembangan klinik bantuan hukum universitas untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum di berbagai Perguruan Tinggi. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau kerangka acuan bagi kalangan dosen dan mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne untuk saling berbagai informasi dan bertukar pengalaman dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas agar lebih optimal membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan jasa konsultasi dan bantuan hukum.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan peneliti diketahui bahwa literatur-literatur atau hasil-hasil penelitian yang secara spesifik erat kaitannya dengan klinik bantuan hukum universitas masih sangat terbatas. Namun demikian ada sejumlah literatur dan hasil penelitian yang layak dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian ini, antara lain: Robert J. Bonner, *Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis of the Legal Profession* (New York: Benjamin Blom, 1927). Buku ini banyak menjelaskan sejarah perkembangan dan konsep-konsep bantuan hukum sejak zaman Yunani dan Romawi hingga modern.

Kemudian Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LBH Jakarta 1983). Buku ini banyak menjelaskan

sejarah perkembangan dan konsep-konsep bantuan hukum di Indonesia. Sedangkan tulisan paling lengkap berkenaan dengan advokat dan bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum positif ditulis oleh Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Buku ini juga banyak menjelaskan secara komprehensif tentang konsep kepengacaraan dan bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, termasuk di dalamnya peranan lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama.

Di samping itu, Helaine M. Barnett, *Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans*, (Legal Services Corporation, September 2005). Buku ini banyak menjelaskan sejarah perkembangan, konsep-konsep dan penerapan bantuan hukum di Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Erna Ratnaningsih dan Muji K. Rahayu, *Pandangan Terhadap Kebutuhan Undang-Undang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan tentang perkembangan bantuan hukum dan transformasinya menjadi UU Bantuan Hukum.

Selanjutnya Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan peranan kelembagaan bantuan hukum, peluang dan tantangannya di Indonesia. Saat ini yang paling populer di Indonesia adalah buku Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan

konsep-konsep bantuan hukum sejak zaman klasik hingga modern, termasuk juga peranan kelembagaan bantuan hukum di Indonesia.

Sedangkan yang paling mutakhir adalah penelitian disertasi yang ditulis oleh Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009. Penelitian ini bukan hanya menjelaskan sejarah dan perkembangan bantuan hukum dalam perspektif sejarah hukum Islam, tetapi juga menjelaskan secara komprehensif tentang konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat di Indonesia.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan sejumlah literatur dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini juga akan menyajikan kerangka konseptual dan operasional model pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang diinduksi dari sejarah dan praktik bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji lebih komprehensif tentang model pengembangan klinik bantuan hukum universitas dari segi konsep, model pembelajaran, peluang dan tantangan, serta strategi yang dikembangkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*).

G. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan kerangka konseptual model pengembangan klinik bantuan hukum universitas, peneliti menggunakan tiga kerangka teori sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis obyek penelitian ini, yaitu:

pertama, teori kredo dan otoritas hukum;; kedua, teori pengembangan klinik bantuan hukum; dan yang ketiga, teori penegakan hukum dan hak asasi manusia:

1. Teori Dasar (*Grand Theory*): Teori Kredo dan Otoritas Hukum

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas adalah teori kredo dan teori otoritas hukum. Dalam terminologi hukum Islam, makna *kredo* sama dengan *syahadah*, yang berarti persaksian. Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekwensi logis dari pengucapan kredonya.¹⁵

Teori kredo dalam hukum Islam didasarkan kepada Q.S. al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.¹⁶

Pada ayat tersebut di atas terdapat lafazh *na'budu* yang diambil dari kata *'ibadah* yang berarti kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total dari setiap muslim bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Sedangkan pada lafazh *nasta'iin* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* yang berarti

¹⁵ Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), h. 107

¹⁶ Lihat QS 1 : 5 dalam CD Qur'an in Qord Version 6.0.

mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

Dipertegas dengan QS 13 : 30 yang berbunyi:

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh Telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (al-Quran) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat.¹⁷

Mengacu kepada kedua ayat di atas, seseorang yang telah mengaku dirinya menjadi muslim atau muslimah diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum Islam disebabkan ia telah terikat kepada suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam. Dalam ranah kajian filsafat hukum Islam, teori kredo merupakan turunan dari prinsip ketuhanan (*al-tauhid*), yang mana prinsipnya setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dalam al-Quran dan Rasul dalam Sunnahnya.

Teori utama lainnya yang mendukung teori kredo adalah teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.¹⁸ Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai

¹⁷ Lihat QS 13 : 30 dalam CD Qur'an in Qord Version 6.0.

¹⁸ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h.

kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya.

Jika dianalisis lebih mendalam, penekanan teori otoritas hukum memiliki efistimologi yang sama dengan teori kredo, yakni sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap perkara atau sengketa di kalangan umat muslim hendaknya diselesaikan di peradilan agama. Atas dasar itu, model pengembangan klinik bantuan hukum universitas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam memenuhi menegakan hukum dan hak asasi manusia.

2. Teori Menengah (*Middle Range Theory*): Teori Pengembangan Klinik Bantuan Hukum

Teori menengah (*middle range theory*) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas adalah teori pengembangan klinik bantuan hukum. Teori ini direduksi dari tesis sebelumnya tentang prinsip persamaan hak hukum (*equality before the law theory*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice theory*). Kedua prinsip ini menjadi landasan teoritik bagi perlunya mengembangkan klinik bantuan hukum universitas yang selama ini lebih banyak dilakukan banyak organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam berbagai diskusi ilmiah di kalangan sarjana hukum, prinsip persamaan hak hukum (*equality before the law theory*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice theory*) lebih banyak yang disandarkan kepada teori kebebasan (ajaran liberal-demokrasi). Teori kebebasan demokrasi diperkenalkan oleh Alan C. Reiter yang berkembang dalam sistem politik dan hukum di negara-negara Eropa, Britania Raya,

Amerika Serikat, Canada dan Australia. Teori ini telah berkembang sejak awal abad ke-17 ketika Thomas Hobbes, John Finnis, Thomas Aquinas, Montesquie dan John Locke memperkenalkan ajaran kebebasan dan demokrasi dalam filsafat hukum alam (*lex naturalis* atau *natural law* atau *natural rights*).¹⁹ Menurut teori ini, setiap orang diyakini memiliki persamaan hak dan kebebasan berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan persamaan hak keadilan di depan hukum (*access to justice*) serta dilakukan melalui klinik bantuan hukum.

Selanjutnya, teori klinik bantuan hukum dapat pula dilacak dari berbagai literatur. Klinik adalah fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk pelayanan perorangan yang menyediakan pelayanan dasar dan/atau spesialisik, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga ahli dan dipimpin oleh seorang tenaga ahli. Klinik umumnya lebih populer di bidang pelayanan kesehatan,²⁰ namun dalam perkembangannya telah berubah di berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan – salah satunya adalah klinik hukum (*legal clinic*).

Dasar hukum pendirian lembaga klinik hukum tidak jauh berbeda dengan klinik kesehatan bersama sebagai suatu perjanjian antara peserta yaitu antara pengusaha klinik dengan para dokter, sedangkan pada kilinik hukum antara advokat dengan klien. Oleh karena didasarkan pada perjanjian, maka dalam pendirian usaha klinik hukum bersama harus tunduk pada peraturan-

¹⁹ Lihat penjelasan lengkap Allan C. Reiter dan Stam, *Democracies at War* (Princeton, USA: Princeton University Press, 2002). Lihat pula Alan W. Houseman & Linda E. Perle, *Securing Equal Justice for All: A Brief History of Civil Legal Assistance in the United States*, (Center for Law and Social Policy, November 2003) hlm. 10-29 dan Helaine M. Barnett, *Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans*, (USA: Legal Services Corporation, September 2005) hlm. 4 dan 9. Lihat pula Editor, “Liberal Democracy” dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_democracy diakses tanggal 12 Juni 2016.

²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan.

peraturan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319, 1618, dan 1652 Buku III KUH Perdata.

Tanggung jawab usaha klinik hukum terhadap kerugian usaha tergantung pada bentuk kesatuan kerjasama yang digunakan. Bagi yang menggunakan bentuk kesatuan kerjasama Persekutuan Perdata (*Maatschap*) telah diadakan ketentuan oleh para peserta dalam persekutuan itu sendiri, yaitu para advokat dan paralegal hanya memasukkan tenaga atau keahliannya saja dan tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian usaha, melainkan yang bertanggung jawab adalah pengusaha klinik, sedangkan yang menggunakan bentuk Perseroan Terbatas.

Dalam hal apabila terjadi kerugian usaha, maka tanggung jawab tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambarnya. Dalam hal terjadi kerugian pada pihak pemakai jasa layanan hukum (klien), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka yang bertanggung jawab adalah tenaga pengacara (advokat atau paralegal yang bersangkutan), karena di dalam usaha klinik hukum yang tanggung jawab teknis dalam pelayanan hukum terletak pada masing-masing advokat atau paralegal bukan pada institusinya.

Istilah bantuan hukum berasal dalam bahasa Inggris merupakan kata benda (*noun*), berarti "orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan", kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Sedangkan dalam hukum Islam, term advokat berasal dari bahasa Arab, yakni *al-mahamy*, yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Selain itu, dalam bahasa Inggris term

advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti "suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dalam konteks bahasa Arab, pekerjaan advokat tersebut disebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocacy*.²¹

Untuk memperoleh definisi yang paling jelas, dalam tata hukum Indonesia istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa "bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu". Sedangkan advokat adalah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang". Adapun organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah suatu organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²²

Adapun pengertian bantuan hukum, salah satunya juga dapat dilihat dalam www.legalinfo.gov.cn/English/Legal_Aid/LegalAid1.htm bahwa:

Sistem bantuan hukum, dengan segala hakikat tugas pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang sistem hukum yang penting untuk

²¹ Definisi advokat dan bantuan hukum dapat dilihat dalam WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992). Lihat pula tulisan Muslim Muhammad Zaudat al-Yusufi, *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al-Syariat al-Islamy* (Cairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th) hlm. 1. Banding dengan penjelasan Ali Jar al-Naby, *Al-Mahammah wa Afaqa al-Qanuni fi al-Mustaqbal* dalam <http://www.brbrnet.net/vb/archive/index.php/t-2106.html> dan lihat pula tulisan Anonymous, *Hukum al-Mahammah ladi al-Muhakimu al-Wadh'iyati* dalam <http://www.muslimuzbekistan.net/ar/islam/fatawa/article.php?ID=8501>.

²² Lihat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

dimasukan menjadi prinsip konstitusi di mana semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, untuk menggaransi setiap warga negara sama kedudukannya dan mendapat keadilan di depan hukum, untuk melindungi jaminan sosial dan melindungi mekanisme perlindungan hak asasi manusia.²³

Melalui pengetahuan tersebut, bantuan hukum juga identik dengan term *access to justice*. Misalnya, Achmad Santosa memberi definisi *access to justice* dengan pengetahuan: “kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar HAM”. Definisi ini, tampaknya memiliki kesamaan dengan definisi yang diberikan oleh UNDP bahwa *access to justice* adalah “kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak melalui institusi-institusi peradilan formal atau informal sesuai dengan HAM”.²⁴

Dengan demikian keberadaan klinik bantuan hukum universitas menjadi salah satu institusi pada perguruan tinggi yang mengarahkan program-programnya untuk penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*) dalam memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Semua program konsultasi dan bantuan hukum di KBHU tersebut ditujukan dalam rangka mengimplementasikan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), pemenuhan hak-hak konstitusional semua individu (*to pulfill the*

²³ Dikutip dari penjelasan “*Legal aid system, with its essence of state duty and government action, is an important legal system to carry through the contitutional principle of “all citizens are equal before the law”, to guarantee that all citizens enjoy equal and partial protection by law, to protect social insurance systems, complete human rights protection mechanism*” lihat Editor, “Legal Aid” dipublikasikan dalam www.legalinfo.gov.cn/English/LegalAid/LegalAid1.htm diakses tanggal 16 Juni 2016.

²⁴ Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice* dalam *Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007) hlm. 232-233.

constitutional rights for all), serta penegakan hukum dan jaminan keadilan (*law enforcement and access to justice for all*).²⁵

Mengacu kepada teori di atas, peneliti berpendapat bahwa keberadaan para pengacara, advokat, paralegal, dan akademisi hukum sangat penting peranannya dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas. Klinik bantuan hukum universitas tidaklah dapat berdiri sendiri dalam memainkan peranannya dalam penegakan hukum dan keadilan. Ia perlu mendapatkan dukungan dari banyak pihak karena ia merupakan salah satu upaya positif yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum dan terpenuhinya hak asasi manusia dalam mendapatkan keadilan.

3. Teori Operasional (*Operational Theory*): Teori Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Teori operasional (*operational theory*) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas adalah teori penegakan hukum dan hak asasi manusia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hak hukum dan keadilan merupakan hak dasar dan hak konstitusional yang menjadi tanggung jawab setiap individu (*personal responsibility*) dan juga tanggung jawab negara (*state responsibility*). Oleh karenanya, pemenuhan hak hukum dan keadilan bagi setiap orang dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum.

Teori yang dapat digunakan untuk memenuhi hak hukum dan keadilan adalah teori hak asasi manusia. Seperti dikemukakan oleh Abul ‘Ala al-Maududi dalam *Human Rights in Islam* bahwa secara fitrah setiap orang

²⁵ Executive summary hasil wawancara penulis dengan Nurkholis Hidayat (Konsultan Senior Bidang Pengembangan Bantuan Hukum pada Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) berkaitan dengan program pengembangan klinik bantuan hukum universitas dan pemenuhan hak asasi manusia. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 di Melbourne, Australia.

terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (*all human beings are born free and equal in dignity and rights*).²⁶ Meskipun konsep persamaan hak dalam hukum Barat berbeda filosofinya dengan hukum Islam, akan tetapi secara substansi hukum Islam telah menggaransi prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Dengan kata lain, secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat.

Penjelasan berikutnya terdapat di dalam QS 5: 2²⁷ yang menjelaskan tentang kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori pemenuhan hak dasar atas hukum bagi setiap manusia. Demikian pula dengan substansi hadits Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Qudamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menjelaskan pentingnya menegakan hukum melalui persaksian. Hadits ini menjadi dasar bagi adanya teori persaksian dan pembelaan hukum bagi mereka yang sedang berperkara.

Bahkan jika ditelaah lebih dalam, banyak sekali ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang bisa menjadi dasar bagi teori tentang persamaan hak. Misalnya, hak untuk hidup (QS al-'An'am: 151)²⁸, hak persamaan derajat (al-

²⁶ Abul A'la al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976) hlm. 5

²⁷ Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

²⁸ Terjemah: "Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu

Hujurat: 13)²⁹, hak memperoleh keadilan (al-Maidah: 8)³⁰, hak perlindungan harta dan milik (al-Baqarah: 188)³¹ dan hak kebebasan beragama (al-Baqarah: 256),³² serta masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan bagi pemenuhan hak asasi manusia menurut fitrahnya.

Preposisi tersebut di atas berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia dengan tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial dan lain-lain. Teori tersebut menjadi dasar bagi perumusan konsep klinik bantuan hukum universitas.

Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".

²⁹ Terjemah: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

³⁰ Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

³¹ Terjemah: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

³² Terjemah: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Selanjutnya apabila dikaji menurut teori penegakan hukum dan hak asasi manusia dijelaskan dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: *al-Hakam*, *al-Mufti* dan *al-Mushalih al-alaih*, yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasehat hukum yang berperan memberikan jasa hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum fungsi mereka adalah memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan *musyawarah* sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas diperkuat dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai yang menjelaskan pentingnya melakukan *ishlah* dan *musyawarah*, sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْصِرْ أَخَاكَ ضَالًّا أَوْ مُضْلُومًا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمُضْلُومُ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ضَالِّمَا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الضَّلَمِ
فَذَلِكَ نَصْرُكَ أَيُّهَا

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: tolonglah saudaramu yang telah berbuat dzalim ataupun yang didzalimi. Kemudian mereka berkata: Ya Rasulullah, bukankah merupakan suatu kedzaliman jika kami menolong orang yang telah berbuat dzalim? Kemudian beliau menjawab: cegahlah mereka dari perbuatan dzalim, maka kamu telah menolong dia keluar dari kedzalimannya itu”³³

Pada gilirannya, kedua ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut menjadi dasar bagi adanya teori *ishlah* dan teori *musyawarah* bagi adanya klinik bantuan hukum. Oleh karena seorang advokat mestilah memahami dan mengetahui hukum Islam seperti halnya seorang mujtahid sehingga ia akan mampu menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Untuk menjamin persamaan hak atas hukum dan keadilan, Juhaya S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum, yaitu:³⁴ *pertama*, prinsip tauhid (QS 5: 47);³⁵ *kedua*, prinsip keadilan (QS 5: 8);³⁶ *ketiga*, prinsip kebebasan/*al-hurriyah* (QS 2: 256);³⁷ *keempat*, prinsip persamaan/*al-*

³³ Hadits dari Ibn Abbas ra diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasai.

³⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: UNISBA Press, 1996). Lihat pula Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (terj. Yudian Wahyudi Asmin), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992) hlm. 277-278 dan Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 9.

³⁵ Terjemah: “Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

³⁶ Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

³⁷ Terjemah: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

musawah (QS 49:13);³⁸ *kelima*, prinsip amar ma'ruf nahi munkar (QS 3 : 114);³⁹ *keenam*, prinsip tolong-menolong/*al-ta'awun* (QS 5 : 2);⁴⁰ *ketujuh*, prinsip musyawarah (QS 42:38);⁴¹ dan *kedelapan*, prinsip toleransi/*al-tasamuh* (QS 60:8-9).⁴²

Untuk tercapainya tujuan hukum syara', penegakan hukum dan hak asasi manusia hendaknya mengacu kepada teori keadilan sosial (*the theory of justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls⁴³. Menurutnnya, prinsip paling

³⁸ Terjemah: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

³⁹ Terjemah: "Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh".

⁴⁰ Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

⁴¹ Terjemah: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka".

⁴² Terjemah: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil; Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim".

⁴³ John Rawls (lahir pada tahun 1921) adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul "Teori tentang Keadilan" (dalam bahasa Inggris *A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. Lihat Freeman Samuel, "John Rawls" dalam In

mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakan dengan orang lain, seperti halnya kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Dengan kata lain, hakikat keadilan menurut John Rawls adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.⁴⁴

Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Rawls⁴⁵ menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan,

The Cambridge Dictionary of Philosophy. Robert Audi, ed. 774, (London: Cambridge University Press, 1999) hlm. 2 dan Ted Honderich, *The Oxford Companion to Philosophy*, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 745.

⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999), hlm. 3

⁴⁵ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice: Philosophy and Public Affairs* 33 (2005), hlm. 113-147.

karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Sedangkan keadilan itu sendiri pada intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.⁴⁶

Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip penegakan hukum Islam hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan" (*tasharruf al-imami 'ala ro'iyati manuutun bi al-maslahati*). Kaidah tersebut didukung dengan kaidah "perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri" (*al-muta'addi afdhalu min al-al-qashiri*). Sehingga tujuan penegakan hukum mengacu kepada kaidah hukum "apa-apa yang tidak bisa kita diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya" (*maala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*). Berdasarkan ketiga kaidah tersebut, setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama (otoritas hukum), tetapi hal itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*).⁴⁷

Selain itu, peneliti juga ingin mengutip teori maslahat Imam al-Syathibi,⁴⁸ yang banyak menjelaskan teori tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), *al-Muwafaqah*, dinyatakan bahwa tujuan-tujuan syari'at tersebut ada yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyah* – yang berpijak kepada lima tujuan syari'at yakni: *pertama*, memelihara agama (*hifd al-din*); *kedua*, memelihara jiwa (*hifd al-nafs*); *ketiga*, memelihara keturunan (*hifd al-nasl*); *keempat*, memelihara akal (*hifd al-'aql*); dan *kelima*, memelihara harta

⁴⁶ Peneliti mengutip teori keadilan sosial (*the theory of justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls dari http://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls yang diakses tanggal 16 Juni 2016.

⁴⁷ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Asjmun Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qawa'id al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) dan Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) dan 'Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâlih al-Anâm* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)..

⁴⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz II, hlm. 7.

(*hifd al-maal*). Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa pengembangan klinik bantuan hukum universitas merupakan bagian dari upaya positif perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi dalam pemenuhan hak dasar atas hukum bagi setiap individu yang bersifat kebutuhan primer (*dharuriyyah*).

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini mencakup atas lima bagian penting: pertama, BAB I berisikan pendahuluan mulai dari latar belakang hingga kerangka berpikir dan sistematika penelitian; kedua, BAB II berisikan kerangka teori pengembangan klinik bantuan hukum universitas; BAB III berisikan metodologi penelitian; BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang model pengembangan klinik bantuan hukum universitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne; dan BAB V berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KERANGKA TEORI PENGEMBANGAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS

A. Konsep dan Teori Klinik Hukum

1. Pengertian Klinik Hukum

Pendidikan Klinik Hukum didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda di seluruh negara, kadang-kadang juga didefinisikan secara berbeda pada fakultas-fakultas hukum, tetapi ada di beberapa negara dipahami yang sama. Misalnya, dalam *Black Law Dictionary*¹ dijelaskan bahwa klinik hukum adalah sekolah hukum yang mengajarkan tentang berbagai pendidikan dan kemahiran hukum kepada para mahasiswa dan pelayanan hukum kepada para klien. Klinik hukum universitas biasanya dipimpin oleh beberapa orang professor dan program kerjanya bersifat sukarela (*pro bono*) dalam berbagai pelayanan jasa hukum serta tidak memungut bayaran kepada para klien.

Keterlibatan para mahasiswa di bawah bimbingan dan supervisi para dosen ahli pada umumnya melakukan berbagai kajian sejenis riset, *legal drafting*, dan diskusi untuk memecahkan berbagai kasus hukum yang sedang dihadapi oleh para klien. Bahkan dalam beberapa kasus, ada beberapa profesor di Perguruan Tinggi yang mengambil peranan dalam memberikan jasa konsultasi hukum kepada para klien sebelum mereka mengajukan upaya hukum formal ke pengadilan. Selain itu, banyak pula mahasiswa hukum yang terlibat sebagai relawan (*volunteers*) atau paralegal pada klinik bantuan

¹ Peneliti menterjemahkan pengertian klinik hukum dari uraian berikut: “*A legal clinic (also law clinic or law school clinic) is a law school program providing hands-on-legal experience to law school students and services to various clients. Clinics are usually directed by clinical professors. Legal clinics typically do pro bono work in a particular area, providing free legal services to clients*”. Lihat dalam penjelasan Editor, *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, "Clinical Legal Studies," (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990), hlm. 254

hukum universitas ikut belajar dan mengambil pengalaman dalam memberikan bantuan hukum kepada para klien.²

Di samping itu, keberadaan klinik hukum juga telah berperan dalam membantu para klien di berbagai bidang hukum, antara lain: hukum keimigrasian (*immigration law*), hukum lingkungan (*environmental law*), hukum hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), hukum perumahan (*housing law*), hukum pembelaan dalam perkara pidana (*criminal defense*), hukum penuntutan perkara pidana (*criminal prosecution*), hukum Indian Amerika (*American Indian law*), hukum hak asasi manusia (*human rights law*) dan hukum pidana internasional (*international criminal law*).³

Selain itu, keberadaan klinik hukum bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) adakalanya bersifat lebih luas yang mencakup atas semua obyek hukum seperti hukum perusahaan dan hukum ketatanegaraan, bahkan mencakup pula obyek-obyek perkara yang sudah masuk ke ranah peradilan dan legislasi, termasuk pula memberikan arahan dan batasan kepada siapa saja yang memerlukan jasa bantuan hukum.⁴

Dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi, istilah pendidikan klinik hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-

² Pada beberapa perguruan tinggi terkemuka di sejumlah negara maju, pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum pada umumnya bukan hanya melibatkan mahasiswa (paralegal), tetapi juga melibatkan bimbingan dan supervisi dari para dosen senior yang ahli di bidang praktik hukum, Lihat penjelasan lengkap dalam Editor, "Legal Clinic at Louisiana Supreme Court Rule XX", dalam <http://www.lasc.org/rules/supreme/RuleXX.asp> diakses 28 Juli 2016.

³ Lihat Anonimous, "Uniform Local Rules Of The United States District Courts For The Eastern, Middle, And Western Districts Of Louisiana, LR83.2.13, dalam http://www.laed.uscourts.gov/LocalRules/Civil_83.htm diakses tanggal 28 Juli 2016.

⁴ Lihat Tim Editor, University Utrecht School of Law Clinical Programme on Conflict, Human Rights and International Justice dalam *International Journal on Human Rights* at Utrecht University, dipublikasikan 30 January 2010. Bandingkan pula dengan penjelasan Ian Urbina, "*School Law Clinics Face a Backlash*". The New York Times. Dipublikasikan tanggal 4 April 2010.

nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*), yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif.

Dilihat dari perspektif pendidikan hukum, elemen pengetahuan (*knowledge element*) merupakan unsur paling penting yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa hukum. Sedangkan keadilan sosial (*social justice*) menjadi fokus dari pendidikan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan dalam berbagai contoh pengetahuan dan kemahiran hukum (*skills and knowledge in law*) yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa hukum.

Demikian pula dengan komponen keahlian hukum (*law skills*) lebih menitikberatkan kepada kemampuan dan penguasaan mahasiswa dalam praktik penegakan hukum di dalam dan di luar pengadilan, seperti: *lawyering technique*, *advocacy skill* dan lain-lain. Selanjutnya, komponen nilai hukum (*law values*) menjadi fondasi moral yang paling utama dan harus dimiliki oleh setiap mahasiswa hukum yang berkaitan dengan keberpihakan mereka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan sosial di masyarakat.⁵

Selanjutnya dilihat dari perspektif ilmu manajemen pendidikan, pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum merupakan melakukan usaha-usaha yang ditempuh oleh perseorangan maupun lembaga bantuan hukum untuk melayani kebutuhan jasa hukum kepada semua klien. Jasa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga bantuan hukum kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani dan bersifat tidak berwujud serta tidak dapat dimiliki oleh orang lain.

⁵ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum*, (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 2.

Adapun secara kelembagan, Klinik Hukum merupakan wadah embrio dari praktisi hukum yang berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa hukum pada perguruan tinggi dalam memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat sebelum mereka benar-benar terjun secara langsung pada ranah yang lebih profesional di Lembaga Bantuan Hukum ataupun menjadi aparaturnya penegak hukum yang sesungguhnya.⁶ Namun demikian, hal ini tidak mengandung pengertian bahwa para dosen dan paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas dianggap belum mahir seperti pengacara atau advokat profesional, karena faktanya banyak kasus yang dibantu dan didampingi oleh para dosen dan mahasiswa hukum justru ditangani secara profesional.

Pada praktiknya, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diterapkan pada Klinik Hukum meliputi beberapa obyek hukum yang bersifat perdata maupun pidana. Sifat dari Klinik Hukum adalah sebagai menjadi wadah langkah awal bagi masyarakat pencari keadilan yang menginginkan perlindungan hukum dan jaminan keadilan atas setiap kasus atau peristiwa hukum yang dihadapinya. Adapun pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan dapat berbentuk konsultasi, diskusi, audiensi, mediasi, pelayanan pembuatan surat gugatan atau permohonan kepada lembaga peradilan dan pelayanan hukum lainnya yang dilaksanakan bukan di hadapan persidangan.⁷

⁶ Peneliti menyarikan beberapa pengertian tentang Klinik Bantuan Hukum Universitas yang mengutip dari Editor, "What is a Legal Clinic", dipublikasikan dalam <http://lawschool.about.com/od/lawschoolculture/a/legalclinic.htm> diakses tanggal 28 Juli 2016.

⁷ European Network for Clinical Legal Education menjelaskan: "*Clinical legal education is a legal teaching method based on experiential learning, which fosters the growth of knowledge, personal skills and values as well as promoting social justice at the same time. As a broad term, it encompasses varieties of formal, non-formal and informal educational programs and projects, which use practical-oriented, student-centered, problem-based, interactive learning methods, including, but not limited to, the practical work of students on real cases and social issues supervised by academics and professionals. These educational activities aim to develop professional attitudes and foster the growth of the*

Layaknya sebuah fasilitas publik pada umumnya, Klinik Hukum juga memiliki struktur organisasi, ketentuan, instalasi-instalasi, dan fasilitas pendukung untuk menunjang dalam pelayanan jasa yang hampir sama sepenuhnya dengan Kantor Firma Hukum. Struktur organisasi yang terdapat dalam Klinik Hukum pada umumnya terdiri atas Penanggungjawab, Pembina, Konsultan, dan Pelaksana Harian.

Sebagai institusi dengan basis operasionalnya di bawah Fakultas Syariah dan Hukum, Klinik Hukum memiliki beberapa keunggulan, antara lain:⁸ (1) berada hampir di seluruh Perguruan Tinggi di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Fakultas Syariah dan Hukum baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta; (b) memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten yaitu dosen dan mahasiswa dengan keahlian masing-masing; (c) memiliki fasilitas minimal, seperti ruang sekretariat atau kantor; dan (d) memiliki jaringan alumni lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang bersangkutan.

Namun demikian keberadaan Klinik Hukum juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu:⁹ (a) keterbatasan waktu melaksanakan operasional kegiatan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum yang berbenturan dengan jam belajar mengajar; (b) keterbatasan regulasi yang mengatur dosen dan mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan pendampingan hukum kepada klien sampai ke persidangan, kecuali oleh advokat atau pengacara profesional; (c) keterbatasan alokasi dana yang dimiliki oleh Klinik Hukum hanya sebagian saja dari anggaran kegiatan pengabdian

practical skills of students with regard to the modern understanding of the role of the socially oriented professional in promoting the rule of law, providing access to justice and peaceful conflict resolutions, and solving social problems". Lihat dalam European Network for Clinical Legal Education, "Definition of Legal Clinic", dalam <http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic> diakses tanggal 28 Juli 2016.

⁸ Tim Penyusun, *Profil Klinik Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Tahun 2013.

⁹ *Ibid.*

kepada masyarakat; dan (d) pendidikan Klinik Hukum kebanyakan memiliki siklus perencanaan yang bersifat sementara dan menjadi wadah praktik penyaluran minat dan bakat mahasiswa di bidang kemahiran hukum, serta interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa hukum.

Terlepas dari beberapa keunggulan dan kekurangannya, Klinik Hukum lebih sederhananya menjadi minitaur dari sebuah wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa hukum agar dapat menekuni profesi hukum baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks ini, para mahasiswa dapat belajar dan mengambil pengalaman-pengalaman praktis dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) dengan tidak mengedepankan aspek finansial (*officium nobile* atau *prodeo*).

Peneliti berpendapat bahwa pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh Klinik Hukum kepada masyarakat para pencari keadilan merupakan perbuatan yang sangat mulia. Tidak sedikit para dosen dan paralegal mahasiswa mendapatkan berbagai kendala dan hambatan dalam membantu masyarakat pencari keadilan tersebut. Karenanya, meskipun dalam beberapa situasi ada beberapa kasus atau perkara yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh paralegal mahasiswa hukum tidak sampai kepada pengadilan (litigasi), maka upaya hukum lebih lanjut dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara di hadapan persidangan dengan mendapatkan pendampingan oleh para advokat atau pengacara profesional.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa Klinik Hukum memiliki arti suatu fasilitas publik yang didirikan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki peran dan fungsi untuk memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan baik perseorangan maupun instansi, baik melalui upaya hukum litigasi maupun non litigasi dan bersifat sukarela (*pro bono*, *officium nobile*, atau *prodeo*).

2. Dasar dan Tujuan Klinik Hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*). Selanjutnya diatur pula di dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) yang pada intinya menjamin bahwa semua orang berhak atas perlindungan dari hukum dan harus dihindarkan dari diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk kekayaan.¹⁰

Namun demikian dalam pelaksanaannya, adakalanya hukum cenderung diskriminatif bagaikan mata pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Potret kasus-kasus yang muncul di media menunjukkan si miskin dengan cepat diproses secara hukum tanpa memberikan ruang baginya untuk melakukan pembelaan diri sedangkan para pejabat dan pengusaha yang memiliki uang dan kekuasaan meskipun ia sudah dinyatakan bersalah dan atau menjadi tersangka/terdakwa masih dimungkinkan untuk menduduki jabatannya. Padahal hak atas persamaan di hadapan hukum dan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹¹

¹⁰ Andrew Levine, *Human Rights and Freedom*, "The Philosophy of Human rights" ed. Alan S. Rosembum (London: Aldwych Press, t.th) hlm. 138. Lihat pula C. Theodoor van Boven, *Survey of the Positive International Law of Human Rights*, dalam *"The International Dimensions of Human Rights"*, ed. Karel Vasak, (Wesport-Connecticut: UNESCO and Greenwood Press, 1982) Vol. 1 hlm. 87-92.

¹¹ Deni K. Yusup menjelaskan bahwa persamaan hak di depan hukum erat kaitannya dengan konsep HAM dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan interelasi hak dan kewajiban. Hal ini melahirkan premis hukum, "*di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban; dan di mana ada kewajiban maka di situ ada hak*" (*where are the rights, there are the obligations; and where are the obligations, there are the rights*). Preposisi lain yang muncul dari premis di atas adalah "*setiap orang harus menghormati hak-hak orang lain; dan orang lain pun berkewajiban menghormati hak-hak seseorang itu*" (*everyone must guarantee the someone rights; and someone must guarantee the other one rights*). Lihat dalam Deni K. Yusup, *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2009, hlm. 32.

Berkenaan dengan hak atas bantuan hukum, pemerintah Indonesia belum mengatur secara spesifik dalam konstitusi. Hak atas bantuan hukum hanya dimaknai dengan adanya hak atas jaminan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Persamaan di depan hukum dimaksudkan baik orang miskin dan orang kaya, baik secara materi maupun jabatan memiliki kedudukan yang sama di dalam proses hukum (Pasal 28 D UUD 1945).¹² Apabila orang kaya dapat membayar seorang pengacara untuk membela hak-haknya, maka orang yang miskin hendaknya dibiayai oleh negara. Dengan kata lain, ketidakmampuan seseorang secara ekonomi tidak menghambat hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum. Untuk itu, negara harus mengatur agar akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan pembiayaan dapat diperoleh dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemenuhan hak atas bantuan hukum diharapkan dapat membuat posisi tawar masyarakat menjadi lebih kuat di hadapan hukum dan mencegah perlakuan tidak manusiawi atas hak-hak tersangka atau terdakwa melalui pendampingan hukum bagi si miskin. Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

¹² Dalam Pasal 28 D (1-4) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

¹³ Dalam konteks hukum HAM, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dapat dipahami sebagai keharusan melaksanakan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang dibentuk melalui mekanisme konsensus dan dituangkan menjadi konstitusi negara dan konvensi internasional, sehingga ia memiliki kekuatan hukum tetap, mengatur, mengikat, dan memaksa. Segala bentuk pengabaian terhadap peraturan dan perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menurut hukum HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab individu (*personal responsibility*), tetapi juga menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*). Lihat dalam Deni K. Yusup, *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2009, hlm. 52.

Hukum memiliki hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi keberadaan dan peran Klinik Hukum di Perguruan Tinggi, antara lain: *pertama*, dalam perspektif filsafat hukum, secara filosofis dikenal teori kredo yang menjelaskan bahwa seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekwensi logis dari pengucapan kredonya. Konsekuensinya, setiap orang diharuskan melaksanakan hukum sesuai dengan hukum agama yang dianutnya.¹⁴

Kemudian didukung dengan teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.¹⁵ Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya.

Penekanan teori kredo dan teori otoritas hukum sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap perkara atau sengketa di kalangan umat muslim hendaknya diselesaikan di peradilan agama. Atas dasar itu, maka model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan salah satu upaya positif yang dapat dilakukan oleh setiap orang terdidik dalam memenuhi menegakan hukum dan hak asasi manusia.

¹⁴ Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), h. 107

¹⁵ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h. 114

Kedua, secara historis keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan bantuan hukum. Seperti dijelaskan oleh Didi Kusnadi¹⁶ bahwa UU Advokat dan UU Bantuan Hukum merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menegakan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum diharuskan memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Di bidang kekuasaan kehakiman, termasuk pula para penegak hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa, polisi, dan advokat – kesemuanya telah diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk berperan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Menurutnya, pelayanan jasa bantuan hukum tersebut perlu digaransi oleh pemerintah dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menjamin hak hukum dan keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui UU Advokat dan UU Bantuan Hukum tampaknya belum begitu optimal, sehingga perlu perkuat pelaksanaannya.

Bahkan dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: *al-Hakam*, *al-Mufti* dan *al-Mushalih al-alaih*, yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Secara umum, fungsi mereka adalah untuk memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan *musyawarah* sebagaimana ditekankan dalam QS An-Nisa ayat 35.

¹⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung djati Bandung, Tahun 2009, hlm. 199-200.

Ketiga, secara sosiologis Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mencapai tujuan *access to justice* bagi setiap anggota masyarakat. Fungsi dan tujuan *access to justice* yang dikembangkan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas, antara lain:¹⁷ (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar mereka, yakni sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya para praktisi muda dengan cara memberikan pelatihan bantuan hukum; (b) mendorong pihak pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum kepada masyarakat (UU Bantuan Hukum); (c) kerjasama lintas institusi antar semua elemen masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam memberi perhatian terhadap bantuan hukum; (d) mendorong pemerintah daerah menyisihkan sebagian dana APBD-nya untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan (e) mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk memasukan advokasi dan bantuan hukum ke dalam satuan kurikulum pendidikan hukum dan hak asasi manusia.

Keempat, secara politik pemerintah Indonesia memiliki kewajiban politik untuk menjamin pemenuhan hak atas hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Piagam HAM yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/ MPR/1998 disebutkan bahwa:

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

¹⁷ Petikan hasil wawancara dengan Nurkholis Hidayat (pengacara dan fungsionaris LBH Jakarta pada tanggal 28 Juli 2016).

Peneliti berpendapat bahwa dilegislasikannya UU HAM, UU Advokat dan UU Bantuan Hukum merupakan upaya politik hukum pemerintah dan negara Indonesia yang ikut menggaransi penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem dan tata hukum Indonesia. Kebijakan politik hukum tersebut sekaligus menunjukkan bentuk pemenuhan kewajiban warga negara (*personal responsibility*) dan pemerintah Indonesia (*state responsibility*) dalam menegakan HAM.

Kelima, secara yuridis telah dilakukan upaya untuk memaksimalkan fungsi Klinik Bantuan Hukum dalam proses penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuannya tentu diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar Klinik Bantuan Hukum, antara lain:

- a. Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia terdapat sila-sila yang memuat pemenuhan hak atas hukum dan keadilan, yaitu: (1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*; (2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab*; (3) *Persatuan Indonesia*; (4) *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*; dan (5) *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*;
- b. Alinea Kesatu Pembukaan UUD 1945 menegaskan: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Kalimat tersebut relevan dengan prinsip HAM universal, yakni martabat manusia (*human dignity*), kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*) serta *asas kehormatan manusia (al-fitrah)* dalam hukum Islam. Pengakuan hak untuk memperoleh kemerdekaan dapat dilihat dalam Pembukaan UDHR 1948 dan UIDHR 1981;
- c. Pasal 7 Ketetapan MPR RI Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Sikap dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM

disebutkan bahwa: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil*”;

- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa: (1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; dan (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*
- e. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan ketentuan tentang bantuan hukum cuma-cuma yakni: (1) *advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*
- f. Program Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Pemenuhan hak atas bantuan hukum sendiri tuntutan konstitusional yang bersifat *non derogable rights*, dalam arti ia merupakan hak yang tidak dapat dicabut, dikurangi, dan itanggihkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, ha

katas bantuan hukum menjadi hak asasi bagi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*.

Mengacu pada semua ketentuan tersebut di atas, terdapat perluasan makna bagi orang yang dapat memberikan bantuan hukum yang sebelumnya dimonopoli oleh para advokat. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti di dalam memberikan pelayanan hukum yang luas kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia mengingat jumlah advokat yang terbatas dan biasanya tinggal di kota-kota besar. Dengan dasar hukum ini maka dosen dan mahasiswa fakultas hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU).

Kehadiran KBHU merupakan implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, KBHU dapat menjadi tempat praktik mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk menyiapkan tenaga pekerja di bidang hukum. Di sinilah pendidikan hukum yang berbasis klinik hukum sangat diperlukan keberadaannya. KBHU berkedudukan sebagai bagian kecil dari lembaga di bidang hukum, fungsinya adalah untuk menyelesaikan perkara hukum di tingkat awal berupa materi penegakan hukum, pemaparan konsep dan mekanisme penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal yang paling penting lainnya adalah mahasiswa yang tergabung dalam program pendidikan klinik hukum tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini bertujuan untuk mengasah keahlian, pengalaman, dan kepekaan sosial para mahasiswa untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa di masa yang akan datang.

Pendidikan Klinik Hukum selayaknya bukan hanya menjadi penulisan di jurnal sebagai satu kewajiban untuk kenaikan pangkat, tetapi juga penulisan di jurnal dapat menjadi bagian dari diskusi ilmiah dengan para pakar lain. Karena banyaknya permasalahan hukum yang ada di Indonesia, tentunya diskusi melalui karya-karya ilmiah pada jurnal-jurnal dapat memperkaya pengetahuan masyarakat yang selalu terbarukan, yang dapat diambil banyak manfaatnya bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia, sekurang-kurangnya melalui klinik hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pendidikan Hukum Klinik menjadi bagian dari peran pemerintah untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan kepada semua anggota masyarakat. Dilegislasikannya UU Bantuan Hukum merupakan salah satu upaya pemerintah dan negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Atas dasar itulah, maka Pendidikan Klinik Hukum sangat penting diajarkan pada Perguruan Tinggi dengan tujuan:¹⁸

- a. Program Klinik Hukum ditujukan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu;
- b. Klinik Hukum dimaksudkan untuk menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal;

¹⁸ Tujuan pendidikan klinik hukum mengacu kepada amanat yang terkandung dalam konstitusi untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan serta relevan dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana pemerintah berkewajiban untuk: (a) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; (b) menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; (c) menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; (d) mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan (e) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

- c. Klinik Hukum ditujukan untuk menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggungjawab profesi hukum;
- d. Dosen supervisor pada Klinik Hukum dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan scholarship mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat;
- e. Penggunaan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas tersebut di atas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Lebih lanjut, metode pembelajaran yang reflektif ini telah terbukti merupakan cara yang paling efektif untuk pembelajaran mahasiswa secara abadi;
- f. Keberadaan Klinik Hukum ditujukan untuk memperkuat peran masyarakat sipil menuju terwujudnya *civil society* dengan merawat tanggung jawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.

Dunia pendidikan hukum dewasa ini seperti halnya pendidikan lainnya di universitas mempunyai tiga tugas penting yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga program tersebut di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peran Perguruan Tinggi. Terkait dengan tugas pendidikan hukum saat ini tampaknya perlu dilihat bagaimana kurikulum yang digunakan yang akan mengolah masukan – dalam hal ini adalah para mahasiswa (*input*) – menjadi keluaran (*output*) yakni lulusan fakultas hukum yang mahir di bidang keahlian hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang diharapkan tersebut tentunya profil lulusan nya sesuai yang telah dibuat sebelumnya, yang mempunyai kompetensi yang juga sudah ditentukan. Sementara pengabdian dan penelitian juga harus dilakukan. Sebagai dosen dan mahasiswa hukum,

tentu pengabdian pada masyarakat serta penelitiannya harus sesuai yaitu di bidang hukum. Artinya diharapkan bahwa hasil dari pendidikan yang dilakukan dapat menjadi bekal yang cukup dalam melakukan pengabdian pada masyarakat serta penelitian.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa keberadaan Klinik Hukum Universitas dapat menjadi salah satu “poros” yang ideal bagi Perguruan Tinggi untuk membina bakat dan motivasi mahasiswa, serta memberikan visi yang baik terhadap peluang karir dikemudian hari. Peran tersebut tidak terlepas dari adanya lembaga-lembaga bantuan hukum sejenis untuk senantiasa memberikan *healing* dan pembinaan bagi mahasiswa di bawah bimbingan para dosen dalam menyelaraskan kepentingan akademik dan praktis di bidang kemahiran hukum.

3. Sejarah Perkembangan Klinik Hukum

Pasca gagalnya peristiwa kudeta PKI, yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno, maka lahirlah era Orde Baru (ORBA) yang ingin membuat citra baru dengan membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi dan politik, juga ditumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan mimbar pada universitas-universitas.¹⁹

Pada tingkat universitas mulai ada kesadaran untuk memberi bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang terlibat dalam kasus-kasus pidana. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, setidaknya terdapat beberapa universitas negeri yang mulai berperan aktif dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, diantaranya adalah Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran.

¹⁹ Mochtar Buchori, *Kebebasan Akademik dalam Konteks Pengembangan IPTEK Dan Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Basis, 1989), hlm. 425.

Misalnya, Fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, sekaligus menjadi universitas yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan klinik hukum adalah Prof. Dr. Mochtar Kusuma-atmaja. Melalui pendidikan hukum klinis dengan mendirikan biro hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 18 Februari 1969, Mochtar Kusumaatmaja telah meluaskan pelayanan LKBH Kampus bukan sekedar memberikan nasehat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum untuk masyarakat miskin di muka pengadilan.

Tahun 1970 merupakan tahun yang penting dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada tahun tersebut diundangkan Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan adanya Undang-Undang yang baru ini, maka dijamin kembali kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak luar, diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan di bidang bantuan hukum, dalam Undang-undang ini terdapat bab khusus mengenai bantuan hukum (lihat bab VII pasal 35-38). Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan momentum baru dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada saat itu bantuan hukum sudah dapat diberikan sejak tersangka ditangkap dan/atau ditahan.

Todung mulya Lubis menganggap Undang-undang ini sebagai “milestone” sejarah bantuan hukum dalam pemerintahan orde baru.²⁰ Pada tahun yang sama juga didirikanlah Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta sebagai pilot proyek dari PERADIN dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Peradin tanggal 26 oktober 1970 No. 001/kep/dpp/10/1970. Lembaga ini diakui secara resmi oleh Gubernur Jakarta yang

²⁰ Todung Mulya lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 5.

sekaligus memberikan subsidi setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan yang dipilih sebagai direktur pertama adalah Adnan Buyung Nasution dengan meletakkan tiga tujuan pokok konsep pembentukan Lembaga Bantuan Hukum miskin dan buta hukum, kedua, mengembangkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum, dan yang ketiga adalah mengembangkan hukum dan prakteknya menurut kebutuhan zaman modern.

Surat keputusan pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1970 tersebut berimbas pada lahirnya berbagai macam Lembaga bantuan hukum di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Solo, dan menyusul Palembang. Lahirnya lembaga bantuan hukum di berbagai kota dan biro konsultasi hukum di fakultas hukum mendorong diselenggarakannya konferensi lembaga bantuan hukum se-Indonesia pada 10-12 Desember 1971. Konferensi tersebut menghasilkan berbagai keputusan penting diantaranya pembentukan lembaga bantuan hukum tingkat Nasional yang merupakan kerjasama antara LBH dan Biro Konsultasi Hukum, yang menyarankan fakultas hukum di Indonesia menyelenggarakan biro konsultasi hukum untuk masyarakat yang tidak mampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.²¹

Sejak lahirnya Lembaga Bantuan Hukum, telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitasnya dan keberhasilannya ia telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan berbagai program aksi yang sesuai dengan sifat dan ruang lingkup Lembaga Bantuan Hukum yang lebih luas. Secara sistemik, Lembaga Bantuan Hukum juga turut besar

²¹ Tim *The Indonesian Legal Resource Center* dan Forum Solidaritas, *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan LKBH Kampus*, (Jakarta: Delapan Cahaya Printing, 2010), hlm. 15.

dengan adanya keterlibatan para akademisi di dalamnya. Pembinaan Mahasiswa hukum juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari kokohnya tonggak lembaga bantuan hukum di Indonesia.

4. Tahapan dan Bentuk Klinik Hukum

Klinik hukum merupakan wadah yang esensinya adalah untuk memberikan pendidikan hukum berbasis klinis dan sangat mengedepankan *knowledge, practical skills, and value*, yaitu mengembangkan pengetahuan para mahasiswa, agar memiliki kemampuan praktis, dan mendorong mereka untuk memiliki nilai-nilai keadilan sosial dan etika profesional.

Program pendidikan hukum berbasis klinik hukum pada Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:²²

- a. *Planning component*, yaitu masa persiapan mahasiswa klinik hukum. Pada tahapan ini para mahasiswa dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait langsung dengan kegiatan praktek yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, seperti:
 - 1) Penguasaan teori hukum;
 - 2) Kemampuan menganalisa kasus;
 - 3) Kemampuan menerapkan teori hukum.
- b. *Experiential component*, yaitu tahapan mahasiswa melaksanakan praktek keterampilan hukum, yang mencakup:
 - 1) Kemampuan melakukan wawancara dengan klien (*client interviewing exercises*);
 - 2) Kemampuan melakukan negosiasi (*negotiation exercises and transaction exercises*);
 - 3) Kemampuan menyusun argumen dan pembelaan (*legal writing and argument drafting programs*).

²² Tim Penyusun, *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013), hlm. 71-72.

- c. *Reflection*, yaitu tahapan mahasiswa melaksanakan evaluasi dari proses-proses pembelajaran yang telah dilalui, yang mencakup:
- 1) Kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri;
 - 2) Kemampuan untuk mengadakan peer review;
 - 3) Kemampuan untuk menerima kritik dari dosen pembimbing.

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dalam menjalankan roda pendidikan hukum di lingkungan klinik hukum diantaranya yaitu:

- a. Prinsip keadilan sosial dan penerapannya dalam bidang profesional;
- b. Etika profesi hukum;
- c. *Interview skill*;

Klinik Hukum tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen, yang diatur dengan aturan yang sama terhadap LBH di luar Fakultas Syariah dan Hukum. Keberadaan Klinik Hukum pada umumnya dihubungkan dengan Fakultas Syariah dan Hukum sebagai basis operasionalnya. Namun di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, kantor-kantor hukum yang ada di komunitas yang menyediakan pelayanan hukum juga disebut Klinik Hukum (*Legal Clinic*). Suatu fakultas hukum yang mungkin menjalankan LBH di komunitas tempat alumni, mahasiswa, dosen dan volunteer lokal menyediakan bantuan hukum termasuk ke dalam pengertian klinik hukum (*legal clinic*).

Terdapat banyak ragam Klinik Hukum yang ada dan atau dijalankan oleh Fakultas Syariah dan Hukum jenisnya sangat tergantung kepada banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan pada lokasi praktiknya, terdapat dua jenis Klinik Hukum yaitu yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum (*in-house clinic*) dan di luar Fakultas Syariah dan Hukum (*out-house clinic*). Masing-masing juga memiliki ciri dan karakteristik yang memiliki kekhususan sendiri.

Program-program dari *out-house clinic* terdiri atas:²³

- a. *Externship*, yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervisi dari pengacara praktik atau pejabat pemerintahan;
- b. *Community Clinic*, tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
- c. *Mobile Clinic*, mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan atau memberitahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikan nasehat jenis tertentu permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya.

Program-program dari *in-house clinic* terdiri dari:²⁴

- a. *Life client/real client clinic*, di mana mahasiswa menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada klien;
- b. *Simulation clinic*, di mana mahasiswa mensimulasikan kehidupan nyata atas dasar role-playing dengan tujuan untuk melatih kemampuan kepengacaraan mahasiswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam simulation clinic ini.

Model Klinik Hukum yang populer, sering diistilahkan dengan *Street Law Clinic*, yaitu menyediakan pendidikan hukum dan hak-hak seperti siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga masyarakat yang cenderung termarginalkan. Selain mendiskusikan masalah-masalah hak-hak kewarganegaraan, mahasiswa juga bisa berdiskusi tentang pemahaman dasar hukum misalnya tentang jual beli tanah, penulisan surat wasiat dan lain-lain.

Terlepas dari semua bentuknya, Klinik Hukum juga mempunyai ciri, antara lain: (1) sebuah komponen untuk mengajarkan keahlian dan nilai-nilai

²³ Tim Penyusun, *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013), hlm. 71-72.

²⁴ Ibid.

tentang keadilan sosial (ditujukan kepada *planning component*), (2) sebuah komponen untuk menerapkan keahlian-keahlian itu di dalam suatu practical setting (ditujukan untuk *practice setting*); dan (3) refleksi dan evaluasi (komponen refleksi dan evaluasi). Di dalam program Klinik Hukum yang paling sederhana, mahasiswa mengikuti mata kuliah klinik dengan memperoleh kredit.

Mahasiswa mendampingi kliennya secara nyata, pada saat itu juga mereka juga harus menghadiri perkuliahan dalam lingkup Klinik Hukum yang memparalelkannya dengan pengalaman lapangan mereka. Struktur kerja lapangan yang hampir sama, dan paralel seminar dipakai juga di dalam externship program. Dosen yang bekerja di Klinik Hukum melakukan supervisi kerja mahasiswa dengan suatu jumlah kasus yang terbatas, hal yang penting pembelajaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Dosen-dosen tersebutlah yang akan mengawasi aktivitas mahasiswa, apakah itu kegiatan litigasi atau jenis-jenis pelayanan hukum lainnya. Sehingga hanya melalui perencanaan dan keseimbangan semua komponen yang menjadikan tujuan Pendidikan Hukum Klinik akan tercapai.

5. Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Penegakan Hukum

Di bidang penegakan hukum maka seharusnya ada peningkatan upaya pemulihan kepercayaan dunia hukum dan masyarakat terhadap profesionalitas, integritas dan kewibawaan serta martabat lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pengawasan eksternal dari masyarakat. Secara internal, lembaga-lembaga penegak hukum perlu meningkatkan upaya pengawasan internal, upaya pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penggunaan teknologi baru.

Salah satu soal penting peningkatan lembaga-lembaga penegak hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat bahwa permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya

dalam rangka penegakan hukum adalah sumber daya manusia yang menjalankan sistem penegakan hukum itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pengelolaan sumber daya manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dari setiap orang yang bekerja di lembaga pengadilan.

Dalam hal ini perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap pakai memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK.

Saat ini, beberapa Fakultas Syariah dan Hukum telah menyelenggarakan kerjasama pendidikan S2 ataupun S3 dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan maupun KPK. Peningkatan kapasitas penegak hukum juga bisa dilakukan melalui *continuing legal education* serta *in house training* untuk berbagai bidang yang dibutuhkan oleh masing-masing institusi penegak hukum. Sebagai contoh pemberian penyegaran atau pengenalan tentang hukum Indonesia, hukum pidana, hukum acara pidana bagi pegawai-pegawai baru KPK. Di tingkat pemerintah daerah juga dilakukan training serupa bagi penyidik pegawai negeri sipil Pemda.

Peranan dalam mendidik baik dalam pendidikan bergelar maupun pendidikan tambahan (*non gelar*), Fakultas Syariah dan Hukum dapat berperan dengan melakukan riset-riset yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Banyaknya masalah hukum memerlukan riset-riset yang hasilnya diperlukan bagi lembaga penegakan hukum untuk proses pengambilan keputusan.

Riset-riset hukum dalam klinik hukum dapat dihasilkan bila klinik mampu menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum atau pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan tertentu di bidang hukum, Fakultas Syariah dan Hukum juga dapat melakukan riset murni yang dilakukan sendiri misalnya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk suatu peraturan di suatu daerah. Hal ini bisa dilakukan baik oleh dosen melalui hibah riset yang diperjuangkannya, oleh mahasiswa melalui penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, atau disertasi.

Di samping melalui pendidikan serta riset, peranan Fakultas Syariah dan Hukum untuk penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui penulisan ilmiah melalui jurnal serta pembahasan di forum-forum ilmiah. Demikian pula penulisan di jurnal-jurnal memiliki peranan yang tidak dapat diremehkan dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk berkiprah dalam penegakan hukum.

B. Konsep dan Teori Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum – dengan segala bentuknya – juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).²⁵

²⁵ Didi Kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung djati Bandung, Tahun 2009, hlm. 40-42.

Kemudian dalam praktik penegakan hukum di pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacara atau advokat. Dalam bahasa Inggris, advokat merupakan kata benda (*noun*), yakni "orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan" yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.²⁶

Hingga saat ini masih berkembang kesan paradoks di masyarakat bahwa kalangan advokat atau pengacara memiliki standar ganda. Di satu sisi ia berperan membantu pemberian jasa hukum cuma-cuma kepada para kliennya yang tidak mampu, tetapi di sisi lain ia diasumsikan sebagai pihak yang paling berperan dalam memutarbalikan fakta dan dianggap tidak memiliki hati nurani karena suka menukar kebenaran dengan kebathilan hingga muncul adagium "maju tak gentar membela yang bayar". Sudah barang tentu ini perlu dilacak kebenarannya dari pemaknaan definisi bantuan hukum hubungannya dengan profesi advokat atau pengacara dan proses penegakan hukum.

Demikian pula dalam sejarah hukum Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal services*) tampaknya belum begitu banyak dijelaskan, tetapi untuk mempermudah dan rumusan definisinya dapat dilacak dari asal-

²⁶ Sunsun Saeful Hakim menjelaskan dalam kata pengantarnya bahwa "profesi advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme, sehingga dijuluki sebagai *officium nobile* (profesi mulia). Karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta menegakan keadilan dan hak asasi manusia. Di samping itu, ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, order klien, dan tidak pilih kasih siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya". Lihat dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 5-7.

usul munculnya ide bantuan hukum itu sendiri. Misalnya saja, ia disinyalir berasal dari tradisi hukum Barat ketika para pemikir hukum Eropa pada awal fase pencerahan (*the enlightenment age*) banyak mengemukakan gagasan ajaran demokrasi dan kebebasan.

Menurut para ahli hukum, gagasan bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Bahkan seiring dengan kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (*human rights*) pada abad ke-17 M di Eropa, bantuan hukum lebih dari sekedar ide atau cita-cita ideal untuk mendapatkan keadilan, tetapi secara simultan ia telah berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin hingga kemudian berkembang menjadi suatu institusi bantuan hukum.²⁷

Negara Indonesia merupakan negara hukum konstitsional sebagaimana telah dimuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945. Sebagai prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan di muka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*).²⁸

Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang muncul sejak zaman Yunani Kuno dan semakin berkembang pesat sekitar abad ke-19 M di Eropa bersamaan dengan kelahiran konsep negara konstitusional dan demokrasi.²⁹ Secara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang

²⁷ Lihat Anonymous, *Conception of the Natural Rights of Thomas Hobbes* dalam Peter Jones, *Rights*, (Palgrave: Macmillan, 1994), hlm. 73 dan Jonathan Wallace *Natural Rights Don't Exist: The Ethical Spectacle* (2000-2004) dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right diakses tanggal 18 September 2016.

²⁸ Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI, 1980), hlm.1.

²⁹ Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno, seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia

penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahannya didasarkan atas hukum.³⁰ Di negara-negara yang berdasarkan atas hukum, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³¹

Di samping itu, konsep negara hukum yang dikembangkan dari konsep sistem hukum Eropa Kontinental lebih banyak dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), menurut konsep *socialist legality*, dan di Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Namun khusus dalam konteks Indonesia, istilah negara hukum sering diterjemahkan dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus inter pares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati

tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Namun dalam *Nomoi*, Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato ditulis dalam buku *Politica*. Plato banyak mengemukakan penjelasan tentang konsep *nomoi* sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Menurut Plato, pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum. Lihat dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 36-37.

³⁰ Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Lock, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Lihat O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 21.

³¹ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagium yang begitu populer dari Lord Acton,³² *Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (setiap manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute*) pasti akan disalahgunakan).

Model negara hukum seperti ini menurut catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan sering disebut “pemerintah berdasarkan kontitusi” (*constitutional government*). Meskipun tidak semua negara konstitusional diilhami semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu diatur melalui konstitusi terlepas dari falsafah negara yang bersangkutan.

Saat ini, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, dalam abad ke XX hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “Negara Berdasar Atas Hukum”. Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Demikian pula Burkens, telah mengemukakan bahwa pengertian *rechtsstaat*, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penye-

³² Pandangan Lord Acton yang dikutip oleh Kusnu Goesniadhie S., *Konsep Negara Hukum*, petikan artikel yang dipublikasikan dalam <http://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/perkembangan-konsep-negara-hukum/> diakses tanggal 12 Agustus 2012.

lenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.³³

Pendapat paling mutakhir menjelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun duabelas prinsip tersebut adalah: (a) supermasi hukum (*supremacy of law*); (b) persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (c) asas legalitas (*due process of law*); (d) pembatasan kekuasaan; (e) organ-organ eksekutif independen; (f) peradilan bebas dan tidak memihak; (g) peradilan tata usaha negara; (h) peradilan tata negara (*constitutional court*); (i) peradilan hak asasi manusia; (j) bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); (k) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*); dan (l) transparansi dan kontrol sosial.³⁴

Karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*), yang mana ditujukan untuk menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara.

Amandemen II UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem penyelenggaraan negara khususnya sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat

³³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 2-3.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 14-15.

guna.³⁵ Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga sering terdapat kebutuhan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Kendati pengaturan hal teknis dalam suatu peraturan menjadi kebutuhan terkadang tidak mampu diakomodasi dari pendelegasian wewenang tentang bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendelegasian wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga harus jelas karena pendelegasian wewenang mengenai bantuan hukum tersebut tidak dapat hanya berupa delegasi blanko yang memungkinkan eksekutif membuat berbagai peraturan dengan dalih sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa melihat dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan, politik, kaya miskin, agama atau kelompok orang yang dibelanya.

Sifat non diskriminatif dalam konsep bantuan hukum mengandung pengertian bahwa ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih penasihat hukum untuk membela kepentingannya, demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seseorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari Lembaga Bantuan Hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.³⁶

Seperti telah dijelaskan dalam definisi awalnya, bantuan hukum atau *legal aid* merupakan jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 21.

³⁶ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), lm. 2.

non-litigasi dan ataupun litigasi secara adil, maka oleh karena itu untuk setiap tindakan hukum yang dituduhkan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan pemenuhan hak-haknya dalam memperoleh kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.³⁷

Konsep bantuan hukum (*legal aid*) tersebut merujuk pada pengertian *state subsidized*, yaitu pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara³⁸. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) yang pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Dua (*World War II*) berakhir, pemerintah Inggris membentuk *The Rushcliff Committee* dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales.³⁹ Berdasarkan laporan dari *The Rushcliff Committee* telah merekomendasikan, diantara rekomendasi bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara. Sedangkan, di Amerika Serikat awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun 1964. Pemerintah Inggris membentuk lembaga *The Office Economic Opportunity (OEO)* diantaranya bertujuan untuk membiayai bantuan hukum melalui *judicare system*, yaitu Advokat atau Bar Association menyediakan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum untuk masyarakat miskin, kemudian jasa konsultasi dan bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara.⁴⁰

Konsep *legal aid* ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah

³⁷ Frans Hendra Winarta, *opt., cit.*, hlm 1.

³⁸ Editor, *Legal Aid in england, Wales Entering the Endgame*. dalam International Legal Aid Group, diakses pada 24 Agustus 2016.

³⁹ Kini layanan bantuan hukum dilakukan melalui sistem “*Staff Artoney*”, “*Judicare*” dan “*The Community Legal Clinic*”, yang dikelola oleh Legal Services Corporation (CLS) Board yang didirikan dibawah LSC Act, 1974, baca lebih lanjut Alan W Houseman dan Linda E Perle, *A Brief History of Civil Legal Assistance in the United State, Center for Law and Social Policy*, 2007

⁴⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.⁴¹ Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dibidang sosial politik dan hukum. Di samping sebagai perkembangan konsep negara kesejahteraan, pemenuhan hak bantuan hukum telah diterima secara universal, dan telah dijamin diantaranya dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *United Nation on Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, *United Nation Universal Declaration on the Rights of Dissabled Persons*, dan *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai *non derogable rights*, yang mewajibkan negara pihak untuk memenuhi hak-hak yang terdapat didalamnya, termasuk hak atas bantuan hukum. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dirancang sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut:

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.⁴²

⁴¹ Asfinawati. “Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada”. (Jakarta: Jurnal Jentera. 2009), hlm. 90-91.

⁴² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia telah menghasilkan *Naskah Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* Tahun 2009 yang diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang yaitu “Indonesia Adil”. Akses keadilan dalam konteks Indonesia diartikan sebagai:

Keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal mau-pun nonformal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri⁴³.

Dalam kata pengantarnya, Ketua Bappenas pada saat itu, menyatakan bahwa Indonesia memiliki keterikatan secara politis dan moral terhadap beberapa kesepakatan internasional seperti Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau *MDGs*). Salah satu tujuan MDGs adalah pengentasan kemiskinan yang memerlukan strategi baru yang mengakomodasi aspek pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan sosial⁴⁴. Definisi ini juga menggarisbawahi pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia, hukum pidana, maupun perdata.

Definisi ini juga menggarisbawahi pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia, hukum

⁴³ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 5

⁴⁴ *Ibid.*

pidana, maupun perdata. Dari keseluruhan isi dokumen tersebut, telah menjadikan “orang miskin dan terpinggirkan” sebagai subyek utama atau prioritas untuk mendapatkan akses kepada keadilan. Rumusan kemiskinan berbasis hak membawa implikasi antara lain: (a) adanya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin; sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut merupakan pelanggaran oleh negara; dan (b) kemiskinan tidak hanya mencakup pendapatan, melainkan juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin.

Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok masyarakat miskin mencakup pula persoalan orang atau kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan⁴⁵. Dalam Strategi Nasional Akses Keadilan tersebut ditekankan pentingnya akses keadilan kepada kelompok-kelompok rentan yaitu perempuan, tenaga kerja dan anak.

Untuk memenuhi hak akses kepada keadilan terdapat 8 (delapan) strategi yang ditawarkan⁴⁶ diantaranya *Strategi Akses terhadap Keadilan dalam pada Bidang Bantuan Hukum*. Kedelapan strategi tersebut harus saling terintegrasi dan memiliki fungsi yang sama pentingnya. Bidang bantuan hukum tidak dapat menegasikan keadilan di bidang sumber daya alam, tenaga kerja, perempuan, anak maupun reformasi peradilan. Demikian halnya dengan pendekatan berbasis HAM, bidang bantuan hukum tidak dapat

⁴⁵ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 53-58.

⁴⁶ Dalam *Strategi Nasional Akses Keadilan* disebutkan 8 strategi yang ditawarkan yaitu (1) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan; (2) Strategi Akses terhadap Keadilan dalam pada Bidang Bantuan Hukum; (3) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (4) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam; (5) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan; (6) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Anak; (7) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Tenaga Kerja; dan (8) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

menegaskan hak-hak dasar yang telah diakui dalam berbagai peraturan maupun konvensi internasional. Untuk strategi akses keadilan dalam bidang bantuan hukum, dirumuskan sebagai berikut:⁴⁷

Pertama, pemenuhan hak bantuan hukum, melalui (a) pemenuhan hak bantuan hukum bagi setiap orang miskin dan terpinggirkan; (b) Mewujudkan persamaan di muka hukum; (c) Mewujudkan sistem peradilan yang fair dan efektif; (d) Mempromosikan peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan (e) Menyelesaikan masalah hukum lebih cepat dan mencegah konflik. *Kedua*, perencanaan legislasi bantuan hukum melalui penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup (a) pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum; (b) pengembangan kapasitas kelembagaan dan sdm; (c) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat; (d) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum; dan (e) pemberian *reward* bagi pengabdian bantuan hukum.⁴⁸

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa dengan dilegislasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka payung hukum untuk diselenggarakannya Klinik Bantuan Hukum Universitas menjadi telah sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan salah satu implementasi dari Strategi Nasional Akses Keadilan, dan sekaligus menjadi salah satu elemen yang dapat memenuhi peran tersebut adalah LKBH Kampus.⁴⁹

⁴⁷ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 53-58.

⁴⁸ Instilah generik LKBH Kampus dihasilkan dalam pelatihan management LKBH Kampus, ILRC, 2009 untuk menyebut berbagai sebutan yang berbeda di setiap fakultas hukum seperti UKBH, LKBH, PKBH, dan sebagainya.

⁴⁹ Bapennas, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hal. 53-58

2. Dasar dan Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan tugas dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut pencerminan asas equality before the law yang telah dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Right*⁵⁰ dan *International Convernant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada Pasal 16 dan Pasal 26 dapat dirujuk sebagai dasar normatif perlindungan atas hak memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi. Kemudian diperkuat pula dengan Pasal 13 ayat (3) ICCPR mengenai syarat pemberian bantuan hukum, yaitu harus berorientasi kepada keadilan dan ketidak mampuan membayar Advokat,⁵¹ *Basic Principles on the Role of Lawyers*,⁵² dan juga terdapat pada UUD 1945.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa *segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya depan hukum, fakir miskin memiliki hak konstitusi untuk diwakili dan dibela oleh Advokat atau pembela umum secara litigasi dan*

⁵⁰ *Universal Declaration of Human Right* (1948) tidak menciptakan hak-hak asasi, tetapi hanya memaklulkannya, meliputi: a. manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dimana tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. b. manusia mempunyai hak-hak kebebasan sosial, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan. Manusia mempunyai hak-hak kebebasan sipil dan politik dalam menentukan pemerintahan dan policy pemerintahan tersebut. Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hal.112.

⁵¹ Mohammad Mahfud MD., Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 728.

⁵² Syafruddin Kalo, *Kuliah Hukum Pidana Pascasarjana USU*, Rabu, 23 Oktober 2013 dalam Uli Parulian Sihombing, *Pendidikan Hukum Klinis*, (Jakarta : *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, 2014), hlm. 44.

*non-litigasi (bantuan hukum) sama seperti orang yang mampu mendapatkan jasa hukum Advokat (legal service).*⁵³

Setiap orang memiliki hak-hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang adil dengan persamaan dihadapan hukum, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula mendapatkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁵⁴ Jaminan bagi setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection before the law* dan asas *equal justice under the law* yang dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Negara menjamin pula hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 i ayat (1).

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya prinsip ini berarti negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*) sama seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Jadi bantuan hukum

⁵³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 27.

⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *opt., cit.*, hlm. 29.

adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil, bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang belum mengerti dan kurang menghayati nilai-nilai yang tersirat dalam UUD 1945, yaitu banyak oknum aparat pemerintah yang merasa dirinya identik dengan negara dimana kepentingan pemerintah adalah kepentingan negara.

Fakta hukum tersebut di atas tentu saja sangat menyedihkan, karena kepentingan pemerintah belum tentu kepentingan negara, pemerintah hanya salah satu dari kompleksitas lembaga-lembaga dalam negara. Sub sistem penegak hukum polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan dan penyedia bantuan hukum seharusnya dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama yaitu antara lain menciptakan peradilan yang adil, mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi para pelaku kejahatan serta mengembalikan pelaku kejahatan yang telah menjalani pidana tersebut kembali ke lingkungan masyarakat secara normal.

Hukuman sebagai “pembalasan” sudah tidak dianut lagi dalam sistem peradilan yang modern karena adanya prinsip menjunjung hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut *due process of law* atau proses peradilan pidana yang adil. Pada *due process of law*, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana harus dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*), karena hal tersebut merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Namun dalam implementasinya adakalanya terjadi *crime control model* atau *arbitrary process* yakni proses penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Proses yang sewenang-wenang ini terjadi ketika tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya, serta hak mendapatkan kebenaran yang dimilikinya. Kesewenang-wenangan dalam proses peradilan bisa terjadi karena penegak hukum terbiasa mempraktikkan penyelidikan dan penyidikan menurut *crime control model*, seperti adanya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta sikap merendahkan harkat dan martabat (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*) dalam kasus pidana yang berbeda dengan yang dianut dalam kasus perdata seperti diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pendapat peneliti, UU HAM ini dilegislasikan dengan tujuan agar negara menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya. Hal ini dapat dilihat di dalam penjelasan UU HAM tersebut yang secara substansu menyatakan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* dan baru disahkan setelah hadirnya Undang-Undang ini. Saat ini masih ada sejumlah kendala dalam implementasi perundang-undangan tersebut seperti yang pernah terjadi sebelum ketika lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni tidak adanya jaminan di dalam UUD 1945 dan di dalam KUHAP bagi orang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu untuk membayar atau memperoleh pembelaan. Meskipun Undang-Undang Advokat telah mengakui konsep bantuan hukum, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara mendalam.

Kemudian dilihat dari segi tujuannya, bantuan hukum berfungsi dalam proses penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan bantuan hukum diperlukan perangkat peraturan atau regulasi, berupa UU Bantuan Hukum. Peneliti berpendapat bahwa hal paling penting yang harus dilakukan oleh

pemerintah adalah memperkuat pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) yang di dalamnya memuat 4 (empat) prinsip: *pertama*, Indonesia adalah negara hukum; *kedua*, setiap orang berhak memperoleh peradilan yang *fair* dan *impartial* sebagai perwujudan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; *ketiga*, keadilan harus dapat diakses semua warga negara (*justice for all people or justice is accessible for all*); *keempat*, perwujudan dari negara demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa istilah teknis yang erat kaitannya dengan istilah bantuan hukum, antara lain:⁵⁵

a. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Aid*

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.⁵⁶

b. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Assistance*

Legal Assistance ialah pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh masyarakat Advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu”.⁵⁷ Pada *legal assistance* yang mengandung pengertian yang lebih luas dari Legal ai, karena disamping menggunakan dan tujuan memberikan jasa bantuan hukum yang lebih tepat dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi advokat yang memberi bantuan hukum kepada yang mampu dan kepada rakyat miskin.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003), hlm. 344.

⁵⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1.

⁵⁷ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986), hlm. 3.

c. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Service*

Jika dihubungkan dengan masalah litigasi pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat diterima sebagai pelayanan hukum, apabila bantuan hukum tersebut berhubungan dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat mampu dan tidak mampu. Selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

3. Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum

Munculnya lembaga-lembaga bantuan hukum di negara-negara berkembang dalam dekade terakhir ini sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut. Gambaran yang segera nampak bahwa hukum dalam batas tertentu belum memihak kepada kepentingan rakyat dan situasi ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak mampu menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Karena *stereotype* hukum yang demikian di mana hukum belum memihak kepentingan rakyat, maka selalu ada konflik antara pembuat hukum di satu pihak dengan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum di lain pihak. Ketegangan antara pembuat hukum dan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum tersebut telah melahirkan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga bantuan hukum.⁵⁸

Karena Indonesia termasuk salah satu dari negara berkembang yang kondisinya kurang lebih sama dengan negara-negara berkembang lainnya di

⁵⁸ Paul S. Baut, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1980), hlm. 7.

Asia, maka munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia selain memberlakukan hukum adat dari masing-masing daerah yang oleh Van Vollen Hoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum Adat, juga memberlakukan hukum import, yaitu hukum penjajahan Hindia Belanda atas negeri jajahannya.

Dalam hukum adat tidak di kenal apa yang disebut “Lembaga Bantuan Hukum”. Hal tersebut dapat dimengerti karena dalam hukum adat tidak dikenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dalam hukum adat kebanyakan diselesaikan lewat pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai kharisma khusus.⁵⁹

Pada saat zaman penjajahan Belanda Tanggal 1 Mei 1843 telah disahkan *Inlandsch Reglemen (I.R.)* sebagai hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi golongan Bumiputra, sedangkan untuk golongan Eropa berlaku hukum acara pidana *Reglement op de Rechtsvordering*. Pengadilan sehari-hari untuk orang-orang Bumiputra adalah *landraad* dan pengadilan sehari-hari untuk golongan Eropa adalah *Raad van Justitie*. Peraturan hukum di masa ini juga sudah muncul *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* 1848 (RO) yang mengatur mengenai susunan pengadilan. IR yang disusun oleh Mr. H.L. Wichers ini dalam perkembangannya terus mengalami perubahan.⁶⁰

Indonesia baru mulai mengenal “bantuan hukum” sebagai pranata hukum tatkala Indonesia mulai memberlakukan hukum barat yang bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terdapat perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja, tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundangan baru di negeri Belanda

⁵⁹ Lihat Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, Bandung, 1983), hlm. 40.

⁶⁰ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990), hlm. 25-26.

juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Peradilan (*Reglement op de rechterlijke Organisatie et het beleid der justitie*) yang lazim dikenal dengan singkatan R.O (Stb, 1847-23 jo 1848-58).⁶¹

Tahun 1900-an di zaman penjajahan Belanda, pembaharuan hukum siap dilaksanakan. Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia Belanda menuntut dilengkapinya dengan baik masyarakat Belanda dan Indonesia dengan lembaga-lembaga yang memainkan peranan yang ditentukan sebelumnya dengan pihak Indonesia yang tetap harus disiapkan menempati derajat yang lebih rendah dibandingkan Belanda. Hal ini berarti ada dua birokrasi yakni yang satu merupakan pihak bawahan dan yang lain sebagai pihak atasan. Termasuk juga adanya dua sistem peradilan yang hubungannya serupa.⁶²

Terdapat perbedaan serupa di bidang peradilan bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hoogrechtshof*) di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang terakhir itu adalah para ahli hukum yang terlatih yang semakin dipererat kaitannya dengan *rechtsstaat* negeri induknya melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun temurun, gaya, dan ilmu hukum.

Wewenang pengadilan di Eropa ini diperluas untuk mengadili semua perselisihan dagang eksternal dan sebagian besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. *Raad van Justitie* yang pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia. Dari *Raad van*

⁶¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hlm. 28.

⁶² *Ibid.*

Justitie pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada *Hof* (Mahkamah Agung).

Misalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk golongan Belanda (*Openbar Ministerie*) yang dikepalai oleh *Procureur-Generaal* di Batavia (Jakarta), yang juga membawahi polisi kolonial. Hanya saja *Landgerecht*-lah yang dibentuk pada tahun 1914, yang memiliki wewenang umum atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya memeriksa pelanggaran dan perbuatan pidana ringan, tidak lebih dari sekedar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, *landgerecht* tidak banyak berarti.

Seperti banyak ditulis para sejarawan hukum, saat itu kebanyakan hakim dan semua notaris, serta para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan tahun 1920-an. Bagi orang Indonesia, cukup disediakan satu kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yang menetapkan acara-acara pengadilan *pangreh praja*⁶³ maupun *landraad*⁶⁴ dan pengadilan-pengadilan lain yang lebih rendah. Kitab undang-undang ini adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. HIR kurang kompleks dan kurang terinci dari pada kitab undang-undang untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran orang Indonesia yang lebih sederhana. Dalam HIR juga dimuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit.⁶⁵

Karena hukum acara yang dipakai adalah HIR, maka kesulitan-kesulitan yang muncul adalah banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang

⁶³ *Pangreh praja* atau *Inlandsch Bestuur* adalah salah satu dari dua bentuk birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda, di samping *Binnenlands Bestuur*. *Inlands Bestuur* merupakan birokrasi pelaksana pemerintahan kolonial Belanda di daerah (birokrasi pada wilayah kekuasaan orang bumi putera) dan dapat pula merupakan kolaborasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan bumi putera daerah setempat.

⁶⁴ *Landraad* adalah istilah yang berarti Pengadilan Negeri Hindia Belanda. Istilah *landraad* sempat aktif dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, karena Belanda memang pernah aktif di nusantara.

⁶⁵ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 44.

menjamin bantuan hukum tidak ikut diwarisi dalam ketentuan HIR (lihat Pasal 250 HIR) yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Tentu saja ini dirasa tidak adil oleh golongan Bumi Putera. Kesulitan-kesulitan lain yang muncul adalah masih langkanya Advokat atau dengan kata lain jumlah Advokat yang praktek relatif sedikit, sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan adalah para Pokrol.⁶⁶

Pada tahun 1927, pokrol-pokrol membuat organisasi bernama Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI). Yang menggembirakan adalah meskipun jumlah Advokat orang Indonesia relatif sedikit, namun sebagian besar mereka adalah orang-orang pergerakan. Dilihat dari sudut ini tentu saja sangat menguntungkan karena kualitas pembelaan mereka. Pada saat inilah dapat dikatakan awal lahirnya bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu. Hal ini mudah dipahami oleh karena pada waktu itu bangsa Indonesia tidak mampu membayar Advokat-Advokat Belanda yang mahal.

Pada masa zaman penjajahan Jepang perubahan sistem hukum tidak ada yang berubah tetapi untuk Golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgelijk Wetboek* (B.W.) dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia Asli diberlakukan hukum Adat. Bagi golongan lainnya berlaku hukum yang diberlakukan bagi mereka menurut aturan terdahulu. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) tetap diberlakukan selain adanya peraturan-peraturan pidana lainnya yang dibuat oleh Pemerintahan Penjajah Jepang. Peraturan-peraturan tersebut selain *Osamu Gunrei* Nomor 1 Tahun 1942 dan Undang-Undang Nomor Istimewa Tahun 1942 termasuk pula di dalamnya *Osamu Seire* Nomor 25 Tahun 1944 Tentang *Gunzei Keizirei*. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku, namun aturan

⁶⁶ Frans J. Rengka, *Tesis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hlm. 27.

W.v.S dinyatakan tetap berlaku dan daerah hukumnya meliputi Jawa dan Madura.⁶⁷

Orang-orang Jepang yang ada di Indonesia tetap diberlakukan Undang-Undang dan peraturannya sendiri, sehingga pengusutan, penuntutan, dan pengadilannya dilakukan oleh opsir-opsir Jepang. Semenjak pemerintahan bala tentara Jepang dijalankan di Indonesia, maka perkara perdata dan pidana untuk mengadili penduduk sipil diadili oleh *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara). Di samping keberadaan badan-badan pengadilan tersebut, diadakan pula *Kensatu Kyoku* (Kejaksaan) dengan wewenang seperti sebelumnya. Jaksa berada langsung di bawah *Saiko Kensatu Kyoku Tyo* dan sesudah dihapuskannya *Saikoo Hooiin* (Peradilan Agung) lalu ada di bawah *Kootoo Kensatu Tyo*. Sedangkan untuk pengawasan terhadap lembaga peradilan dan hakim dilakukan oleh *Sihoobutyo* (Kepala Departemen Kehakiman). Dalam *Sihoobu* (Departemen Kehakiman) ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu *Syomuka* (Perkara Umum), *Minzika* (Perkara Perdata) dan *Keizika* (Perkara Pidana).⁶⁸

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1942, Pemerintahan Penjajah Jepang menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1942 tentang *Gunseirei* atau Undang-Undang dan Peraturan untuk Menjalankan Pemerintahan Balatentara di Jawa (*Osamu Seirei*) yang diumumkan oleh *Gunsireikan* (Panglima Besar Tentara Jepang) berlaku pada masa ini. Sehubungan dengan undang-undang ini, maka dikeluarkanlah peraturan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan yaitu: *Osamu Seire* yang mengatur tentang segala hal untuk menjalankan pemerintahan Belantara di Jawa. *Osamu Kanrei* adalah peraturan untuk menjalankan *Osamu Seire* dan mengatur segala hal

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Frans J. Rengka, *Tesis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hal. 6.

yang perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ada lima lingkungan peradilan yang dikenal pada masa itu, antara lain: *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara), *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooiin* (Peradilan Agung), dan Peradilan Swapraja serta Peradilan Adat. Di samping lingkungan-lingkungan peradilan tersebut, juga terdapat pula *Keizei Hooiin* (Hakim Kepolisian).

Mengutip penjelasan Binziad Kadafi,⁶⁹ keberadaan UU Advokat dan praktik bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari transplantasi praktik hukum acara pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sebut saja, sejak tahun 1800 hingga 1930-an diberlakukan tiga jenis hukum acara yang menjadi dasar bagi praktik bantuan hukum di Indonesia. Misalnya, *Herziene Indonesiech Reglement (HIR)* merupakan hukum acara bagi masyarakat pribumi yang belum menggaransi adanya bantuan hukum.

Kadafi menjelaskan bahwa HIR dipandang lebih sederhana karena mengabaikan hak-hak hukum masyarakat pribumi yang dianggap buta hukum oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, dalam HIR seolah-olah hakim tidak hanya berwenang mengadili, tetapi juga dapat membuat surat dakwaan yang mestinya dibuat oleh jaksa dan berita acara pemeriksaan yang mestinya dibuat oleh panitera. Dalam konteks ini, nyaris tidak tampak adanya peran advokat dalam proses penegakan hukum di pengadilan pribumi (*landraad*).

Sedangkan *Reglement op de Strafvordering (RS)* dan *Reglement op de Rechtvordering (RS)* merupakan hukum acara yang diperuntukan bagi masyarakat Eropa yang dianggap cerdas dan mengerti hukum. Sehingga dibuatlah *Reglement op de Rechterlijk Organisatie (RO)* sebagai ketentuan turunan untuk memberikan payung advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat Eropa di pengadilan Hindia Belanda (*Raad van Justitie*). Dalam

⁶⁹ Binziad Kadafi, "RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia", kutipan artikel dari *Jurnal Online Pemantau Peradilan* (Jakarta: MAPPI-UI, t.th) yang dipublikasikan dalam <http://www.pemantauperadilan.com> diakses 28 September 2016.

ketiga ketentuan itu, dimuat hak-hak hukum bagi masyarakat Eropa sebagai bentuk pengakuan hak hukum atas mereka untuk mendapatkan pembelaan hukum. Selebihnya politik hukum lebih diskriminatif diberikan kepada masyarakat pribumi dalam bentuk nasihat hukum (*pokrol bambu*) sebagaimana diatur dalam Stbl. 1927 No. 496.

Dalam perkembangannya, setelah memasuki masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan bantuan hukum. Peraturan Perundang-undangan tersebut, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan perubahan-perubahan dan tambahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indie* yang kemudian dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), yang selanjutnya berlaku pula “Penetapan Raja” tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 Juncto 486 Tentang Peraturan Cara Melakukan/Menjalankan Hukuman Dengan Syarat.

Pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditetapkan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya boleh menyelidiki segala surat sebelum permulaan pemeriksaan itu. Aturan-aturan tersebut sekadar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan Tinggi bagi advokat dan *Procureur* yang berpraktik di dalam daerah Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat 4, Pasal 5 ayat 3, dan Pasal 6 ayat 2 juga bisa dilihat mengenai ketentuan lainnya mengenai bantuan hukum.

Adapun pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan dan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintahkan memberikan bantuan hukum ini ditetapkan dengan Undang-undang (*Staatsblad* 1926 Nomor 487). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura mulai berlaku sejak 24 Juni 1947. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura hanya menyebutkan bahwa *Peminta atau Wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu Pembela atau Penasihat Hukum.*

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950 yang mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah “Pemberi Bantuan Hukum” dengan kata “Pembela”. Istilah “Pemberi Bantuan Hukum” juga bisa dilihat dalam Pasal 113 ayat 1, Pasal 122 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung. Pengawasan tertinggi pada masa ini juga dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara/notaris, hal ini diatur dalam Pasal 133 yang menyatakan bahwa *Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang ini mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-undang darurat ini menentukan kembali berlakunya HIR dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara

pidana sipil. Dalam perkembangannya tuntutan perubahan hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan politik hukum Orde Lama. Pada fase ini terjadi sejumlah perubahan kebijakan politik hukum mulai dari perubahan konstitusi UUD 1945, UUD Sementara 1950, dan UU Darurat Perang hingga kembali lagi ke UUD 1945.

Perkembangan regulasi yang paling fenomenal adalah terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Jalannya Kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memperkenalkan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum di pengadilan, terutama dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Namun regulasi tersebut dimentahkan oleh regulasi setelahnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi memiliki kewenangan untuk mengintervensi pengadilan. Implikasinya eksistensi bantuan hukum menjadi *bias*, jika semula ditujukan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum, tetapi kemudian menjadi mentah dan hanya menjadi simbol otorisasi kekuasaan pengadilan saja.

Dalam perkembangan berikutnya dilaksanakanlah Kongres Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN) pertama yang mengamanatkan praktik bantuan hukum harus tetap berjalan meskipun tanpa payung hukum yang pasti. Hal ini direspon pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol menjadi "acuan awal" adanya regulasi advokat dan bantuan hukum di Indonesia.⁷⁰

⁷⁰ Adnan buyung nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981, hlm 126.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru ketika di era tahun 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk.⁷¹ Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia LBH Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu.⁷² Hingga tak pelak pendirian lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi atau wadah bantuan hukum di Indonesia seperti PERADIN, LBH, PBHI, APSI, dan sebagainya.⁷³

Kemudian memasuki fase tahun 1970-an, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam Pasal 38 UU itu, diamanatkan perlunya regulasi khusus yang mengatur tentang bantuan hukum.⁷⁴ Hal ditindaklanjuti dengan Kongres PERADIN yang kedua di Jawa Tengah yang lebih nyaring menyuarakan kepada pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat sebagai payung hukum bagi bantuan hukum di Indonesia.⁷⁵

Seorang peneliti asing, Daniel S. Lev⁷⁶ mencatat pada awal tahun 1980-an terdapat hampir seratus organisasi yang terlibat dalam bantuan hukum dalam beragam macam jenisnya. Perjuangan para pembela hukum tidak sepenuhnya berhasil karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁷¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3S, 1986) hlm 146.

⁷² Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press,, 1983) hlm 17-18.

⁷³ Todung Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia: Sebuah Studi Awal" dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1992) hlm 5.

⁷⁴ Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat* (Bandung: Alumni, 1979) hlm. 41.

⁷⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokasi Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PSHKI, 2001) hlm. 1-3.

⁷⁶ Daniel S. Lav, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1996) hlm. 495.

tentang KUHAP sebagiannya memuat materi hukum yang membatasi peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Misalnya, dalam KUHAP disebutkan tentang adanya batasan-batasan hak advokat (penasehat hukum) untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu dalam rangka pembelaan perkara, serta hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki.

Dalam perkembangannya, peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum semakin dikebiri oleh pemerintah terutama setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), di mana MA memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap peran organisasi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, seolah-olah MA menjadi perpanjangan tangan pemerintah Orde Baru saat itu untuk membatasi ruang gerak organisasi advokat. Lebih dari itu, rezim Orde Baru juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara implisit memasukan organisasi advokat sebagai organisasi yang harus tunduk kepada kebijakan politik Orde Baru. Seperti halnya kewajiban mencatumkan asas tunggal Pancasila bagi ormas-ormas saat itu, peran organisasi advokat sebagai pembela keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan semakin meredup dan dikebiri.

Prosedur pengawasan lebih rinci juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, di mana pengawasan secara operasional terhadap advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum diperluas hingga pada tingkat penindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang muncul setelah keluar regulasi tersebut, seringkali terjadi bentrokan pendapat hukum antara advokat dengan hakim.

Misalnya perselisihan pendapat antara Adnan Buyung Nasution dengan hakim yang memeriksa dan memutus kasus H.R. Darsono. Kasus tersebut mendorong MA menerbitkan SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor: M.03.PR.08.85 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum, yang secara signifikan mereduksi kemandirian advokat dengan mensubordinatkan advokat berikut organisasinya ke dalam pengadilan dan pemerintah. Secara kasat mata, SKB tersebut telah menjadikan organisasi advokat sebagai *contempt of court* di Indonesia.⁷⁷

Berbagai peraturan dan perundangan yang berikutnya muncul relatif tidak membawa perubahan penting bagi perkembangan regulasi bantuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, hingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juga belum sepenuhnya menggaransi fungsi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Betapa tidak, dalam ketentuan yang paling akhir (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) secara implisit dan eksplisit diatur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan

⁷⁷ Binziad Kadafi, *op. cit.* hlm. 6.

hukum kepada masyarakat. Padahal jelas disebutkan dalam konstitusi (Pasal 28 dan 34 UUD 1945) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tak terkecuali bagi orang-orang miskin yang menjadi tanggung jawab negara.⁷⁸

Meskipun UU Advokat dan UU Bantuan Hukum tersebut bisa memberikan kepastian hukum bagi adanya bantuan hukum struktural, tetapi semakin berkembangnya wacana dan berbagai macam konsep bantuan hukum di Indonesia menjadi jawaban terhadap adanya kebutuhan rakyat terhadap hal tersebut. Sebagian besar rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih dibawah garis kemiskinan dan buta hukum mendorong tumbuhnya kesadaran disebagian kalangan yang *concern* mengenai hal ini untuk mencari formula yang ampuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

d. *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*

Mengenai tugas dan kewajiban advokat, *procureur*, dan para pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal dalam H.I.R diantaranya yakni:

Pasal 83 h ayat 6 yang menyebutkan bahwa:

Jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka jaksa menanyakan kepadanya, apakah ia berkehendak pada sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau, ahli hukum”. Ketentuan dalam pasal ini lebih sempit karena hanya terbatas pada kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati.

Pasal 120 Rsv menegaskan bahwa:

Tiap-tiap terdakwa berwenang untuk dibantu oleh seorang pembela di dalam pemeriksaan di muka hakim, jika terdakwa tidak mempunyai

⁷⁸ Suen Herief, "*Bantuan Hukum Suatu Keharusan*", artikel dalam <http://suenherief.wordpress.com/2008/07/15/bantuan-hukum-suatu-keharusan/>

pembela, maka atas permohonannya hakim dapat menunjuk seorang advokat atau *procureur* yang diperbantukan kepada *Raad van Justitie*”.

Pasal 250 Ayat 5 H.I.R menegaskan bahwa:

Bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat enam Pasal 83 h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang Sarjana Hukum atau seorang Ahli Hukum, maka untuk memberi bantuan itu ketua dalam surat ketetapannya menunjuk seorang anggota Pengadilan Negeri Ahli Hukum, atau seorang Pegawai Sarjana Hukum atau orang Ahli Hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu. Penunjukan itu masih dapat juga dilakukan dengan surat keputusan yang terasing selama pemeriksaan pada sidang belum selesai, jika tersangka menyatakan kehendak yang sedemikian itu juga.

Penunjukan tidak terjadi bila pada pengadilan negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain yang bersedia melakukan pekerjaan itu. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kemungkinan tertuduh untuk mendapatkan pembela yang ditunjuk oleh hakim atas permohonan terdakwa di muka *Raad van Justitie* atau Pengadilan Negeri terbatas kepada perkara yang boleh menyebabkan hukuman mati saja, sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.

Pasal 254 Ayat 1 H.I.R menyatakan bahwa:

Dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya”. Ketentuan ini menegaskan adanya hak-hak terdakwa untuk dibela perkaranya oleh seorang pembela pada sidang pengadilan.

Dalam Pasal 123 H.I.R terdapat penegasan bahwa:

Apabila dikehendaki oleh para pihak yang berperkara maka para pihak tersebut boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa kecuali orang yang memberi kuasa itu (ada) hadir tersendiri. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 26 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini menegaskan bahwa hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Mengacu kepada perkembangan regulasi di atas, tampak bahwa bantuan hukum pada zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan *procureur*. Pelaksanaan bantuan hukum tetap berdasarkan HIR. Bantuan Hukum pada masa ini masih belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu, yang ada hanya berbentuk organisasi sosial seperti “Tjandra Naya” di Jakarta dan fakultas-fakultas hukum negeri, serta biro-biro konsultasi hukum dalam bentuk yang sederhana.

Bantuan hukum pada masa ini, sangat terbatas, yang diberikan kepada golongan keturunan saja, *Clients Group*, ataupun terbatas pada pemberian nasihat hukum dan konsultasi hukum. Secara historis, pelopor advokat Indonesia yang sekaligus ikut serta sebagai perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia, pelopor dalam penegakan HAM dan cita-cita Negara Hukum Indonesia, diantaranya adalah Mr. Besar Mertokoesoemo, Mr. Soedjoedi, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sastroamidjojo, Mr. Sartono, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

Mereka semua adalah lulusan pertama advokat Indonesia yang menyelesaikan studinya di Universitas *Utrecht* dan *Leiden*. Biro Bantuan Hukum pada masa ini, Jur Andi Hamzah menyatakan bahwa, di fakultas-fakultas hukum telah didirikan Biro Bantuan Hukum yang dipelopori oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 1969. Biro Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai bantuan hukum bagi golongan rakyat miskin, kadang-kadang juga bisa sampai golongan menengah. Dosen-dosen atas izin Rektor masing-masing memberikan bantuan hukum sebagai pekerjaan sambilan.⁷⁹

⁷⁹ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 97.

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa setelah Indonesia telah mencapai pengakuan kedaulatannya pada tahun 1950, sehingga sampai dengan pertengahan tahun 1959 keadaan tidak banyak berubah. Memang pada saat itu pluralisme di bidang peradilan dihapuskan, sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Demikian pula, hanya ada satu hukum acara bagi penduduk yakni HIR. Sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru bukan yang lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan *Raad van Justitie* melainkan *Landraad*. Hukum acaranya bukan *Rechtsvordering* melainkan HIR yang sangat sedikit menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.⁸⁰

Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (Periode 1950-1959) periode pasca kemerdekaan harus diakui merupakan periode yang relatif lebih baik dalam hal pemenuhan hak atas bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya bahwa peradilan masih tinggi integritasnya. Para hakim, jaksa, dan advokat pada umumnya masih orang-orang yang sama dari periode kolonial yang terlatih dalam mengambil tempat dan peranannya masing-masing secara jujur dan *dedicated* untuk berfungsi proses hukum dan peradilan secara efektif.

Selain itu, karena berlakunya sistem politik demokrasi parlementer yang memungkinkan organ-organ yudikatif secara lebih bebas dan tidak berpihak. Kontrol masyarakat melalui parlemen relatif masih kuat, sehingga campur tangan kekuatan-kekuatan lainnya ke dalam lembaga yudikatif dapat dicegah. Oleh karena itu, Adnan Buyung Nasution⁸¹ berpendapat bahwa pada periode ini atau pada masa zaman kemerdekaan, pemberian bantuan

⁸⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hlm. 28.

⁸¹ *Ibid.*

hukum memang masih lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya, namun, bantuan hukum masih sangat sedikit diatur sebagai akibat diberlakukannya HIR.

Ia juga menyatakan bahwa dalam periode tahun 1959-1965 (Periode Orde Lama), akses bantuan hukum dan juga profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali. Peradilan pada masa ini tidak lagi bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim lebih berorientasi kepada pemerintah karena adanya tekanan-tekanan yang sangat politis dan represif.⁸²

Akibat dari kondisi di atas, pada masa akhir pemerintahan Orde Lama tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality*, sehingga dengan sendirinya kewibawaan pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Orang yang sedang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan profesi advokat yang sudah tidak berperan lagi. Orang-orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa, hakim itu sendiri atau jika ada jalan kepada orang kuat lainnya. Banyak advokat yang meninggalkan profesinya. Periode ini kiranya merupakan periode yang pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.

Periode 1965 keatas (periode orde baru), *independency* pengadilan mulai dijalankan, dan perhatian kepada hukum tumbuh kembali. Puncak dari usaha ini adalah dengan dicabutnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama dan digantikannya dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru. Melalui Undang-undang ini dijamin kembali kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, yang sebelumnya dilarang.

⁸² *Ibid.*

Selain itu, untuk pertama kalinya secara eksplisit juga diberikan jaminan atas adanya hak atas bantuan hukum, dalam satu bab khusus, terdapat ketentuan-ketentuan, bahwa seorang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Terdapat ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru merupakan sebuah reformasi yang baik dalam perkembangan bantuan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan dalam perkembangan bantuan hukum di Indonesia, sekitar tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan “BALIE” Jawa Tengah. Berkembang juga di daerah-daerah lain dan muncullah perkumpulan advokat seperti “Balai Advokat” di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Perkumpulan-perkumpulan ini belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat Indonesia.

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yakni semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta. Bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional 1 pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dan bertempat ruang dikafetaria Universitas Indonesia, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dinamakan Persatuan Advokat Indonesia (PAI).⁸³

Demikian pula dengan di daerah-daerah, perkembangan Lembaga Bantuan Hukum telah dibentuk organisasi P.A.I. pada pertengahan tahun 1963

⁸³ *Ibid.*

dan telah memiliki tujuh cabang di seluruh wilayah Indonesia, yang telah beranggotakan lebih kurang 150 advokat. Tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan kongres I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di hotel Dana Solo. Langkah berikutnya dalam pembentukan wadah organisasi advokat baru terealisasi pada pertemuan advokat se-Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Pada saat itulah diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang semula dikenal dengan istilah P.A.I. Para advokat berikhtiar untuk mempersatukan dirinya dalam suatu perkumpulan profesi yakni PERADIN berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan ketentuan acara penyelesaian pelanggaran kode etik advokat.⁸⁴

Berkaitan dengan bantuan hukum, sebagai realisasi dari ketentuan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar sejak 1 November 1969, yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 6 sub e dalam anggaran dasarnya, tentang bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu maka, oleh PERADIN dengan surat keputusannya 99 tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 telah dibentuk Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga pembelaan umum (*legal aid/public defender*) yang lebih dikenal dengan nama LBH. Proyek besar PERADIN pada masa itu adalah LBH Jakarta yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution penggerak LBH Jakarta yang didirikan pada tahun 1970.¹³³ Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa, program bantuan hukum di Indonesia yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta yaitu pada tanggal 28 Oktober 1970.⁸⁵

Muncul pernyataan dan kesepakatan pada masa ini bahwa PERADIN adalah satu-satunya organisasi dari para advokat Indonesia, namun, dalam perkembangannya PERADIN bukanlah satu-satunya organisasi advokat

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

sebagaimana yang ditelah disepakati terdahulu. Muncullah organisasi advokat lainnya yang dikenal dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang berdiri pada tanggal 10 November 1985. Para advokat tidak lagi tergabung dalam satu wadah organisasi advokat, dalam perkembangannya, muncul organisasi advokat lainnya seperti IKADIN. Begitu pula dalam perkembangan selanjutnya dan sampai saat ini terdapat berbagai organisasi advokat di Indonesia.

Konfrensi yang ketiga dari *Law in Asia* di Jakarta pada tanggal 16 sampai dengan 19 Juli menunjukkan adanya kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada fakir miskin hanyalah merupakan belas kasian tetapi bukan sebagai hak asasi manusia. Padahal hak untuk dibela oleh advokat (*access to legal counsel*) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk bagi kalangan fakir miskin atau *justice for all*.⁸⁶

Perihal bantuan hukum yang di dalamnya mengandung prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai perundang-undangan. Karenanya, bantuan hukum merupakan hak bagi orang atau kelompok orang miskin yang telah dilegitimasi baik dalam instrumen nasional maupun instrumen internasional. Instrumen nasional maupun instrumen internasional yang mengatur mengenai bantuan hukum, telah memberikan legitimasi serta pengakuan dan jaminan hak bantuan hukum yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Perkembangan yang paling penting pada masa ini yakni disahkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 yang telah membawa perubahan kearah pemberian bantuan hukum yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya, yakni pada masa berlakunya HIR. Berlakunya KUHAP menjadikan HIR sebagai landasan pemberian bantuan hukum terdahulu

⁸⁶ *Ibid.*

dicabut dan digantikan dengan KUHAP. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai seorang manusia.⁸⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengarah kepada kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk memberikan jaminan pemenuhan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang tertuang dalam Pasal 54 dan 56 KUHAP.⁸⁸

Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam HIR kini tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP menghilangkan pembatasan-pembatasan tersebut dengan memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tidak hanya terdakwa, tersangkapun berhak mendapatkan bantuan hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Ketentuan ini menunjukkan adanya reformasi hukum yang memberikan perlindungan, dan jaminan pemenuhan HAM berupa pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin.

Pengaturan untuk memberikan bantuan hukum yang diatur KUHAP tentu merupakan perkembangan hukum yang baik karena bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa *Sesungguhnya bantuan hukum itu adalah merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia*⁸⁹.

Pengaturan bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari masa ke masa. bantuan hukum untuk masyarakat dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu*. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah *Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian*

⁸⁹ *Ibid.*

konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang menyatakan bahwa *Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa lahirnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia bukan hanya berasal dari inisiatif negara, melainkan juga berasal dari kesadaran kolektif atas sesuatu yang timpang di masyarakat. Namun demikian, pemerintah Indonesia juga turut mendukung lahirnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum yang jumlahnya hingga saat ini sudah mencapai puluhan bahkan ratusan. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan karena hal itu berarti ada perkembangan

yang meningkat dalam bantuan hukum di Indonesia. Peranan Organisasi Bantuan hukum dapat memudahkan dan mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, dan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan pola memberikan pengetahuan, keterampilan dan memberikan sepenuhnya cara dan pilihan penyelesaian masalah kepada masyarakat miskin atau organisasi rakyat melalui program pendidikan dan pelatihan organisasi bantuan hukum.

4. Bentuk-bentuk Organisasi Bantuan Hukum

Keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum dilandasi oleh semangat institusionalisasi bantuan hukum. Institusionalisasi bantuan hukum dapat difahami dalam dua pengertian: *pertama*, ia merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan ide-ide dan gagasan-gagasan bagi pembentukan lembaga bantuan hukum; *kedua*, ia merupakan proses aktualisasi ide-ide atau gagasan-gagasan ke dalam bentuk institusi/ lembaga bantuan hukum, termasuk kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kedua pengertian tersebut dapat ditelusuri lebih jauh dalam sejarah perkembangan hukum Islam melalui sudut pandang ideal, normatif dan realitas.

Dalam sudut pandang ideal, makna institusionalisasi bantuan hukum mencerminkan mata rantai sejarah panjang perjalanan bantuan hukum dalam hukum Islam dan kepengacaraan yang dimulai dari pemikiran tentang sumber-sumber, prinsip-prinsip, asas-asas dan metode hingga pada tingkat pembentukan regulasi bantuan bantuan hukum. Bagian terpenting institusionalisasi bantuan hukum adalah adanya regulasi bantuan hukum yang memadai.

Dalam sejarah hukum Islam tidak banyak dijelaskan adanya institusi bantuan hukum, para pemikir hukum Islam lebih banyak mengemukakan fakta-fakta penyelesaian hukum yang dijadikan dasar adanya praktik bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sistem peradilan Islam (*risalah al-qadha fi*

al-Islam).⁹⁰ Selebihnya, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam hanya menjadi bagian dari pembicaraan tentang lembaga peradilan dalam Islam itu sendiri. Misalnya, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fakta-fakta tentang penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya hingga fase khilafah dan modern, dijadikan dasar pemikiran untuk menjelaskan teori dan praktik bantuan hukum dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Kemudian dalam perkembangan modern, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan banyak disandarkan pada upaya pembangunan hukum sebagai ciri dari negara hukum modern. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan dan pelebagaan hukum dalam suatu proses politik.⁹¹ Dengan kata lain, pembentukan lembaga bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan pembangunan hukum itu sendiri. Namun di negara berkembang, ternyata pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, di mana aparat hukum dan birokrasi sangat mendominasi arah perkembangan hukum.

Pemaknaan kedua institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam difahami secara normatif, yaitu proses transformasi ide-ide dan gagasan-gagasan tentang bantuan hukum dan kepengacaraan menjadi peraturan dan undang-undang (*qanun*), agar setiap masyarakat mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) dalam konteks mewujudkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam

⁹⁰ Peneliti berpendapat bahwa *risalah al-qadha* yang dijalankan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab banyak menampilkan dasar-dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum Islam. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Jalaludin Suyuthi Pulungan, *Pengantar Fikih Siyasah* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996), 139-140.

⁹¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta 1983), hlm. 25.

pelaksanaannya, transformasi bantuan hukum dan kepengacaraan tersebut dilakukan melalui proses *taqnin*.

Namun demikian, proses *taqnîn* bantuan hukum dan kepengacaraan salam sejarah hukum Islam berkaitan dengan sistem hukum ketatanegaraan.⁹² Bahkan ada yang menyebutkan *qânûn* dan *taqnîn* mencakup dua cara pandang yang saling tarik-menarik. Membicarakan *qânûn* berarti substansi masalah berbicara seputar produk hukum Islam yang dipengaruhi oleh pola pikir, tradisi dan politik hukum suatu masyarakat. Sedangkan *taqnîn* berarti substansi pembicaraan menyangkut urusan dengan ilmu politik atau hukum tata negara. Pendek kata, *qânûn* adalah produk hukum yang dibuat melalui proses transformasi hukum, sedangkan *taqnîn* adalah proses legislasi hukum dalam wilayah hukum tata negara. Jadi keduanya tidak dapat diasumsikan dalam batas-batas teoritis ilmu hukum semata, melainkan terkait pula dengan hukum tata negara.

Dalam sejarah hukum Islam, perkembangan bantuan hukum dan kepenga-caraan tidak selalu menggunakan satu baju atau baju yang sama. Adakalanya ia eksis secara *individu* dan adakalanya juga *kolektif*. Adakalanya ia bergerak secara *struktural* dan adakalanya bergerak secara *fungsional*. Adakalanya ia bergerak secara *konstitusional* dan adakalanya bergerak secara *sosio-kultural*.⁹³ Sehingga, ide-ide dan gerakan bantuan hukum dalam wajah lama kini diaktualisasikan dalam wajah yang baru, dengan sebutan “*access to justice: barang lama, kemasan baru*”.⁹⁴

⁹² Abu Hassan al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Dînniyah* (Kairo: Musthafa al-Bâb al-Halaby, 1973) hlm. 118-119 dan A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Press, 2002), hlm. 47-56.

⁹³ Sebagai contoh, pada periode awal Rasul melakukan proses penyelesaian hukum dalam kedudukannya sebagai Nabi, Qadhi, dan sekaligus kepala negara. Demikian pula para khalifah yang membentuk kekuasaan kehakiman sejenis al-hakam, al-hisbah, dan al-mazhalim sebagai perpenjangan tangan kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum di kalangan masyarakat saat itu. Lihat Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 1-3.

⁹⁴ Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 232.

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat dalam persamaan kedudukan di depan hukum. Dalam suatu negara hukum, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum itu harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Maududi⁹⁵ dalam karyanya *Human Rights in Islam* bahwa jaminan perlindungan atas hak konstitusional bagi setiap individu adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin. Kalau di dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat atau pengacara untuk membela kepentingannya, maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*.⁹⁶ Sehingga pembelaan oleh advokat atau pengacara bagi orang mampu atau fakir miskin merupakan sesuatu hal yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

Apabila dikaji lebih rinci, menurut ilmu perundang-undangan tidak lepas dari adanya beberapa faktor tuntutan yang mempengaruhi perlunya institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam, antara lain:⁹⁷

⁹⁵ Abul 'Ala al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976) hlm. 15.

⁹⁶ Franz H. Winarta, "Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional", artikel dalam <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html> diakses tanggal 28 September 2016.

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, "Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No.13 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinprera Islam Depag RI, 1994, hlm. 29-35. Bandingkan dengan Cik Hasan Bisri, "Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Al-I'tibar* edisi 2 tahun 1996 (Kopertais Wilayah II Jawa Barat), hlm. 40-64.

- a. Secara historis perkembangan bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam telah berlangsung sejak kedatangan pertama Islam, yakni sejak periode rasul, khilafah, dan modern. Hukum Islam telah mewarnai tata nilai dan perubahan sosial masyarakat di berbagai negara muslim;
- b. Secara sosiologis munculnya berbagai pemikiran bantuan hukum dan kepenga-caraan dalam sejarah hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, perlu diakomodasikan dalam suatu bentuk perundang-undangan tertulis dan legal (UU Bantuan Hukum);
- c. Secara yuridis perangkat hukum yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya menghendaki adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku di masyarakat yakni UU Bantuan Hukum itu sendiri.

Selain adanya faktor tuntutan tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendukungnya, antara lain:⁹⁸

- a. Adanya interaksi positif di kalangan pemimpin politik untuk membumikan syari'at Islam dengan segala dimensinya melalui pendekatan struktural di tingkat legislatif dan birokrasi pemerintahan;
- b. Adanya dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, para ulama dan cendekiawan muslim dalam menyampaikan ide dan gagasan transformasi hukum Islam ke dalam UU Bantuan Hukum;
- c. Adanya suatu dukungan yuridis-konstitusional dalam konstitusi negara untuk mentransformasikan atau menggaransi bantuan hukum bagi upaya penegakan hukum.

Berbagai permasalahan yang sering muncul sehubungan dengan tuntutan penegakan hukum Islam dalam suatu negara berpenduduk mayoritas

⁹⁸ Ismail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam” makalah dalam *Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok* (Festival Istiqlal Jakarta tanggal 21-24 Oktober 1991).

Islam. Bagi umat Islam pelaksanaan syari'at Islam merupakan jalan hidup yang bersifat integral dan tidak ditentukan dalam batas negara. Namun demikian, pemahaman terhadap hukum Islam yang diformulasikan menjadi konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan belum sepenuhnya mengikat warga negara. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan syari'at Islam itu sendiri. Meskipun hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum negara secara formal dan konstitusional, ia tidak memiliki daya ikat yang kuat tanpa adanya kesadaran hukum.

Bantuan hukum sendiri seringkali dikenal adanya organisasi-organisasi yang didalamnya memuat sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi berjalannya penegakan hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor: 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Sejak tanggal 25 April 2007, Toeti Heraty Roosseno terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina untuk menggantikan Adnan Buyung Nasution. Pada akhir masa baktinya, Toeti juga digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis dan secara definitif pada akhir 2011 dijabat oleh Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung yang kemudian dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian YLBHI ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Organisasi Advokat merupakan wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Dasar hukum pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

Organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- b. Menyelenggarakan ujian advokat;
- c. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat;
- d. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia;
- e. Melakukan pengawasan terhadap advokat;
- f. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat;
- g. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara

melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa institusionalisasi bantuan hukum di Indonesia perlu dilakukan dalam tiga bentuk, yakni secara konstitusional, struktural, dan konstitusional. Bantuan hukum konstitusional adalah mentransformasikan konsep bantuan hukum yang telah berlangsung sejak periode awal Islam hingga modern, serta memodifikasi dan mentransformasikannya menjadi suatu peraturan dan/atau perundang-undangan bantuan hukum.

Sedangkan bantuan hukum struktural merupakan upaya hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi, di mana pemerintah berkewajiban menggaransi hak-hak hukum setiap warga negara dengan cara memformalisasikan lembaga bantuan hukum dan menyediakan sebagian anggaran negara untuk bantuan hukum cuma-cuma bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Adapun bantuan hukum kultural adanya dukungan publik yang secara kolektif berperan aktif dalam menegakan hukum dan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk donasi tetap maupun mendukung gerakan advokasi dan bantuan hukum bagi yang memerlukan.

5. Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan kata "*law enforcement*" dalam bahasa Indonesia secara sempit dimaknai dengan "penegakan hukum" atau "penegakan peraturan".

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Berkenaan dengan hal di atas, digunakanlah istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*", yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Di samping itu, penegakan hukum bisa pula dilakukan secara obyektif. Maksudnya adalah norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan dan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *“law enforcement”* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *“court of law”* dalam arti pengadilan hukum dan *“court of justice”* atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *“Supreme Court of Justice”*.⁹⁹

Dengan demikian yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja.

⁹⁹ Anonimous, *“Penegakan Hukum di Indonesia”*, kutipan artikel dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses tanggal 28 September 2016.

Di Indonesia, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkembang cukup pesat, baik di Perguruan Tinggi maupun adanya Yayasan Amal Bantuan Hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana. LBH biasanya berperan sebagai *legal aid* atau dengan ongkos murah. Sebab LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*non profit oriented*). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan.

Untuk mempraktikkan konsep bantuan hukum dalam Islam dapat pula dilakukan melalui pendekatan struktural, yaitu penjabaran norma-norma hukum yang ada dalam konstitusi, peraturan, dan perundang-undangan menjadi lembaga-lembaga atau pranata-pranata bantuan hukum, pengacara, dan advokat, baik di tingkat negara maupun masyarakat, seperti: PERADIN, YLBHI, APSI, IKADIN, dan sebagainya.

Selain itu, bantuan hukum dalam Islam juga dapat dikembangkan melalui pendekatan kultural yaitu suatu upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran hukum di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat, melalui media massa dan gerakan bantuan hukum secara sistematis, terlembaga, dan berkesinambungan tanpa mengabaikan tradisi dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Di samping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi, *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi, *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Sedangkan ayat (2) berbunyi: *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan*

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada beberapa Perguruan Tinggi Hukum sendiri, kucuran bantuan biaya dapat diperoleh oleh/dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (merupakan kebijakan pimpinan PT) sedangkan lembaga bantuan hukum yang di luar perguruan tinggi memperolehnya melewati swadaya masyarakat sendiri yang sifatnya tidak mengikat. Sementara dalam perkara pidana, seorang tersangka yang diancam padanya ancaman hukuman lima tahun ke atas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*), sebagaimana yang tersebut dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa begitu pentingnya adanya LBH-LBH di masyarakat, beberapa LBH di Perguruan Tinggi Hukum sempat menuai protes atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Mereka menganggap undang-undang tersebut telah menutup akses LBH untuk melakukan bantuan hukumnya di Pengadilan (pidana atau perdata). Terlebih dahulu yang berkenaan dengan BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 31, Sebagai berikut: *Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-*

Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil demikian terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.

Apalagi disadari bahwa tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa. Disinilah letak sangat pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didengar dan didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau buta hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Karena setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini juga merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapa pun tanpa ada diskriminasi.

Pemenuhan hak ini juga merupakan tugas dan kewajiban negara, karena bantuan hukum juga merupakan kewajiban negara dan setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negara di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusi. Pendek kata, pemberian jasa bantuan hukum merupakan suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Pemberian jasa bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

C. Konsep dan Teori Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas

1. Pengertian Bantuan Hukum Universitas

Ketika ajukan *judicial review* oleh Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat akhirnya dilakukn. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pencabutan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh MK melahirkan babak baru dalam dunia bantuan hukum. Sebelumnya, keberadaann UU Advokat menjadi kuburan mati dan mimpi

buruk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan Klinik Bantuan Hukum Universitas, betapa tidak, sebelum UU Advokat lahir bantuan hukum masyarakat tidak mampu (*justice for all*) disuplai oleh LBKH Universitas yang konsisten pada pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi.

UU Advokat menjadi kuburan mati dan mimpi buruk disebabkan dua hal. Pertama monopoli bantuan hukum yang hanya boleh dilaksanakan dan dilakukan Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, kedua pemidanaan bagi orang yang menjalankan praktik bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-olah Advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

UU Advokat disatu sisi telah merampas hak dan kewajiban BKBH Perguruan Tinggi dan hak masyarakat tidak mampu memperoleh bantuan hukum cuma-cuma yang telah lama ada dengan ijin dari Mahkamah Agung yang diperpanjang dalam Surat Mahkamah Agung (MA) Nomor: MA/SEK/034/II/2003 Tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum. Jika dilihat secara mendalam ada dua komponen dalam negara yang dirugikan dengan lahirnya UU Advokat.

Pertama, LBKH Universitas mempunyai kewajiban menjalankan fungsi pengabdian masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana disebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang salah satunya adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu melalui KKBH. Kedua masyarakat (*civil society*) tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari BKBH yang hak tersebut sesungguhnya telah diberikan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)

berbunyi *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mulai berlaku tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum boleh dikatakan membawa angin segar bagi profesi advokat. Tetapi tidak bagi keberadaan LKBH Universitas. Sebab dengan diberlakukannya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, peranan sejumlah BKBH perguruan tinggi akan makin dibatasi.

Demikian pula LKBH Perguruan Tinggi Negeri, dosen-dosen yang melakukan tugas ganda sebagai pengacara tidak akan lagi dapat berpraktik sebagai advokat di pengadilan. Sebab, pasal 3 ayat (1) UU advokat dan UU Bantuan Hukum memberikan larangan bagi seorang pegawai negeri untuk melakukan advokasi di pengadilan. UU advokat dan UU Bantuan Hukum yang hadir di tengah kancah dunia peradilan memang merupakan sandungan berat bagi dosen universitas negeri untuk beracara. Dengan adanya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum otomatis hanya bisa memberi konsultasi.

Menurut sebagian pendapat, adanya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum pun bukan saja telah “meneror” kerja LKBH-LKBH Perguruan Tinggi Negeri, tapi keberadaan perangkat hukum baru ini juga mengkhawatirkan BKBH Kampus swasta. Sebab tidak semua dosen yang bekerja di LKBH kampus sudah memiliki SKPT. Salah satunya dikemukakan oleh Tongat (Ketua Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) bahwa membawa masalah pembatasan kegiatan advokat dan paralegal ini lewat jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ancaman pidana yang diterapkan dalam UU Advokat dan

¹⁰⁰ Siti Mulyani, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 Pasca Yudisial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Malang)*, Laporan Penelitian, FH UMM, 2011, hlm. 6.

UU Bantuan Hukum dapat menjadi belenggu bagi universitas untuk membuat misi sosial yang dilakukan oleh LBKH-LKBH Kampus dan tidak ada pengecualian dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum yang memberikan jalur untuk pelayanan hukum kampus.

UU Advokat dan UU Bantuan Hukum seolah-olah telah melakukan suatu pembredelan terhadap peran dan fungsi LKBH Universitas dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Namun secara perlahan kendala yuridis dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum akan menghapus peran dan fungsi lembaga-lembaga bantuan hukum non profit yang berorientasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagai jalan keluar untuk mengatasi hambatan peran LKBH Universitas adalah organisasi-organisasi advokat membuat sebuah aturan yang mengecualikan LKBH Universitas dalam ketentuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum.

Apalagi kualitas pemberian bantuan hukum oleh para dosen dan mahasiswa belum tentu kalah dengan kualitas advokat profesional. Selain itu, LKBH Universitas sudah sepatutnya dijadikan tempat magang seperti yang dimaksud dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Dengan kata lain, magang selama dua tahun di LKBH Universitas hendaknya dianggap sama saja dengan magang di sebuah Kantor Firma Hukum. Setelah dua tahun magang di LKBH Universitas dan melalui pendidikan profesi advokat agar mereka bisa mendapat kartu advokat untuk beracara.¹⁰¹

Setelah melalui perjuangan melalui *judicial review*, LKBH Universitas akhirnya mendapatkan tempat dalam melakukan kegiatan bantuan hukum. LKBH Universitas memulai babak baru dengan mimpi indah untuk kembali memberikan *supply* atau bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis (*pro deo/pro bono publico*) dan menjalankan tugasnya

¹⁰¹ Editor, “Kiprah LBH Kampus Digilas Roda Waktu” dalam www.hukumonline.com., dipublikasikan Jumat, 13 Agustus 2004 dan diakses tanggal 28 September 2016.

sebagai *public defender* yang berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 31 UU Advokat yang berisi tentang pemidanaan orang yang memberikan bantuan hukum baik luar dan dalam pengadilan (litigasi dan non litigasi). Karenanya, kedudukan LKBH Universitas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi di atas menjadi semakin jelas. Ia menempati posisi penting yakni sebagai lembaga yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum. Namun kejelasan itu hanya implisit saja disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁰²

Ketentuan dalam pasal 1 angka 1 dan angka 3 juga telah membatasi dengan jelas bahwa konsep bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dilakukan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Bantuan hukum bukan dilakukan dengan memberikan jasa dengan tarif tertentu oleh pemberi bantuan hukum tetapi dilakukan secara gratis. Sedangkan ketentuan mengenai pemberi bantuan hukum, tidak dijelaskan siapa yang memberi bantuan hukum, apakah advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum hanya menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah berbentuk organisasi atau lembaga yang memungkinkan BKBH perguruan tinggi bisa

¹⁰² Lihat penjelasan lebih lengkap dalam Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

juga dikwaifikasi sebagai pemberi bantuan hukum apabila kriteria lembaganya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.

Mencermati kriteria pemberi bantuan hukum seperti disebutkan di atas, tampaknya kedudukan BKBH perguruan tinggi dapat disejajarkan sebagai pemberi bantuan hukum. Ketentuan mengenai hal ini, dapat dikaji di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) mengenai kebolehan dosen terlibat bersama advokat memberi bantuan hukum apabila pemberi bantuan hukum tidak memiliki jumlah advokat yang memadai dikarenakan jumlah penerima bantuan hukum dalam jumlah banyak. Kemudian pasal 16 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

2. Dasar dan Tujuan Berdirinya Klinik Bantuan Hukum Universitas

Dalam hal kewajiban penggunaan LKBH Universitas sebagai kontrol pelaksanaan hukum ditunjukkan dalam Konstitusi Pasal 24 ayat (3): *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*. Dalam penyelenggaraan badan-badan ini tentunya terdapat kewenangan, hak, kedudukan, mekanisme kerja dan pendanaan untuk menyelenggarakan badan-badan ini supaya dapat bekerja secara maksimal guna menegakkan hukum dan persamaan di depan hukum yang harus diatur kembali dalam regulasi. Maksud dari badan-badan ini di

dalamnya adalah termasuk juga klinik hukum universitas. Menilik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 huruf b yakni *mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuaidengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum*.

Frasa “mewujudkan”, bermakna wajib dilakukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum termasuk di dalamnya klinik hukum universitas berarti terdapat kewajiban Klinik hukum universitas dibentuk adalah untuk setiap orang, hal yang tidak realistis kemudian terlihat dalam substansi Pasal lainnya, yakni pada pasal 6 (1) “....*membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum*”.

Pengertian dari bantuan hukum sendiri dalam Pasal 1 Huruf (2) adalah “*ditujukan untuk masyarakat miskin*” ditambah dengan substansi KUHAP pada Pasal 56 (1) di mana kewajiban pemberian bantuan hukum hanya untuk golongan tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati atau seumur hidup dan yang diancam lima tahun penjara yang berasal dari golongan tidak mampu. Padahal dalam konstitusi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara tegas diungkap pada Pasal 28 D (1) dan 28 I (2) diperuntukkan untuk setiap orang. Hal ini mempunyai arti bahwa semua orang tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, budaya dan agama, maupun jenis delik dan ancaman pidana yang diancamkan kepadanya.

Dengan demikian, dalam Pancasila, Konstitusi, KUHAP, dan UU Kekuasaan Kehakiman terdapat kesinkronan, yakni adanya kewajiban klinik hukum universitas untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi kepada setiap orang sebagai bentuk *controlling* terhadap penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum, akan tetapi UU Bantuan Hukum yang terdapat ketidak sinkronan, karena hanya tertuju pada penegakan hukum bagi masyarakat miskin dan di sisi lain ditujukan untuk segala warganegara.

Kewenangan lembaga bantuan hukum universitas tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni bantuan hukum adalah meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Jadi menurut penulis untuk masalah kewenangan ini terdapat kesinkronan dengan catatan sasaran yang dituju bukan hanya untuk orang miskin semata akan tetapi setiap orang, dengan begitu klinik hukum universitas akan bebas mewujudkan keadilan di depan hukum untuk setiap masyarakat dan warga negara berdasarkan regulasi yang mengaturnya, sesuai dengan kebijakan negara hukum.

Kedudukan bantuan hukum universitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma pada Pasal 15, 16, dan 17 yang sebagai tempat atau penampung informasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang ditangani oleh advokat, serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 bahwasanya Klinik Hukum Universitas adalah sebagai *partner* kerja advokat dalam mengembangkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas mendapatkan peluang yang cukup besar mengingat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 diatur lebih luas, yakni lembaga bantuan hukum universitas bukan hanya sebagai *partner* kerja advokat, akan tetapi juga sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerjasama langsung dengan pengadilan melalui ruang POSBAKUM yang disediakan oleh lembaga pengadilan.

Aturan mengenai kedudukan tersebut kemudian dispesifikkan kembali pada Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menetapkan pemberi bantuan hukum harus memenuhi kualifikasi: telah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekertariat yang tetap, memiliki pengurus, dan

memiliki program bantuan hukum bila hal ini dibenturkan terhadap Pasal 24 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bahwa setiap Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan kedalam wadah lembaga bantuan hukum universitas. Secara praktis, kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut menyatu dan merupakan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas (LKBHU) pada Perguruan Tinggi dan syarat-syarat tersebut secara tersirat memberikan kemudahan Klinik Bantuan Hukum untuk mencapai kualifikasi syarat-syarat pemberi bantuan hukum. Sehingga kedudukan Klinik Bantuan Hukum menurut pendapat peneliti sudah *sinkron* terhadap apa yang telah diamanatkan dalam Konstitusi.

Hak yang dipunyai oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa Lembaga Bantuan Hukum Universitas diberikan hak untuk merekrut mahasiswa, dosen dan paralegaldan diwajibkan sesudahnya untuk memberikan pelatihan bantuan hukum kepada mereka. Adapun pelatihan tersebut dapat dimulai pada program hukum klinis yang diterapkan pada fakultas yang disimpulkan dengan klinik hukum.

Hal yang sangat mendukung kegiatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4) bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat beracara di pengadilan, akan tetapi juga para mahasiswa, dosen dan asisten dosen yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bersangkutan. Sehingga secara tidak langsung dapat memberikan peluang kepada akademisi untuk mengasah kemampuan praktis. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 yang menghilangkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, peneliti dapat merumuskan bahwa bukan hanya advokat semata yang dapat menjalankan pekerjaan seperti advokat akan tetapi pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan paralegal. Permasalahannya adalah ketika hak yang diperoleh oleh mereka belum dijelaskan secara spesifik di regulasi mengenai pekerjaan advokat apa yang dapat dilakukan oleh mereka apakah pelayanan konsultasi dan bantuan hukum atau salah satu diantaranya.

Mekanisme kerja lembaga bantuan hukum universitas termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, di mana untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memenuhi syarat-syarat, yakni membuat permohonan tertulis (identitas dan pokok persoalan), menyerahkan dokumen terkait perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 hal yang tercantum dalam setiap pasal hanya berupa mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma, sedang bantuan hukum dalam arti luas tidak dicantumkan dan tidak diatur. Namun hal ini telah menyebabkan adanya pembatasan mekanisme kerja yang harus dilakukan pada perkara-perkara yang dialami oleh masyarakat miskin semata. Misalnya, pendanaan universitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yakni negara menanggung perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pendanaan berasal dari 3 sumber, yakni: negara, hibah/sumbangan, dan

sumber lain yang sah dan ti-dak mengikat. Hal ini jelas menunjukkan bantuan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin semata-mata, akan tetapi juga bagi orang yang mampu boleh mengadu atau berkonsultasi kepada Klinik Bantuan Hukum Universitas. Untuk memberikan kontribusi berupa sumbangan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diatur masalah pendanaannya secara spesifik pada setiap regulasi, di mana pendanaan dari negara hanya ditujukan bagi masyarakat miskin.

Proses pendanaan untuk masyarakat miskin termuat dalam Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 17, 18, dan 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Jo. Pasal 1 (9), 11, 16, dan 17 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011, telah diatur bahwa setiap perkara yang berasal dari masyarakat miskin dapat dibiayai oleh negara sebesar satu juta rupiah.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa pendanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas sangatlah bergantung pada berjalannya Lembaga Bantuan Hukum Universitas yang sebagian dananya berasal berasal dari negara. Apabila perkara yang masuk adalah perkara masyarakat miskin, akan tetapi dana berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber lain yang tidak mengikat, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu pengajuan perkara bagi masyarakat miskin. Sedangkan untuk orang yang mampu adalah berdasarkan dana mandiri atau sumbangan lainnya yang bersifat hibah dan halal.

3. Sejarah Perkembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas

Kisah awal mula berdirinya bantuan hukum kampus dimulai sejak tahun 50-an. UI dan Unpad sudah mulai merintis upaya pemberian bantuan hukum kampus sejak sekitar 1950-an. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) telah mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan dari Tri

Darma Perguruan Tinggi. Kemudian disusul oleh Universitas Tarumanegara (UNTAR) yang juga membentuk Pusat Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum sudah dirintis sekitar tahun 1962.¹⁰³

Untuk menunjang keberadaan LBHK, masing-masing universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, UI telah memberikan sebagian dananya bagi dosen-dosen yang aktif di LKBH sebesar Rp. 300.000,- per dosen sebagai dana pendampingan klien yang bersumber dari alokasi dana pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Universitas Padjajaran (UNPAD) cenderung lebih kecil, yang mana tiap-tiap dosen hanya diberikan Rp. 25 ribu tiap bulannya untuk program bantuan hukum dan itupun belum dipotong dengan pajak.¹⁰⁴

Perbedaan jumlah dari kedua universitas negeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti halnya pengalihan status badan hukum UI dari Perguruan Tinggi biasa menjadi Badan Hukum Pendidikan Negeri (BHPN), sehingga memiliki keleluasaan untuk menarik dana dari pihak luar institusi. Namun sebenarnya ada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri. Dalam Kepmen ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai badan yang menyelenggarakan proyek tersebut, termasuk pula memberikan kucuran dana bagi LKBH Universitas. LKBH kampus akan menerima dana setelah selesai memberikan jasa konsultasi dan atau bantuan hukum dengan persetujuan BPHN.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang semula bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) didirikan secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

¹⁰³ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

¹⁰⁴ Editor, *Sejarah Perkembangan Klinik Hukum*, (Bandung: FH UNPAD, 2015), lihat pula uraian lengkap tentang sejarah dan perkembangan klinik hukum di Indonesia dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 28 September 2016.

37 Tahun 1957 tentang Pendirian UNPAD, tanggal 24 September 1957. Fakultas Hukum UNPAD merupakan salah satu dari empat fakultas yang menjadi cikal bakal UNPAD, sekaligus menjadi dasar identitas UNPAD dalam berkiprah di dunia pendidikan. Hal tersebut diwujudkan dalam penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNPAD yang bertemakan *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional*.¹⁰⁵

Pada perkembangannya, PIP UNPAD tersebut diaktualisasikan dalam pengembangan bidang hukum internasional dan hukum lingkungan yang menjadi rujukan bagi pendidikan hukum di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Pembentukan Laboratorium Klinis Hukum juga menjadi salah satu ciri khas Fakultas Hukum UNPAD yang berorientasi bahwa pembangunan pendidikan hukum itu harus mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan, seperti sekarang Fakultas Hukum mempunyai klinis hukum antikorupsi dengan jumlah mahasiswa terbatas, pendalaman materi secara komprehensif, dan melibatkan praktisi. Sejarah mencatat bahwa Fakultas Hukum ini telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara, terlebih peminat ingin masuk kuliah ke UNPAD banyak sekali, sehingga UNPAD menjadi Perguruan Tinggi Negeri terkemuka.¹⁰⁶

Fakultas Hukum UNPAD selalu memperhatikan perkembangan kurikulum yang diminta oleh Pemerintah dan kebutuhan *stake holders* seperti antara lain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut mengamanatkan perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) diperkuat dengan KKNI bahwa lulusan Pendidikan Tinggi harus mampu mempunyai

¹⁰⁵ Editor, "Sejarah dan Perkembangan Klinik Hukum di Indonesia", lihat dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 28 September 2016

¹⁰⁶ *Ibid.*

capaian pembelajaran berupa sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, serta kompetensi dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kami terus-menerus meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana.

Klinik Hukum Universitas Sriwijaya baru mulai dalam tahap embrio sejak terbitnya Kurikulum 2003 dengan Keputusan Rektor Nomor: 2181/PT.11.1.1./ c.b.f/2003. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mulai merintis Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), namun sifat mata kuliah ini masih merupakan mata kuliah pilihan sehingga dapat diganti dengan dua mata kuliah pilihan lain dengan bobot yang sama yaitu 4 (empat) sks. Pada Kurikulum 2008 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 448/H9/PE/2008 tanggal 28 Februari 2008 mata kuliah KKL menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa dari angkatan 2008. Namun demikian, belum ada petunjuk teknis pelaksanaan KKL.¹⁰⁷

Cita-cita mendirikan klinik hukum baru terwujud pada 20 Juni 2011 setelah *The Asia Foundation (TAF)* yang bekerjasama dengan *University of Washington* memperkenalkan program *Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)* yang salah satu kegiatannya adalah klinik hukum.¹⁰⁸ Klinik hukum di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan ketrampilan praktis di bidang profesi hukum. Tim E2J The Asia Foundation mengundang delapan fakultas hukum di Indonesia, dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah salah satu fakultas hukum yang terlibat dalam program tersebut. Sejak saat itulah klinik hukum menjadi alternatif kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa selain KKL. Pada 2012, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

¹⁰⁷ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

¹⁰⁸ *Ibid.*

(UNSRI) Nomor: 192/UN9/DT.Kep/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang mana menetapkan Klinik Hukum menjadi salah satu mata kuliah wajib pilihan selain dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL).¹⁰⁹

Pada awal diperkenalkannya klinik hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terdapat 4 (empat) klinik hukum yang dikembangkan, yaitu Klinik Pidana, Klinik Perdata, Klinik Lingkungan, dan Klinik Anti-Korupsi. Kemudian pada tahun 2014 dikembangkan klinik baru, yaitu *mobile clinic* dan kegiatan magang. Adapun kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan E2J The Asia Foundation berakhir pada Juni 2015. Kemudian, untuk menjaga kesinambungan klinik hukum, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga telah mengambil kebijakan bahwa pentingnya klinik hukum yang diintegrasikan ke dalam Laboratorium Klinik Hukum.

Di samping itu, diadakannya pelatihan pengembangan klinik hukum “*E2J Clinical Legal Education Training for University and Civil Society Organization Partners*,” pada tanggal 11 September 2014 kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan *E2J The Asia Foundation*. Pembicara dari University of Washington dihadirkan untuk mempresentasikan pentingnya menjaga keberlangsungan program klinik bantuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka melatih tenaga pengajar untuk memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan klinik hukum. Dalam perkembangannya, kegiatan klinik hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bukan hanya mengembangkan 4 (empat) klinik hukum yang ada, namun pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga mengembangkan kegiatan *mobile clinic* dan *magang* di bawah pengelolaan klinik hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

¹¹⁰ *Ibid.*

Serupa dengan Universitas Sriwijaya, Kuliah Klinik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) mulai dirintis pada tahun 2012 yang diinisiasi oleh *The Asia Foundation* melalui pendanaan *US AID* dalam program *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)*. Pendirian dan pengembangan Mata Kuliah Klinik Hukum yang diinisiasi oleh Program E2J ini, secara serempak dikembangkan pada delapan (8) Universitas di Indonesia sebagai pilot project yaitu : FH UI, FH UGM, FH UNUD, FH UNPAD, FH UNAIR, FH UNHAS, FH UNSRI, serta FH UNHAS. Sejak tahun 2012 secara resmi Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan E2J untuk mendirikan dan mengembangkan Klinik Hukum.

Mata Kuliah Klinik Hukum secara terstruktur telah resmi dituangkan dalam Kurikulum FH UNUD sejak tahun 2013, yang ditawarkan secara rutin di setiap semester baik Semester Genap maupun Semester Ganjil dengan status Mata Kuliah Pilihan dengan Bobot 2 SKS. Keberadaan Mata Kuliah Klinik Hukum memberi kontribusi penting dalam reformasi pengembangan pendidikan tinggi hukum di Perguruan Tinggi, terutama bagi mahasiswa karena melalui Mata Kuliah ini dapat memberi kesempatan khususnya dalam pengembangan Legal Skill.

Melalui Mata Kuliah Klinik Hukum mahasiswa mendapat kesempatan mengikuti kuliah praktik dengan situasi atau kasus-kasus hukum riil yang terjadi dalam praktik di masyarakat baik kasus hukum perdata maupun pidana yang dibimbing tidak hanya oleh Dosen-Dosen dari FH UNUD akan tetapi juga oleh Dosen-Dosen Mitra baik dari CSO maupun Penegak Hukum.

Dengan mempertimbangkan kontribusi penting dari keberadaan Mata Kuliah Klinik Hukum khususnya bagi mahasiswa serta komitmen Fakultas dalam rangka keberlanjutan (*sustainability*) dari Klinik Hukum, maka sejak tahun 2015 FH UNUD mengembangkan dua (2) Klinik Hukum lainnya yaitu

: Klinik Hukum Contract Drafting dan Klinik Hukum Perancangan Produk Hukum Daerah. Dengan demikian hingga tahun 2015 ini, di FH UNUD telah dikembangkan enam (6) Mata Kuliah Klinik Hukum.

Langkah The Asia Foundation (TAF) bekerjasama dengan University of Washington yang memperkenalkan program *Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers* (E2J) rupanya tidak hanya tertuju pada Universitas Sriwijaya dan Universitas Udayana semata. Di Tahun yang sama, *The Asia Foundation (TAF)* bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH - USU) bersama tujuh Universitas terkemuka lainnya di Indonesia) melaksanakan program "Mendidik dan Melengkapi para Reformis hukum di masa mendatang," *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers* (E2J) Program.

Program semacam ini merupakan program kemitraan dengan Fakultas-fakultas Hukum untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas, bahkan dalam perkembangannya ini menjadi program unggulan seperti halnya yang disebutkan pada kedelapan universitas tersebut, yaitu: Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana dan Universitas Hasanuddin.

Program Klinik Hukum juga telah berkembang pada Fakultas Syariah dan Hukum di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Salah satunya adalah Klinik Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tepatnya pada tahun 2010, para dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama telah merintis dikembangkannya Klinik Hukum. Secara perlahan dan pasti program ini cukup berhasil menghimpun dan melibatkan para mahasiswa dalam program Klinik Hukum. Sehingga pada tahun 2011 secara resmi memperkenalkan

berdirinya Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹¹¹

Hingga saat ini, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah lembaga peradilan di Jawa Barat dan bahkan bekerjasama secara intensif dengan Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law Monash University Melbourne, Australia. Kerjasama tersebut berkisar tentang pertukaran informasi dan data, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana prasarana pendukung Klinik Bantuan Hukum Universitas di kedua belah pihak.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa salah satu alasan penting kehadiran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kendala banyaknya lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terbaik sering tidak tertarik dengan pelayanan publik dan lebih memilih untuk bekerja di kantor hukum swasta atau karir bisnis lainnya. Hanya sedikit saja dari mereka yang tertarik untuk memilih profesi sebagai Hakim, Jaksa, Polisi, ataupun berkiprah dalam organisasi masyarakat sipil. Kondisi semacam ini tentunya membutuhkan perhatian khusus mengingat penegakan hukum di Indonesia membutuhkan para penegak hukum yang memiliki kemampuan yang baik khususnya dalam bidang hukum.

4. Bentuk-bentuk Pelayanan Klinik Bantuan Hukum Universitas

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berbentuk litigasi dan non litigasi. Pelayanan hukum litigasi yaitu seluruh jasa hukum yang mengacu pada suatu

¹¹¹ Tim Penyusun, *Profil Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD, 2013).

hukum acara tertentu, baik di Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, Rehabilitasi, Abolisi dan Amnesti. namun tidak terbatas pada hukum acara dalam perkara Perdata, Perdata, Niaga, Perdata Agama, Pidana, Tata Usaha Negara, Militer, Konstitusi, dan Lainnya.

Sedangkan pelayanan hukum yang bersifat non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan, dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Pelayanan hukum non litigasi pada umumnya dapat dilakukan terhadap kasus-kasus perdata karena lebih bersifat privat. Non juga litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Misalnya, pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata dapat dibagi kepada empat bentuk materi hukum, yakni: perdata, pidana, ekonomi syariah, dan hukum lingkungan. Pelayanan bantuan hukum dalam bentuk perdata disesuaikan pada ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di dalam program klinik bantuan hukum dalam perkara perdata, mahasiswa akan dibekali keterampilan dalam menangani kasus-kasus di bidang hukum keperdataan, baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan hukum. Keterampilan mahasiswa yang menjadi titik berat di dalam program klinik hukum ini adalah melatih kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan para klien. Selain itu, juga melatih mahasiswa untuk bekerja secara sistematis dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sedang dihadapi. Klinik Bantuan Hukum Universitas ini memberikan kesempatan

bagi para mahasiswa untuk mendalami cara bekerja seorang advokat dalam menangani kasus dengan cara mendampingi advokat pada sebuah lembaga bantuan hukum.

Selanjutnya dalam materi hukum pidana, mahasiswa juga dibekali pengetahuan tentang penguasaan hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, karena masih tetap diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

- a. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- b. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
- c. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Di samping itu ada pula beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Narkoba;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme, dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Melalui program klinik bantuan hukum dalam perkara pidana, mahasiswa hukum juga dapat melatih kemampuannya baik di dalam memberikan pendapat hukum ataupun memberikan pendampingan hukum kepada para

klien. Tidak sedikit keberadaan paralegal mahasiswa layaknya para advokat mampu memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana. Dengan kata lain, para mahasiswa hukum akan memperoleh berbagai pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan berbagai perkara melalui penerapan teori-teori hukum pidana sebagaimana telah mereka peroleh sebelumnya selama kuliah.

Pelayanan klinik hukum dalam perkara pidana untuk membantu seorang warga sipil seringkali menyebabkan yang bersangkutan tidak memperoleh akses kepada keadilan. Meskipun seseorang dipersangkakan bersalah atau meskipun seseorang tertangkap tangan melakukan sebuah tindak pidana, namun ia masih memiliki hak-hak sebagai tersangka selama proses menuju ppidanaan berlangsung. Hak-hak tersebut yang kadang masih kurang diperhatikan oleh sebagian aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga pelaku-pelaku tindak pidana tidak diperlakukan secara adil, sebagaimana telah diatur di dalam norma hukum yang berlaku.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalam hukum bagi setiap warga masyarakat, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan terutama para penegak hukum agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak seorang tersangka di dalam memproses seseorang yang terlibat perkara pidana. Melalui pelatihan keterampilan hukum bagi mahasiswa yang mengikuti klinik hukum pidana, maka para mahasiswa akan melatih kepekaan dan ketelitian mereka ketika mendampingi seorang tersangka tindak pidana, agar hak-hak sebagai tersangka tidak dilanggar.

5. Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari program Klinik Bantuan Hukum Universitas, mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada dasarnya tetap boleh menjalankan praktik litigasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di depan pengadilan. Dalam program klinik bantuan hukum yang anggarannya disediakan pemerintah, mahasiswa, dosen, dan paralegal boleh menjalankan praktik litigasi dan non-litigasi. Tetapi untuk praktik litigasi tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi mahasiswa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa litigasi pada dasarnya dilakukan oleh advokat yang menjadi pengurus organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atau advokat luar yang direkrut PBH. Demikian pula dalam Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2013 tersebut menyebutkan bahwa dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberian bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa.

Selanjutnya dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur pula tentang persyaratannya, yakni dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sedangkan dalam ayat (4) menjelaskan mahasiswa harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Tidak disebutkan hukum acara apa yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa ataupun nilai mahasiswa untuk dapat beracara di pengadilan, namun dengan kehadiran PP sangat berfungsi mengembalikan khittah mahasiswa untuk pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kemudian dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga miskin, kehadiran mahasiswa sebenarnya sangat penting terutama di daerah-daerah yang jumlah advokat, dosen hukum dan paralegal tidak memadai. Itu sebabnya, dalam proses pembentukan UU Bantuan Hukum dan peraturan teknisnya, PJI berharap lebih dari sekadar pendampingan oleh advokat.

Pembatasan pada tahap beracara bagi mahasiswa juga tak perlu, mengingat peran dari klinik hukum dan LBH Universitas yang semakin baik dari segi kualitas dan intensitas. Pasal 15 PP 42 juga sudah mengakomodasi ketentuan pendampingan atau menjalankan kuasa. Mahasiswa boleh mendampingi atau menjalankan kuasa di tingkat penyidikan, penuntutan, di muka persidangan, atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di daerah-daerah yang minim advokat, mahasiswa juga bisa menjalankan tugas memberi bantuan hukum non-litigasi. Termasuk dalam cakupan non-litigasi tersebut adalah peyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan *legal drafting* dokumen hukum.

Namun demikian segala bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum sangat terikat kepada kode etik. Misalnya, dikenal istilah Kode Etik Advokat sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan. Muhamad Sanusi, mendefinisikan kode etik profesi penasehat hukum sebagai *"ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan"*.

Kode etik ini dapat dijadikan rambu-rambu bagi advokat dalam menentukan suatu pelanggaran hukum secara objektif. Bagaimanapun hukum adalah hukum, sementara itu dalam hal terjadi suatu perbedaan interpretasi, hukum dengan tegas dan tanpa ragu-ragu menyatakan suatu tindakan *legal* dan *ilegal*. Akan tetapi, untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap etis atau tidak etis, lebih banyak bersifat subjektif.

Khusus bagi kalangan profesi advokat profesional tentu saja kode etik tersebut tidak seharusnya demikian, karena sikap obyektif di dalam

memandang suatu masalah harus tetap selalu ditegakkan. Mereka harus berusaha menciptakan dan memiliki suatu kode etik profesi yang tegas, agar memudahkan dalam pembinaan dan pengendaliannya bila terjadi pelanggaran.

Kemudian pada tanggal 4 April 1996, berdasarkan kesepakatan antar tiga organisasi profesi hukum Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) memutuskan untuk menciptakan dan memiliki suatu kode etik yang berlaku untuk semua advokat, pengacara, konsultan dan penasehat hukum Indonesia tidak terkecuali advokat atau pengacara syari'ah serta penasehat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.

Sedangkan di daerah-daerah bencana, mahasiswa, dosen, dan para-legal yang lahir dari klinik hukum telah memiliki akuntabilitas baik dalam memberikan bantuan hukum kepada para korban. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memasukkan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Hal tersebut memberi ruang kepada warga yang mengalami kerentanan sosial untuk mendapatkan bantuan hukum serta mampu memposisikan mahasiswa sebagai *the real agent of chance*.

Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil peran untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk kegiatan litigasi dan non litigasi. Kegiatan litigasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain kegiatan litigasi, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat melakukan kegiatan non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi

hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum. Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas secara rinci berdasarkan pengalaman dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:¹¹²

a. Bidang Layanan Hukum

- 1) Memberikan konsultasi kepada para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk mempe-roleh informasi hukum dari para konsultan hukum secara cuma-cuma;
- 2) Memberikan konsultasi hukum dalam lingkup kewenangan absolut. Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk mempe-roleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma;
- 3) Memberikan layanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- 4) Memberikan layanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
- 5) Memberikan layanan informasi hukum melalui layanan telepon untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan;
- 6) Memberikan layanan bimbingan kepada para amil dan masyarakat yang datang ke KBHU mengenai pentingnya masyarakat memiliki identitas hukum (akta nikah dan cerai);

¹¹² Anonimous, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Departemen Pendidikan Nasional badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Desember 2008, hlm. 4. Lihat pula Wardiman Djojonegoro, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 5.

b. Bidang Kajian dan Penelitian

- 1) Melakukan *joint research policy* dengan pengadilan dan lembaga terkait di dalam rangka melakukan evaluasi dan menemukan solusi penyelenggaraan peradilan yang bersih;
- 2) Melakukan akademik research untuk pengembangan bahan ajar ilmu peradilan;

c. Bidang advokasi

- 1) Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat berperkara di pengadilan;
- 2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya perkara.

Melalui peran nyata dari Klinik Bantuan Hukum seperti diuraikan di atas, setiap perguruan tinggi telah memberikan dharma pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat menunjukkan bahwa perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaat kehadirannya bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang berurusan dengan hukum. Perguruan tinggi kehadirannya menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab salah satu tantangan besar yang dihadapi Perguruan Tinggi adalah masalah relevansi pendidikan klinik hukum.

Relevansi merupakan tingkat keterkaitan antara masukan, proses dan hasil (keluaran) dari program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya baik secara mikro maupun makro. Hal demikian dapat dimaknai bahwa relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan dalam bentuk *link and match* yang pada kenyataannya pendidikan itu telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Jelas sekali bahwa Perguruan tinggi memikul beban berat agar para lulusannya relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai lulusan yang siap pakai.

Pada gilirannya setiap dosen dan mahasiswa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada KBHU hendaknya tetap memegang teguh prinsip dengan keharusan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh undang-undang (peraturan, kode etik, sumpah profesi, dan lain-lain), meskipun sendirian ataupun di muka orang banyak. Suara hati setiap pembela keadilan ini tentu nilainya jauh lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Karena mereka yang menetapkan dirinya untuk tunduk kepada undang-undang, sudah barang tentu telah menepati janji untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembela keadilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, obyek utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah akan mengkaji model pengembangan klinik bantuan hukum universitas baik dari segi konsep dan teori, model pembelajaran, peluang dan tantangan, serta strategi pengembangannya melalui studi komparatif Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditampilkan berbagai *display data* rekam jejak pelayanan konsultasi dan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*) oleh klinik hukum kedua universitas tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau tata cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh.¹

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 4.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kombinasi metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan deskriptif-empirik (*descriptive-empirical research*). Metode kepustakaan digunakan untuk menjelaskan konsep dan teori pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas. Sedangkan metode deskriptif-empirik digunakan untuk menjelaskan rekam jejak Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Faculty of Law Monash University Melbourne dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.³

Peneliti memilih metode deskriptif-empirik tersebut karena ada beberapa informasi penting di lapangan yang dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Pertama, informasi keadaan saat ini (*present condition*). Kedua, informasi yang diinginkan (*what we may want*), dan ketiga, bagaimana sampai bisa ke sana, bagaimana mencapainya (*how to get there*). Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang dipilih adalah studi kasus (*case study*).

Melalui metode penelitian deskriptif-empirik tersebut, peneliti juga dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya dimana penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka. Dalam penelitian deskriptif juga bukan hanya dapat menggambarkan keadaan saja, tetapi juga dapat menggambarkan suatu keadaan dalam tahapan-tahapan dan perkembangannya.

Selain menggunakan metode deskriptif-analitis, peneliti juga menggunakan metode komparatif, suatu penelitian empiris yang sistematis, di mana

³ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1995) h. 8.

ilmuan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena tingkat eksistensi variable tersebut telah terjadi.⁴ Pendekatan komparatif ini dilakukan peneliti diawali kegiatan mengidentifikasi pengaruh variable satu terhadap variable lainnya yang kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variable penyebabnya. penelitian komparatif membandingkan situasi masa lalu dan saat ini atau situasi-situasi parallel yang berbeda, khususnya apabila peneliti tidak memiliki kontrol terhadap situasi yang diteliti. Hal ini ditujukan agar data penelitian mengungkapkan semua peristiwa yang relevan dengan obyek yang diteliti.

Fungsi dilakukannya metode deskriptif-empirik dan pendekatan komparatif adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan beberapa alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah pemecahan dan jawabannya terhadap permasalahan dapat bersifat abstrak dan umum. Sebagaimana hanya dalam penelitian dasar, hasil penelitian juga memiliki fungsi dan dapat spesifik memberikan sumbangan terapan, antara lain:

1. Mendeskripsikan, memberikan data dan informasi

Penelitian dengan tugas mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi disekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangan gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar tau yang kecil, tetapi jika dilihat dari segi perkembangan untuk masa datang perlu mendapatkan perhatian dengan segera.

2. Menerangkan data atau kondisi dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena

Penelitian dengan tugas menerangkan, berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya, maka penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas, yang dilihat dari hubungan suatu dengan yang lainnya.

⁴ Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian*, (Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2007), hlm. 18.

3. Menyusun Teori

Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel;

4. Meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan;
5. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Melalui penelitian dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi masa yang akan datang;
6. Mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala, merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu.

C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif sesuai dengan metode yang digunakan yakni deskriptif. Semua jenis data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan narasi kalimat hasil dari temuan lapangan selanjutnya digambarkan secara sistematis dan komprehensif. Adapun jenis data penelitian ini berkaitan dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne. Adapun jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini mencakup:

1. Konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne;
2. Model pembelajaran klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne;
3. Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas;
4. Strategi yang dilakukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan klinik bantuan hukum universitas;
5. Kontribusi klinik bantuan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum.

D. Sumber Data

Penelitian ini lebih menekankan kepada penelitian lapangan (*empirical reserach*) sebagai tumpuan utamanya, sedangkan penelitian kepustakaan merupakan instrumen pendukung dalam upaya menggambarkan hasil penelitian yang dapat mewakili kesimpulan umum tentang model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

1. Sumber Data Primer

Peneliti mendapatkan data primer dari hasil wawancara dengan informan berkenaan dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne. Data primer itu berupa kata-kata dan sikap atau tindakan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi atau pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mendapatkan data ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama serta kesabaran dan kehati-hatian dalam mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu yang berkenaan dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh merupakan data yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer yang diperlukan dalam penelitian. Data ini digali dari buku-buku (*book review*), makalah, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedi, website, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan obyek yang diteliti. Karena dari situlah dapat diperoleh berbagai bahan dan informasi seputar model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu sumber data lainnya untuk mendukung kelengkapan data penelitian, antara lain diperoleh dari berbagai dokumen tertulis seperti dokumen laporan tahunan, notula rapat, agenda harian, transkrip, CD dan lain-lain yang relevan dengan obyek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Book Review

Book review yaitu peneliti menelaah dan menyusun ringkasan pokok-pokok pikiran dari berbagai literatur yang menjelaskan konsep dan teori tentang klinik bantuan hukum. Secara teknis, book review tersebut dilakukan melalui dua cara: (a) kutipan blok (*block citation*) yaitu dengan mengutip secara utuh uraian, pikiran, atau gagasan pada suatu literature/buku; dan (b) kutipan paraphrase (*paraphrase citation*) yaitu mengutip sejumlah pokok-pokok pikiran atau gagasan utama yang diambil sejumlah uraian panjang yang terdapat dalam suatu literatur.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu cara untuk mengumpulkan berbagai keterangan yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan langsung. Selain itu, teknik observasi juga merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat secara kegiatan yang dilakukan.⁵ Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengertian observasi diberi batasan, yakni ia merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari inter relasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kulturil tertentu.

Observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶ (1) diabdikan pada pola dan

⁵ Riduan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.

⁶ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Unpar Press, 2006). Lihat pula Tim Penyusun, *Metode Penelitian*, ddalam [http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14741/BAB+IV+ Buku+ \(Baru\).doc](http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14741/BAB+IV+ Buku+ (Baru).doc) diakses tanggal 28 September 2016.

tujuan penelitian yang sudah ditetapkan; (2) direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, dan tidak secara kebetulan (*accidental*) saja; (3) dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi-proposisi yang lebih umum, dan tidak karena didorong oleh impuls dan rasa ingin tahu belaka; dan (4) validitas, reliabilitas dan ketelitiannya dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya. Teknik observasi ini digunakan untuk menggali semua data yang terkait dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dan dialog interaksi secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancara, untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, bersumber langsung dari responden yang diwawancara terlepas pernyataan yang diberikan oleh responden bisa mewakili atau tidak dengan obyek penelitian.⁷

Selain itu wawancara merupakan sebuah proses komunikasi berpasangan (pewawancara dan yang diwawancara) dengan suatu tujuan yang serius dan telah ditetapkan sebelumnya yang dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Wawancara juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan

⁷ Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk *interview* yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Secara fisik *interview* dapat dibedakan atas *interview* terstruktur dan *interview* tidak terstruktur. *Interview* terstruktur terdiri atas serentetan pertanyaan dimana pewawancara tinggal memberikan; pada pilihan jawaban yang disediakan. Interview terstruktur ini kadang-kadang jawabannya disembunyikan oleh pewawancara, akan tetapi tidak jarang pula diperlihatkan kepada responden, bahkan responden di persilahkan memberi tanda.

keterangan dan pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan cara bercakap-cakap dan bertemu tatap muka.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan interview bebas terpimpin dengan orang tua siswa dan guru yang erat kaitannya dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne. Teknik wawancara secara mendalam ini juga dilakukan untuk menggali lebih jauh pendapat beberapa dosen, mahasiswa, dan klien berkenaan dengan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan mencermati semua dokumen dan laporan-laporan atau rekam jejak penanganan kasus pada klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne. Semua jenis data dokumentasi tersebut diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, seperti: buku profil, laporan tahunan, notula rapat, agenda harian, transkrip, CD dan lain-lain.

Bahan-bahan data dokumentasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian ini mencakup: konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas, model pembelajaran, rekam jejak informasi data perkara-perkara atau kasus-kasus yang sudah ditangani, data-data yang belum dan/atau sudah terpublikasikan, dokumentasi photo kegiatan dan peristiwa, serta dokumen-dokumen kebijakan yang sifatnya akademik

dan non akademik yang erat kaitannya dengan pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan dan ketika peneliti telah selesai mengumpulkan data maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperolehnya. Analisis data ini tentu perlu dilakukan untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang lebih dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan cara tertentu sehingga hubungan dari masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa data ini perlu dianalisis agar berbagai data yang telah diperoleh dapat disederhanakan sehingga nantinya akan dapat lebih mudah untuk dipahami.

Dalam hal ini, paling tidak ada lima teknik atau tahapan mengelola data ssebelum merumuskan kesimpulan penelitian, antara lain:

1. Pemberian kode, di mana proses memberikan kode pada data ini dapat bermanfaat dalam menyederhanakan dan menstandarkan data;
2. Pemberian anotasi yang berarti pengubahan bahan-bahan tertulis dengan menambahkan catatan atau komentar;
3. Pemberian label yang biasanya dilakukan pada pernyataan dengan kata-kata yang signifikan;
4. Seleksi yang merupakan proses memilih item-item yang menarik yang dapat mewakili argumentasi peneliti;
5. Rangkuman yang merupakan ringkasan dari keseluruhan data;
6. Telaah data secara deduktif dan induktif;
7. Merumuskan kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

a. Sejarah Pendirian

Berawal dari kegelisahan atas banyaknya problematika penegakan hukum di Indonesia, terutama adanya tuntutan untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak telah mendorong beberapa dosen inisiator untuk membuka klinik hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Klinik hukum tersebut dirancang untuk menjadi wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dan peningkatan akses masyarakat kepada keadilan, serta sekaligus menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.¹

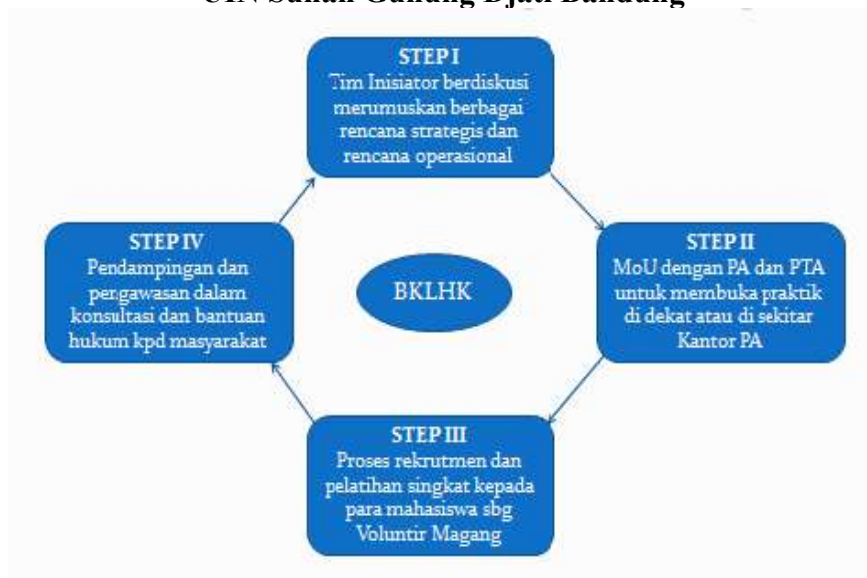
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada keadilan (*access to justice*), khususnya kalangan masyarakat miskin, perempuan, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas terhadap pelayanan konsultasi dan bantuan hukum (*legal aid service*), yang berkaitan dengan akses terhadap identitas hukum (akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai), tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pula kalangan akademisi di Perguruan Tinggi.

¹ Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, beberapa dosen ahli yang mengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan studi pendahuluan tentang bagaimana menjalin kerjasama antara pihak universitas dengan lembaga pengadilan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam merancang program pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas.

Seperti halnya beberapa Fakultas Hukum pada perguruan terkemuka lainnya yang sudah terlebih dahulu memiliki Klinik Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum juga berupaya mengembangkan Klinik Hukum. Namun pola yang dikembangkan memiliki kekhususan tersendiri, yakni lebih difokuskan kepada penyelesaian perkara-perkara perdata Islam, seperti: Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Perikatan Islam, dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Hal ini menjadi langkah awal untuk merintis pendirian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Tahapan Rintisan dan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum
Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Berdasarkan hasil pelacakan terhadap sejumlah dokumen akademik dan non akademik, peneliti dapat menjelaskan proses dan tahapan pendirian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan melalui beberapa fase sebagai berikut:²

1) Tahun 2010: Fase Perintisan

Pada fase ini, para inisiator yang terdiri dari para dosen, praktisi hukum, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beberapa dosen yang mengampu Mata Kuliah Hukum Acara dan Kemahiran Hukum melakukan sejumlah kegiatan diskusi intensif dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menyusun rencana strategis dan rencana aksi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas.³

Perintisan yang dimaksud mencakup atas penjaringan nama-nama dosen ahli yang nantinya akan bertindak sebagai pengelola, pembimbing, dan konsultan ahli. Pada pelaksanaannya, para dosen juga melibatkan beberapa alumni yang sudah aktif menjadi advokat atau pengacara. Selain itu, dalam FGD tersebut juga dilibatkan para mahasiswa senior yang sudah lulus praktikum peradilan dan telah memiliki kecakapan hukum yang cukup memadai dalam menangani berbagai perkara.

Diskusi-diskusi intensif juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Praktik Peradilan (*Moot Court Community*). Dalam diskusi tersebut, para dosen dan mahasiswa mendiskusikan berbagai teori dan praktik kepengacaraan, mulai dari tahapan-

² Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

³ Tim Inisiator dari kalangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. H. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Dr. Deni K. Yusup, M.Ag, H. Burhanudin Hamnach, S.Ag, MH) sedangkan dari kalangan mahasiswa adalah Riyan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah.

tahapan teknis dalam memberikan konsultasi hukum hingga memberikan pendampingan hukum terhadap klien, serta cara menangani berbagai perkara baik melalui upaya hukum non litigasi dan litigasi.

Melalui diskusi-diskusi yang cukup intensif di atas, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2010 terumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rancangan Renstra dan Renop tersebut sekaligus menjadi konsep dasar untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2) Tahun 2011: Fase Penjajakan

Sesuai dengan Renstra dan Renop yang telah disusun sebelumnya, pada tanggal 12 Juni 2011, Tim Inisiator melakukan penjajakan ke beberapa Pengadilan Agama di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat, seperti: Pengadilan Agama Kota Bandung, Pengadilan Agama Cimahi/Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Bekasi, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Purwakarta, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan Agama Kuningan, dan Pengadilan Agama Cirebon.⁴

Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang membuka pelayanan Pos Bantuan Hukum diharuskan yang berdomisili sama dengan pengadilan

⁴ Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

setempat. Akhirnya, peluang untuk menjalin kerjasama menyelenggarakan Klinik Bantuan Hukum tidak dapat dilakukan dengan semua Kantor Pengadilan Agama di Jawa Barat, terkecuali apabila menjalin kemitraan dengan Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah pada Perguruan Tinggi setempat.

Dalam perkembangannya, tepatnya bulan Agustus 2011, Tim Inisiator hanya berhasil menjalin kerjasama untuk membuka Kantor Pelayanan Klinik Bantuan Hukum dengan Pengadilan Agama Sumedang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumedang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terdekat dengan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung selain Pengadilan Agama Kota Bandung, Pengadilan Agama Cimahi-Kabupaten Bandung, dan Pengadilan Agama Subang.

Selama melakukan kerjasama tersebut disepakati beberapa bentuk perjanjian, misalnya batasan-batasan bagi dosen dan paralegal mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien dalam lingkup Pengadilan Agama. Misalnya, paralegal mahasiswa hanya dapat membantu klien dalam beberapa aspek saja, seperti: membantu membuat surat gugatan atau surat permohonan, surat kuasa, melengkapi dokumen-dokumen pendukung pengajuan perkara, berikut mendaftarkan surat gugatan atau surat permohonan ke Kantor Pengadilan, dan tidak sampai mendampingi klien secara langsung untuk berperkara di persidangan.

Demikian pula para dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya dapat memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum di luar lingkup pengadilan, terkecuali khusus bagi dosen yang berstatus Non PNS (praktisi atau advokat) dibolehkan mendampingi klien secara langsung untuk berperkara di persidangan. Hal ini disebabkan masih adanya silang pendapat berkenaan dengan perizinan Dosen PNS untuk melakukan praktik bantuan hukum dan beracara dalam mendampingi klien di pengadilan.

3) Tahun 2012: Fase Penguatan

Setelah dilakukannya kerjasama dengan Pengadilan Agama Sumedang, sekitar pertengahan Agustus 2012, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati membuka kantor dengan cara menyewa di depan Kantor Pengadilan Agama Sumedang. Dana awal untuk menyewa gedung dan membeli seperangkat Komputer, Printer, Meja, Kursi, dan Alat Tulis Kantor lengkap sama sekali tidak dibiayai oleh Fakultas dan Universitas, melainkan “murni” diperoleh dari sumbangan dana mandiri para Dosen Inisiator. Secara kasat mata, hal ini merupakan “langkah awal yang berat” untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dapat mengabdikan kepada masyarakat.⁵

Dalam Buku Profil Klinik Bantuan Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditulis bahwa tanggal 1 September 2012 merupakan “titik awal” bagi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung membuka pelayanan secara resmi dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum keluarga kepada masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Sumedang.

Di luar dugaan sebelumnya, sejak dibukanya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Sumedang, ternyata jumlah klien yang datang sangat banyak. Bahkan ketersediaan dua orang paralegal mahasiswa yang magang di sana dan dua orang dosen konsultan tidak sanggup lagi menangani banyaknya klien yang membutuhkan pendampingan. Tercatat dalam Laporan Tahunan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ada 20-35 klien yang datang setiap hari kerja (Senin – Jum'at, Jam 08.00-16.00).

⁵ Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

Akhirnya, para Dosen Inisiator merekrut lagi beberapa mahasiswa tingkat akhir untuk menjadi paralegal agar dapat dilakukan rotasi tugas. Alasannya, jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan waktu perjalanan sekitar 2,5 Jam dari Bandung menuju Sumedang juga menjadi kendala utama bagi paralegal mahasiswa dan para dosen konsultan untuk saling bergiliran tugas melayani para klien di wilayah kerja Pengadilan Agama Sumedang.

Perkara-perkara yang ditangani pada umumnya adalah hukum perdata Islam, seperti: hukum perkawinan, hukum waris dan wasiat, hukum wakaf, hibah, dan shadaqah, serta sengketa ekonomi syari'ah. Berdasarkan catatan Laporan Tahunan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kebanyakan perkara yang ditangani adalah perkara perdata Islam, seperti: perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, istbath nikah, dan lain-lain.

4) Tahun 2013: Fase Pengembangan

Selama tahun 2012-2013, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah merilis dalam laporan tahunannya, bahwa para mahasiswa senior yang magang di KBHU telah banyak mampu membantu dan mendampingi penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2493 kasus (Tahun 2013) dan 2171 kasus (Tahun 2014).⁶

Berdasarkan pengalaman tersebut, sekitar Juni 2013 dilakukanlah upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup wilayah kerja Pengadilan Agama Subang. Hal ini dilakukan setelah beberapa paralegal

⁶ Lihat Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

mahasiswa senior telah lulus studi dan juga lulus dalam Pendidikan Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PPA PERADI).⁷

Selama memberikan pendampingan kepada klien, para dosen pembimbing pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga terus berupaya mendidik dan melatih para mahasiswa calon-calon paralegal dalam komunitas praktik peradilan (*moot court community*).⁸ Lebih dari itu, para dosen pembimbing juga melakukan pengawasan secara bergiliran untuk mendampingi para mahasiswa yang menangani perkara-perkara yang dianggap cukup rumit.

Sejak tahun 2013 hingga 2015 terjalin suatu kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Ada beberapa nama yang sangat berperan, yaitu: Cate Sumner, Peter De Meij, Wahyu Widiana, dan Nurkholis Hidayat menjadi perwakilan dari AIPJ yang paling banyak membantu pengembangan program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia. Kemudian H. Soeroso Ono, SH, MH (Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Drs. H. Poerwo Susilo, SH, MH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta Prof. Dr. H. Amsal Bahtiar (Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia).

Adanya kerjasama mengembangkan Program Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut, direspon positif oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yakni dalam rangka memenuhi hak akses yang lebih luas kepada keadilan bagi masyarakat, beberapa Perguruan Tinggi

⁷ *Ibid.*

⁸ Komunitas Praktik Peradilan (*Moot Court Community*) terbentuk pada bulan Juni 2013 merupakan sekumpulan mahasiswa yang berada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dibina dan dibimbing oleh para Dosen Pembimbing Ahli dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang hukum.

yang memiliki Klinik Bantuan Hukum dapat membuka pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)⁹ di beberapa Kantor Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBHU Fakultas Syari'ah dan Hukum membuka pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Cirebon, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Cianjur, dan Pengadilan Agama Depok.

Di samping itu, seiring dengan kebijakan pengembangan kelembagaan, ada dua Program Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melaksanakan pembelajaran Klinik Hukum, yaitu Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) dan Ilmu Hukum. Akhirnya sekitar Agustus 2013, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum saat itu, Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si menetapkan "kebijakan populis",¹⁰ yaitu pengelolaan Klinik Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) lebih difokuskan pada penanganan perkara-perkara perdata dan hukum keluarga Islam yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) melalui Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) yang berkantor di Gedung Fakultas, Pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Agama Subang. Sedangkan pengelolaan Klinik Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum lebih bersifat umum mencakup penanganan semua jenis perkara, baik perdata maupun pidana secara litigasi dan non litigasi, yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBKH) yang berkantor di Gedung Fakultas.

⁹ POSBAKUM merupakan pelayanan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat dan Paralegal Mahasiswa kepada semua klien yang tidak mampu dengan dukungan sumber dana yang berasal dari Pemerintah (DIPA Mahkamah Agung dan BPHN).

¹⁰ Kebijakan populis yang dimaksud adalah meskipun Program Studi Hukum Keluarga dan Ilmu Hukum berada di bawah Fakultas Syari'ah dan Hukum, namun kedua Program Studi tersebut memiliki standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang sedikit berbeda. Atas dasar itu, Dekan menetapkan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan program unggulan yang dilembagakan menjadi dua bentuk, yakni BKLHK berada di bawah Program Studi Hukum Keluarga dan LBKH berada di bawah Program Studi Ilmu Hukum.

Saat itu, yang bertindak sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag dan Sekretaris Program Studi H. Burhanudin Hamnach, MH. Sedangkan BKLHK dipimpin oleh Dr. H. Ramdani Wahyu Susurie, M.Ag, M.Si yang dibantu oleh beberapa Dosen Konsultan, yaitu Dr. Deni K. Yusup, M.Ag,, Dr. Hj. Siah Khosi'ah, Harry Yuniardi, M.Ag., berikut dua orang advokat junior yang sudah memiliki Kartu Anggota PERADI, yaitu Riyan Ramdani, S.Sy, Zeni Hamdadin, S.Sy dan Dadan, S.Sy.

Sedangkan yang menjadi Ketua LKBH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah Wawan Muhwan Hariri, SH, MH dan Sekretarisnya Ende Hasbi Nazarudin, SH, MH). Keduanya dibantu pula oleh tiga orang Dosen Konsultan, yaitu: Dr. H. Utang Rasyidin, SH, MH, Dr. H. Uu Nurul Huda, SH, MH, dan Dewi Mayaningsih, SH, MH, serta dibantu pula seorang Staf yaitu Jamaludin, SH, MH.



Cate Sumner dan Hilda Suherman (Perwakilan AIPJ) saat mengunjungi Kantor BKLHK FSH UIN SGD Bandung di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2014

Berdasarkan kepada uraian dan gambar di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didirikan sebagai wadah untuk magang bagi para dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) yang didirikan atas dasar kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

b. Dasar Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Klinik Bantuan Hukum Universitas pada dasarnya menjadi bagian dari program magang kerja dan implementasi dari praktik keahlian mahasiswa yang memiliki bobot 2 SKS. Mata Kuliah Praktik Keahlian merupakan kompetensi utama yang wajib diambil oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan wajib pula mengikuti program magang kerja. Dengan kata lain, magang kerja pada Klinik Bantuan Hukum Universitas ini bukan hanya sekedar pelaksanaan praktik keahlian mahasiswa, tapi juga sarana pembelajaran bagi mahasiswa mengenal dunia kerja dengan lebih dekat.

Subtansi dari kegiatan magang kerja ini sasarannya adalah mahasiswa yang berada di Semester VII. Setelah melalui proses lulus pada beberapa mata kuliah yang disyaratkan, selanjutnya mahasiswa dapat melakukan magang kerja di instansi/lembaga yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa. Tujuan kegiatan praktik keahlian Klinik Bantuan Hukum Universitas ini meliputi tiga aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif, psikomotorik dan juga mengasah keterampilan (*soft skill*) mahasiswa.

Dasar hukum penyelenggaraan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 7) Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/06361 Tanggal 06 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 8) Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: Un.05/II.2/ KP.07.6/151/2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
- 9) Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: Un.05/II.2/ KP.07.6/168/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Penyelenggaraan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan sesuai dengan Visi Fakultas Syari'ah dan Hukum, yaitu *Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif*¹¹ di Bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum,

¹¹ Penjelasan mengenai arti **Unggul**. Maksudnya senantiasa mengusahakan keunggulan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan fakultas dalam menunjang penyediaan perkuliahan yang berkualitas; Memiliki kelebihan dalam kekokohan iman,

*dan Ilmu Ekonomi Syari'ah Berbasis Wahyu*¹² *Memandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah di ASEAN Tahun 2025*.¹³

Sedangkan misi Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
- 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;
- 4) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan civitas akademika.

keluasan ilmu, kemuliaan akhlak dan keunggulan amal. **Kompetitif** maksudnya Lulusan/alumni yang dihasilkan adalah sarjana yang dapat diandalkan dalam implementasi keilmuan yang telah dipelajari, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dalam bidang ilmu Syari'ah, ilmu Hukum dan ilmu Ekonomi Syari'ah. Statuta UIN Nomor 14 Tahun 2015 dan RENSTRA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung Tahun 2012. Lihat lampiran SK Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹² Paradigma wahyu memandu ilmu merupakan *platform* pengembangan berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang disusun secara sistematis dan komprehensif oleh para pakar keilmuan yang tergabung dalam Tim Konsorsium UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mempertimbangkan kelebihan (ekselensi) dan pembeda (distingsi) dengan perguruan tinggi lainnya. Semua dokumen otentik yang terkait dengan pemetaan berbagai disiplin ilmu dan kelembagaan dapat dilihat dalam Buku Paradigma Wahyu Memandu Ilmu UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2010.

¹³ Statuta UIN Tahun 2010 dan RENSTRA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung Tahun 2012 yang disempurnakan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Adapun tujuannya juga mengacu kepada tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu:¹⁴

- 1) Terselenggaranya pendidikan tinggi pada jenjang sarjana dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
- 2) Terselenggaranya proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- 3) Terselenggaranya kegiatan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;
- 4) Terbentuknya lulusan yang berakhlak karimah, berintegritas, terampil, inovatif, profesional, berdaya saing, dan berjiwa *entrepreneurship* dalam bidang Ilmu Syari'ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan strategi pencapaian. Strategi pencapaian disusun sebagai *road map* yang berkesinambungan sehingga visi, misi, dan tujuan dapat tercapai pada tahun yang telah ditetapkan. Adapun tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahap Integrasi (2015-2016) yaitu tahap konsolidasi semua komponen fakultas melalui pendataan dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki. Dari data awal ini kemudian disusun rencana strategis dan rencana operasional yang dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian visi dan pelaksanaan misi;

¹⁴ Lihat Profil Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- 2) Tahap Kompetitif (2017-2018) yaitu tahap meningkatkan kualitas pendidikan/pengajaran berbasis riset untuk mencapai keunggulan (*excellence*). Tahap ini ditandai dengan tercapainya akreditasi semua prodi dengan hasil maksimal A, meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik tenaga dosen dan tenaga kependidikan, meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tahap Unggul (2019-2020) yaitu tahap pencapaian fakultas yang unggul dalam arti memiliki daya saing tinggi karena menjadi fakultas terdepan (*leading faculty*) dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu syari'ah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi syariah;
- 4) Tahap Internasionalisasi (2021-2025) yaitu tahap pencapaian fakultas yang unggul dan kompetitif serta berdaya saing nasional dan internasional minimalnya di tingkat ASEAN baik dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu syari'ah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa tujuan paling spesifik dari Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada visi, misi, dan tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu: pertama, memperkuat peran perguruan tinggi dalam program klinik bantuan hukum; kedua, memberikan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat aktif program klinik bantuan hukum; dan ketiga, memperkuat kemitraan perguruan tinggi dengan pengadilan dan lembaga sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

c. Manajemen dan Tata Kelola Organisasi

Dilihat dari segi manajemen dan struktur organisasi kelembagaannya, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki banyak kesamaan dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada umumnya, yakni terdiri dari Penanggung Jawab Umum, Penanggung Jawab Pelaksana, Para Konsultan, dan Pelaksana Harian. Penanggung Jawab langsung berada di tangan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, sedangkan Penanggung Jawab Pelaksana berada di tangan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Sedangkan Konsultan terdiri atas para dosen ahli yang memiliki tugas untuk membina dan membimbing para mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien, termasuk melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan. Adapun pelaksana harian terdiri atas sejumlah dosen dan mahasiswa magang yang sehari-hari memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada para klien di lapangan.



Jennifer Lindstrom (Perwakilan AIPJ) saat melakukan peninjauan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh para mahasiswa magang di BKLHK FSH UIN SGD Bandung Tahun 2014

Pada fase awal pembentukannya, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan beberapa kebijakan manajemen organisasi sebagai berikut:

1) Legalitas Organisasi

Penataan aspek legalitas organisasi diatur berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas dan Surat Keputusan Rektor. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas agar mendapatkan payung hukum yang cukup kuat sebagai Lembaga Non Struktural di bawah naungan Fakultas/Universitas.

2) Kebijakan Akademik

Kebijakan akademik yang dimaksud di sini adalah memasukan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah yang memiliki Bobot Praktikum 2 SKS ke dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3) Kebijakan Pembelajaran

Kebijakan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah Wajib diambil dan memiliki bobot Praktikum 2 SKS, serta masuk ke dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4) Kebijakan Jenjang

Kebijakan jenjang yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa di Semester 6 bersamaan dengan dilaksanakannya Praktikum Peradilan.

5) Kebijakan Pembatasan

Kebijakan pembatasan yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai program kuliah tambahan yang dapat diikuti oleh para mahasiswa di Semester 1-5 yang bergabung ke dalam Komunitas Mourt Court (*Moot Court Community*);

6) Kebijakan Bersyarat

Kebijakan bersyarat yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai program magang kerja di

LBKH-BKLHK yang hanya dapat diikuti oleh para mahasiswa yang sudah lulus Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktikum Keahlian.

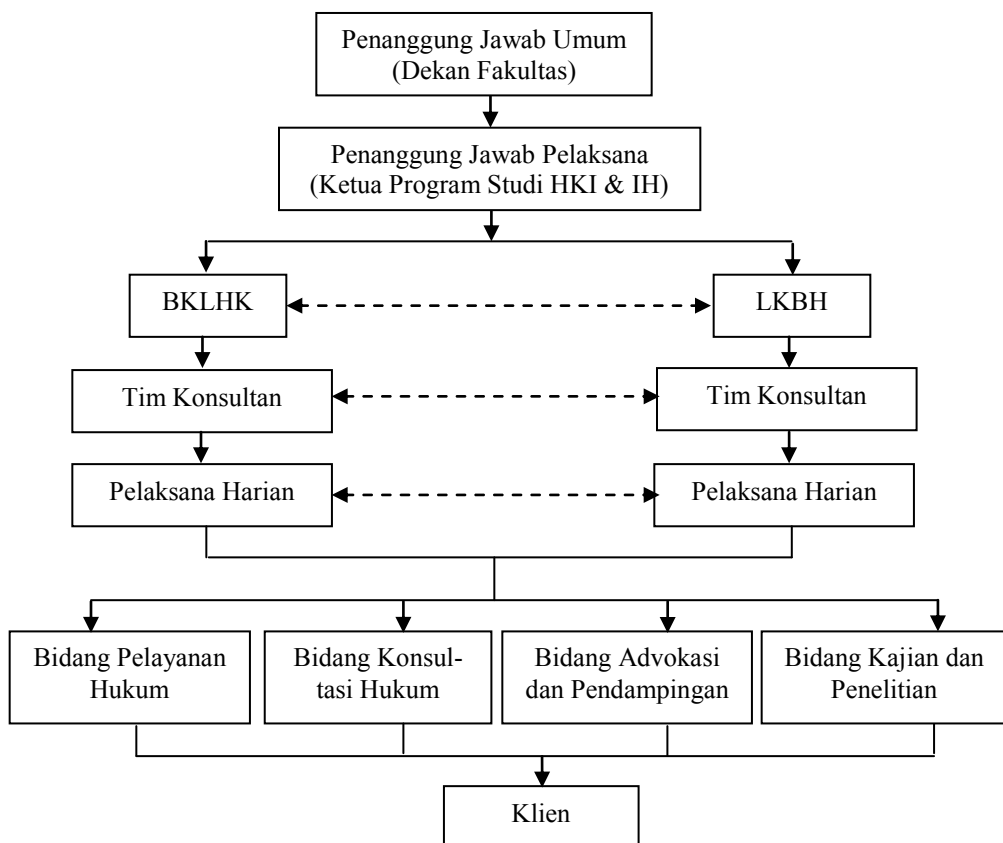
7) Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas menggunakan alokasi dana yang bersumber dari Donatur (Sponsorship) dan sebagiannya berasal dari Dana Praktikum Non SPP yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dilihat dari segi struktur organisasi, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BKLHK-LBKH FSH UIN SGD Bandung



Seperti halnya konsep pengorganisasian, masing-masing tentu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Prinsip umum yang digunakan di Majelis Ta'lim Khoirunnisa adalah menempatkan orang pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa Penanggung Jawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:¹⁵

1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pembinaan dan arahan terhadap segala bentuk kebijakan organisasi dan pelaksanaan program kerja;
- b) Memberikan supervisi dan pengawasan dalam setiap bentuk pelaksanaan program kerja;
- c) Mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat umum terkait dengan kebijakan organisasi.

2) Tim Konsultan (Dosen)

Tim Konsultan memiliki tugas dan fungsi membantu Ketua Dewan Pembina dalam hal:

- a) Memberikan pembinaan dan arahan terhadap segala bentuk kebijakan organisasi dan pelaksanaan program kerja;
- b) Memberikan supervisi dan pengawasan dalam setiap bentuk pelaksanaan program kerja;
- c) Mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat umum terkait dengan kebijakan organisasi.

¹⁵ Hasil pengamatan dan wawancara dengan Ramdani Wahyu, Wawan Muhwan Hairi, Ende Hasbi, Riyan Ramdani dan Jamaludin – Pengelola BKLHK dan LBKH yang turut merintis pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil wawancara tanggal 12 Juli 2016.

Demikian pula dengan Tim Pelaksana Harian terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Ketua

Ketua memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan staf pengurus lainnya;
- b) Bertanggungjawab penuh terhadap semua kelangsungan jalannya roda keorganisasian;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong dengan melibatkan seluruh pengurus mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya;
- d) Menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan peran aktif pengurus dalam membina kehidupan lingkungan yang aman, rukun, damai, tertib, disiplin, bersih, dan sehat secara gotong royong antar sesama pengurus;
- e) Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program kerja masing-masing seksi dalam struktur organisasi;
- f) Mengkoordinasikan melaksanakan tugas dan program kerja seluruh pengurus yang ada dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh pengurus;
- g) Bersama-sama dengan pengurus lainnya, menampung dan menyampaikan aspirasi jamaah kepada berbagai organisasi sejenis dalam memecahkan masalah-masalah hukum, sosial dan kemasyarakatan;
- h) Memimpin delegasi organisasi dalam melakukan hubungan/kerjasama dengan pihak luar;

- i) Melakukan reshuffle/rotasi kepengurusan organisasi jika dianggap perlu.
- j) Menyampaikan laporan tahunan pencapaian program kerja organisasi secara tertulis.

2) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Mengelola keseluruhan sistem administrasi kesekretariatan organisasi, surat-menyurat, dan kearsipan baik kedalam maupun keluar, serta tata kelola barang inventaris milik organisasi;
- c) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Ketua;
- d) Bekerja sama dengan pengurus organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemutakhiran data kependudukan warga secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali;
- e) Membantu, mendampingi, dan mewakili Ketua dalam hal melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai keperluan;
- f) Menyampaikan laporan tahunan pencapaian program kerja secara tertulis kepada Ketua.

3) Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Mengelola administrasi dan *cash flow* keuangan dalam rangka mendukung seluruh kegiatan;
- c) Membuat rencana usaha pemasukan baik pasif dan aktif sebagai sumber dana seluruh kegiatan organisasi;

- d) Berkoordinasi dengan pengurus organisasi dalam hal menetapkan rencana dan alokasi anggaran belanja;
- e) Mengelola seluruh pemasukan yang berasal dari jamaah dan usaha lainnya berikut pengeluarannya untuk digunakan secara professional, proporsional, transparan, akuntabel, dan auditabel;
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan kepada Ketua dan seluruh pengurus.

4) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma;
- c) Memberikan pelayanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- d) Memberikan pelayanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
- e) Memberikan pelayanan informasi hukum melalui TELEPON untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan.

5) Bidang Konsultasi Hukum

Bidang Konsultasi Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;

- b) Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada para pihak dan pihak potensial yang sedang berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu secara cuma-cuma;
 - c) Memberikan pelayanan konsultasi hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - d) Memberikan pelayanan konsultasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
 - e) Memberikan pelayanan konsultasi hukum melalui TELEPON untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan.
- 6) Bidang Advokasi dan Pendampingan Hukum
- Bidang Advokasi dan Pendampingan Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
 - b) Memberikan pendampingan hukum kepada para pihak dan pihak potensial yang sedang berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu secara cuma-cuma;
 - c) Memberikan pendampingan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - d) Memberikan pendampingan hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro dan pengadilan.
- 7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- Bidang Pendidikan dan Pelatihan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum;
- c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
- d) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara perkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- e) Menjalin kemitraan/kerjasama dengan lembaga terkait dalam bidang penegakan hukum.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa secara umum dilihat dari segi struktur organisasi, kelembagaan, dan tata kelola organisasinya, Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara prinsip berada di bawah tanggung jawab Dekan, namun secara kelembagaan BKLHK berada di bawah Program Studi Hukum Keluarga dan LBKH berada di bawah Program Studi Ilmu Hukum. Namun secara teknis, keduanya melaksanakan program kerja secara sinergis dan saling bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Program Kerja

Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didirikan atas dasar idealisme untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut didasari oleh adanya kesadaran dan tanggung jawab moral kalangan akademik di Perguruan Tinggi untuk mengabdikan kepada masyarakat. Kehadiran para dosen dan paralegal mahasiswa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat tentunya diharapkan

memberikan kontribusi positif dalam memenuhi persamaan hak di depan hukum dan keadilan. Semangat ini merupakan implementasi dari salah satu doktrin hukum Islam, yakni melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Oleh karena itu, program kerja yang disusun dan dilaksanakan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didasarkan kepada landasan yuridis, religiousitas, dan kepedulian sosial. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui ada beberapa program yang akan dan telah dilaksanakan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Perencanaan pendidikan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:¹⁶

1) Program Pelayanan Hukum

a) Pelayanan Hukum Oleh Dosen:

- Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat ;
- Dosen memberikan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat, para pihak yang berperkara, potensial pihak untuk memberikan jasa konsultasi hukum, baik hukum perkawinan, hukum waris, dan sebagainya;
- Dosen memberikan layanan informasi hukum melalui telepon dalam bentuk konsultasi hukum dan mahasiswa memberikan jasa hukum melalui telepon mengenai mekanisme berperkara di pengadilan.

b) Pelayanan Hukum oleh Mahasiswa:

- Mahasiswa di bawah pengawasan dosen memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

¹⁶ Hasil pengamatan dan wawancara dengan Ramdani Wahyu, Wawan Muhwan Hairi, Ende Hasbi, Riyan Ramdani dan Jamaludin – Pengelola BKLHK dan LBKH yang turut merintis pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil wawancara tanggal 12 Juli 2016.

- Mahasiswa memberikan layanan penyusunan gugatan, replik dan duplik untuk para pihak yang akan berperkara di pengadilan agama;
 - Mahasiswa memprioritaskan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin;
 - Biaya penyediaan layanan hukum diberikan secara sukarela.
- 2) Program Konsultasi Hukum
- a) Penanggung Jawab: Dosen melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan keahlian masing-masing;
 - b) Bentuk konsultasi hukum disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 - c) Ruang lingkup konsultasi berkaitan dengan hukum Islam dan kewenangan absolut pengadilan.
- 3) Program Advokasi dan Bantuan Hukum
- a) Penanggung Jawab: Advokat sebagai pelaksanaan bantuan hukum;
 - b) Bentuk kegiatan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat;
 - c) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari semua biaya perkara.

Tabel 4.1
Program Kerja Klinik Bantuan Hukum Universitas
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan	Tujuan dan Sasaran
1	Pelayanan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Semua bentuk pelayanan hukum	Klien
2	Konsultasi Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Prosedur tata cara berperkara di pengadilan dan Pelayanan Call Center	Klien

3	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Memberikan jasa advokasi, mediasi, pendampingan hukum	Klien
4	Pendidikan dan Pelatihan Hukum	Kondisional	Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan hukum	Mahasiswa dan Klien

Mengacu kepada gambaran di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak atas hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki buku petunjuk dan pedoman operasional pelaksanaan program kerja, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, advokasi dan pendampingan hukum, serta pendidikan dan pelatihan, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

e. Rekam Jejak Penanganan Perkara

Mengacu kepada *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013-2014*, paralegal mahasiswa yang melakukan magang pada BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah banyak membantu penanganan dan penyelesaian perkara yang sangat bervariasi. Perkara-perkara yang diajukan masyarakat (*klien*) dan ditangani oleh BKLHK pada umumnya merupakan jenis perkara perdata (hukum keluarga Islam).¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun, *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013-2014*, (Bandung: BKLHK-FSH UIN SGD Bandung, 2013).

Adapun kondisi obyektif yang dihadapi oleh BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung antara lain:

- 1) Pencarian akses data perkara internal masih bersifat *manual data base*, tapi akses penyelesaian perkara di pengadilan lebih mudah dan sudah *electronic based data online*;
- 2) Semua instrumen pendampingan dalam bentuk form identitas diri, jenis perkara, SOP, dan brosur-brosur informasi bagi para pihak tersedia secara manual;
- 3) Data konsultasi dan bantuan hukum dilakukan secara langsung oleh 2-4 mahasiswa dan 1 dosen pendamping di setiap hari kerja (Senin-Jum'at Pukul 08.00-16.00);
- 4) Perkara yang ditangani pada umumnya non litigasi di bidang hukum keluarga, sedangkan litigasi ditangani secara langsung oleh pengacara profesional yang ditunjuk.

Selama tahun 2013, tercatat sebanyak 2493 kasus yang telah ditangani dan tahun 2014 tercatat sebanyak 2171 kasus di Pengadilan Agama Sumedang, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Rekam Jejak Penanganan Perkara BKLHK
FSH UIN SGD Bandung Tahun 2013

Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Itsbat Nikah Voluntair (suami & Isteri)	Itsbat Nikah Kontensius (Isteri)	Itsbat Nikah Kontensius (Suami)	Jumlah Perkara Lain
Januari	36	243	3	5	2	12
Pebruari	50	88	4	6	2	6
Maret	55	112	1	4	-	7
April	74	125	2	4	1	8
Mei	81	127	3	4	2	6
Juni	42	101	2	7	3	4
Juli	36	85	3	4	1	6
Agustus	32	100	-	3	-	4
September	80	124	4	5	3	8
Oktober	50	131	2	4	1	8
November	60	156	21	9	8	6
Desember	141	157	1	2	-	6
TOTAL	737	1549	46	57	23	81
PERCENTATION	29.56 %	62.14 %	1.85 %	2.28 %	0.92 %	3.25 %

Tabel 4.3
Rekam Jejak Penanganan Perkara BKLHK
FSH UIN SGD Bandung Tahun 2014

Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Itsbat Nikah Voluntair (Suami & Isteri)	Itsbat Nikah Kontensius (Isteri)	Itsbat Nikah Kontensius (Suami)	Jumlah Perkara Lain
Januari	55	110	1	2	1	5
Pebruari	56	137	1	1	3	4
Maret	38	98	2	5	2	3
April	62	154	1	5	1	4
Mei	51	115	3	3	3	5
Juni	45	137	2	3	3	5
Juli	14	27	3	3	-	3
Agustus	81	154	1	5	-	4
September	50	152	3	5	-	8
Oktober	56	138	4	4	2	4
November	52	104	2	1	1	-
Desember	39	121	4	3	1	2
TOTAL	599	1.447	27	34	17	47
PERCENTATION	27,60 %	66,65 %	1,25 %	1,56 %	0,78 %	2,16 %

Tabel 4.4
Rekam Jejak Capaian Kinerja BKLHK
FSH UIN SGD Bandung Tahun 2013-2014

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Layanan membuat surat gugatan, permohonan, jawaban dan atau eksepsi	4423 berkas	Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 100 berkas surat gugatan dan permohonan
2	Layanan bantuan hukum melalui advokat	58 perkara	Rata-rata 2 perkara dalam satu bulan
3	Layanan informasi hukum berupa pengayaan wawa-san kesadaran hukum	10 kali	Dilakukan rata-rata satu kali dalam satu bulan
4	Layanan memberikan pe-nyuluhan berupa legal identity	24 kali	Dilakukan satu kali dalam satu bulan
5	Layanan informasi hukum melahui telepon	74 kali	Rata-rata 3 orang setiap bulan yang meminta informasi
5	Konsultasi hukum	27 kali	Rata-rata 2 orang dalam satu bulan

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan program kerjanya, yaitu: (1) masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa masih rendah untuk menjadi pementor dan voluntir di Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan (2) masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi. Namun demikian, BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan beberapa solusi sebagai berikut: (1) mendorong para dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas; (2) memperkuat regulasi keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas; (3) menjalin kemitraan dengan semua lembaga terkait; dan (4) meminta dukungan pihak pemerintah dan pimpinan Universitas/Fakultas untuk mengoptimalkan peran dan keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas.

2. Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

a. Sejarah Pendirian

Monash University didirikan tahun 1960 untuk memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi bagi para siswa yang tinggal di pinggiran Kota Timur Selatan Melbourne di Negara Bagian Victoria, Australia. Kampus Pertama Monash University didirikan di daerah Clayton yang memiliki julukan yang khas yaitu "Pertanian" (*The Farm*), yang lama kelamaan terus mengalami perkembangan yang semakin pesat. Kampus terkenal lainnya yang ada di Negara Bagian Victoria adalah Melbourne University yang kini lebih dikenal dengan sebutan "Toko" (*The Shop*).¹⁸

¹⁸ Disarikan dari petikan wawancara dengan Professor Malcolm Bennett, (Direktor Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne, Australia) pada bulan Agustus 2016.

Sejak awal, Monash University telah tumbuh secara dramatis hingga sekarang. Kampus tersebut telah menghiasi kawasan di sekitar negara bagian Victoria, Australia, dan dunia. Bahkan Monash University saat ini telah menjelma menjadi salah satu universitas terbesar di dunia yang disebabkan banyaknya mahasiswa yang studi di sana dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, agama, dan negara. Sedangkan Faculty of Law Monash University berbasis di Kampus Clayton yang didirikan bersamaan dengan fase awal berdirinya.

Faculty of Law Monash University Melbourne selalu memiliki komponen pendidikan hukum praktis di mana para mahasiswa melakukan pendidikan hukum praktis sebagai subjek elektif. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, ada dua tempat bagi para mahasiswa dapat memperoleh berbagai pengalaman di bidang kemahiran hukum, yaitu:

Pertama yaitu *Monash Oakleigh Legal Service (MOLS)* yang terletak di jalan perbatasan ke Monash University di wilayah Clayton. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan sekitar 3 menit berjalan kaki melalui pintu belakang MOLS ke Gedung Faculty of Law Monash University. MOLS pada awalnya bertempat di sebuah rumah tua di lokasi yang sama tetapi kira-kira 11 tahun yang lalu, didirikanlah bangunan tersebut sebagai situs terdahulu. Sementara pada MOLS, para mahasiswa dapat memperoleh berbagai pengalaman praktis di sebagian besar wilayah hukum Victoria.

Sedang yang kedua adalah *Springvale Monash Legal Service (SMLS)* yang berada di pinggiran terdekat sekitar 4 kilometer dari Faculty of Law Monash University. "Springvale" sebagian didanai dan dikelola oleh Faculty of Law Monash University dan sebagian lainnya didanai dan dikelola oleh negara bagian Victoria (*Victoria Legal Aid Service, VAIS*). SMLS ini menawarkan program serupa untuk MOLS.

Monash-Oakleigh Legal Service (MOLS) dikembangkan dari *Monash Legal Service (MLS)*, yang menawarkan nasihat hukum kepada mahasiswa Monash University di sebuah kamar di Gedung Law School pada 1970-an. Pada tahun 1979, layanan mulai melibatkan siswa terdaftar dalam kursus Praktek Profesional dan untuk melayani masyarakat serta mahasiswa. Operasi diperluas mengambil alih tempat rumah mantan imam di Normanby yang berada di sisi Utara Universitas.

Pendiri MOLS, Guy Powles, merasa perlu untuk segera mencari tempat yang lebih besar dan lebih baik terletak yang akan lebih mungkin untuk menarik anggota masyarakat yang membutuhkan. Universitas Wakil Rektor menyediakan sebuah rumah staf yang dimodifikasi dan diperbesar untuk memberikan ruang wawancara dan untuk memenuhi persyaratan dari praktik hukum. MOLS juga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas nasihat hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat sekitarnya dan orang-orang yang menghadiri dan bekerja di Monash University¹⁹

Tempat yang dimiliki saat ini ada di 60 Beddoe Road Clayton, di luar perbatasan Barat dari University, berlokasi dekat dengan transportasi umum. Bangunan ini dibuka pada tahun 1998 oleh Hakim Ketua Victoria, Phillips CJ. Selanjutnya pada tahun 1983, *Monash-Oakleigh Legal Service* menjadi sebuah badan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Badan Hukum Tahun 1981.

Pada tahun 1999, sebuah proposal diajukan oleh MOLS ke VAIS untuk kebutuhan pendanaan. Proposal tersebut diajukan oleh Faculty of Law Monash University kepada Pemerintah Federal Australia untuk membuat Program Pendidikan Klinik Hukum (*University Legal Clinic Education*) yang khusus menangani perkara-perkara hukum keluarga.

¹⁹ Editor, "History and Backgorund of *Monash-Oakleigh Legal Service Monash University*" dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_history.php diakses 18 Agustus 2016.

Dalam proposal tersebut diusulkan bahwa mahasiswa akan mendapatkan berbagai pengalaman dalam membantu para klien yang menghadapi masalah-masalah hukum keluarga. Setelah proposal tersebut diterima oleh Pemerintah Federal Australia, selanjutnya Program Pendidikan Klinik Hukum (*University Legal Clinic Program*) ini berbasis di *MOLS Faculty of Law Monash University*.

Pada awalnya, Program Pendidikan Klinik Hukum MOLS Faculty of Law Monash University hanya memberikan jenis pelayanan hukum untuk membantu klien dalam lingkup "workshop". Namun Pemerintah Negara Bagian Victoria tertarik untuk mendukung usulan Program Pendidikan Klinik Hukum MOLS Faculty of Law Monash University dan berkomitmen untuk mendukung dari segi pendanaan. Program ini mulai dilaksanakan secara formal sekitar akhir tahun 1999. Pada akhirnya Program Pendidikan Klinik Hukum MOLS Faculty of Law Monash University pertegas identitasnya menjadi *Family Law Assistance Program (FLAP)*. Dengan cepat FLAP ini ternyata lebih dikenal oleh kalangan masyarakat umum dan terus banjir para pengunjung yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum (klien).²⁰

Pada fase awal berdirinya, sebelum memberikan dukungan dananya, Pemerintah Negara Bagian Victoria telah memberikan syarat kepada FLAP Faculty of Law Monash University untuk membantu 150 klien per tahunnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin bagi program pendanaan secara terencana dan berkelanjutan. Namun tidak butuh waktu lama untuk memenuhi syarat tersebut, FLAP Faculty of Law Monash University telah berhasil memenuhi syarat tersebut hanya dalam waktu 1 bulan saja. Karena banyaknya klien dan perkara yang harus ditangani selama 1 bulan tersebut, FLAP Faculty of Law Monash University

²⁰ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam <http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap.html> diakses tanggal 18 Agustus 2016.

membuat perubahan kebijakan yakni 1 mahasiswa harus mendampingi 1 klien dengan cara membuat janji pertemuan dan wawancara, serta sekaligus menyampaikan informasi dan kesepakatan bagi penyelesaian perkaranya.

Pendanaan diberikan oleh Pemerintah Negara Bagian Victoria dialokasikan untuk mempekerjakan seorang pengacara dan petugas administrasi dan biaya. Program semacam ini secara sederhana dapat disebut sebagai upaya menolong diri sendiri (*self help*). Program ini juga lebih ditujukan untuk orang-orang yang memiliki masalah hukum keluarga dan tidak memiliki dana untuk melakukan upaya hukum di pengadilan.



**Kantor FLAP MOLS Faculty of Law Monash University
di Kawasan Clayton, Victoria State, Australia**

Selama fase awal pelaksanaan program ini, FLAP Faculty of Law Monash University memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan melakukan sesi pendampingan hukum secara formal di Pengadilan Keluarga Australia (*Family Court of Australia*) yang terletak di wilayah Dande-

nong, yaitu sebuah daerah pinggiran di selatan timur luar Melbourne sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor dari Kantor FLAP Faculty of Law Monash University.

Merupakan usaha dan perjuangan yang tidak sia-sia, di mana pimpinan dan para petugas pelaksana di pengadilan menerima dosen dan mahasiswa dengan sangat terbuka dan menerima proposal tersebut. Usaha ini merupakan cita-cita yang diinginkan sejak awal, di mana para mahasiswa dapat melakukan magang dan praktik langsung membantu klien dalam proses pengajuan perkara di pengadilan. Dalam perkembangannya, Program Klinik Bantuan Universitas Hukum pada FLAP Faculty of Law Monash University di Pengadilan Keluarga Dandenong Victoria menjadi sebuah proyek percontohan atau *pilot project*. Mereka membuka pelayanan pada setiap hari kerja di Pengadilan Keluarga Dandenong dan hari Senin menjadi hari yang tersibuk.

Pilot project tersebut kini dikenal dengan sebutan *The Family Court Support Program*. Setelah melalui periode waktu yang cukup lama, tepatnya selama 10 tahun terakhir ini, masyarakat terbukti memberikan penilaian yang positif di mana program ini telah banyak membantu mereka dalam mendapatkan akses pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dari FLAP Faculty of Law Monash University.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa sejarah berdirinya FLAP Faculty of Law Monash University ternyata hampir memiliki banyak kesamaan dengan BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yakni sama-sama dilandasi keinginan dan semangat para dosen untuk menyediakan wadah atau tempat bagi para mahasiswa untuk memperoleh berbagai pengalaman praktis di bidang kemahiran hukum, serta dapat berkontribusi dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Dasar Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, FLAP Faculty of Law Monash University didirikan pada tahun 1983 dan menjadi sebuah badan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Badan Hukum Tahun 1981. FLAP Faculty of Law Monash University memiliki visi masa depan yakni menjadi penyelenggara program pendidikan klinik hukum terbaik di dunia (*the best university legal clinic education*). Misionya utamanya adalah menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis di bidang kemahiran hukum dan berkontribusi untuk membantu masyarakat dalam bidang pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.²¹

- 1) *Monash-Oakleigh Legal Service* mematuhi standar berikut dalam penyediaan saran dan bantuan dalam bentuk layanan informasi dan/atau arahan kepada orang-orang di mana yang tepat dan atas dasar kebutuhan sebagai berikut:
 - a) Dalam daerah kami kompetensi;
 - b) Jelas dan *up to date*;
 - c) Cukup untuk membangun semua jelas, pilihan hukum yang relevan dan keterbatasan waktu;
 - d) Disertai oleh langsung, dukungan yang sesuai, seperti menulis surat atau rujukan ke penyedia layanan lainnya;
 - e) Disediakan dengan cara yang menghindari konflik kepentingan
- 2) *Monash-Oakleigh Legal Service* memberikan kualitas tinggi dan pendidikan hukum masyarakat diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat;

²¹ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_standards.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

- 3) *Monash-Oakleigh Legal Service* dalam sumber daya untuk melakukan reformasi hukum dan kebijakan hukum untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat;
- 4) *Monash-Oakleigh Legal Service* secara aktif berkomitmen untuk mempromosikan akses, kesetaraan dan non-diskriminasi;
- 5) *Monash-Oakleigh Legal Service* beroperasi dengan cara yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam manajemen yang efektif dan efisien dari semua aspek pelayanan hukum masyarakat. Hal ini bertanggung jawab untuk Monash University, Victoria Legal Aid Service, dan masyarakat;
- 6) *Monash-Oakleigh Legal Service* menawarkan klien dan orang yang menerima jasa kesempatan untuk memberikan umpan balik dan mengelola keluhan dari klien dan lain-lain dalam cara yang cepat, adil dan konsisten.

Maksud dan tujuan *Monash-Oakleigh Legal Service* adalah:²²

- 1) Untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas nasihat hukum dan bantuan hukum kepada orang-orang dari masyarakat sekitar dan orang-orang yang menghadiri dan bekerja di Monash University;
- 2) Untuk bekerja sama dengan Faculty of Law Monash University dalam menyediakan pendidikan hukum dan sosial, dan khususnya untuk mendorong dan mahasiswa hukum izin untuk berpartisipasi dalam pengoperasian layanan hukum atas dasar sukarela dan di bawah pengawasan profesional, sejauh konsisten dengan obyek lain dan tujuan dari layanan hukum;
- 3) Untuk mengoperasikan layanan hukum yang bebas dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat lainnya;

²² Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

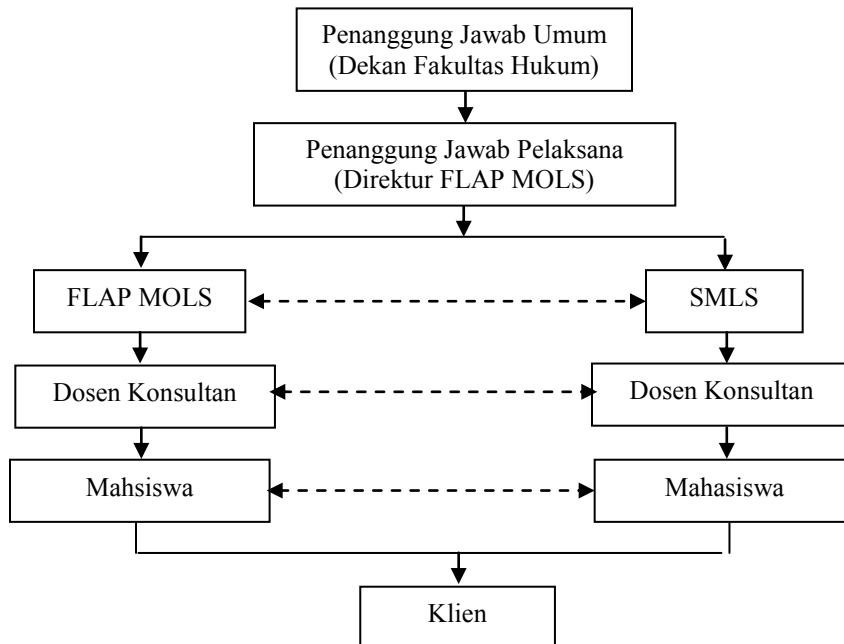
- 4) Untuk mempromosikan dan memberikan pendidikan hukum masyarakat dan mendorong hukum *self-help* dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat lain di daerah;
- 5) Untuk bekerja sama dengan layanan bantuan hukum publik dan swasta dan dengan profesi hukum;
- 6) Untuk membawa ke perhatian pihak yang berwenang dan hal-hal umum yang mempengaruhi hak hukum orang di daerah;
- 7) Untuk memulai dan berpartisipasi dalam reformasi hukum dan reformasi sosial;
- 8) Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan dan melakukan penelitian ke dalam sistem administrasi peradilan dan penyediaan pelayanan hukum kepada masyarakat

c. Manajemen dan Tata Kelola Organisasi

FLAP Faculty of Law Monash University dikelola oleh satu pengacara atau supervisor secara *fulltime* dan para petugas administrasi yang juga bekerja secara *fulltime*. Posisi administrasi biasanya posisi yang dimiliki oleh mahasiswa hukum senior. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerima pendapatan, mendapatkan pengalaman dalam praktek hukum dan menyelesaikan gelar sarjana hukum mereka di fakultas terdekat. Boleh dikatakan bahwa tanpa terkecuali, para mahasiswa bekerja sebagai staf administrasi adalah sukacita untuk bekerja dengan. Mereka biasanya diambil pada karena mereka telah menunjukkan efisiensi dan bakat sementara pada FLAP Faculty of Law Monash University sebagai mahasiswa.

Kemudian struktur organisasi FLAP Fakultas Hukum Monash University tampaknya lebih sederhana seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi FLAP MOLS Faculty of Law
Monash University Melbourne Australia



Program FLAP Faculty of Law Monash University memberikan janji kali untuk klien setiap hari. Proses pengadilan dibahas kemudian. Tidak seperti pusat hukum masyarakat lainnya, tidak ada pembatasan pada jenis masalah hukum keluarga bahwa klien memiliki atau pada wilayah di mana mereka tinggal atau bekerja. Dari Selasa sampai Jumat, ada sesi di mana klien dilihat oleh janji. Pada hari Selasa dan Rabu, mereka terlihat di sore dan Kamis dan Jumat, di pagi hari. Setiap sesi dibagi menjadi dua bagian dan hingga lima klien terlihat di setiap bagian. Oleh karena itu, dari Selasa sampai Jumat dapat mudah ditemui hampir 40 klien.²³

²³ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

Para siswa juga mewawancarai klien dan mendapatkan informasi dari mereka tentang masalah mereka. Mereka menyampaikan informasi ini kepada pengacara mengawasi yang memberikan saran yang berhubungan dengan klien. Biasanya dua siswa melihat klien, salah satu yang lebih senior daripada yang lain. Sebagai lebih junior pengalaman keuntungan siswa, mereka dapat memberikan peran mentoring untuk mahasiswa yang lebih junior.



**Mahasiswa yang sedang mewawancarai Klien pada FLAP
Faculty of Law Monash University Melbourne Australia**

Jika ditentukan bahwa klien harus memiliki dokumen yang disiapkan untuk mereka, mereka diberikan dokumen dasar, selanjutnya diberikan daftar kuesioner dan diminta untuk menyelesaikan mereka serta mengembalikannya kepada FLAP Faculty of Law Monash University sesegera mungkin. Klien diminta untuk kembali materi selesai kira-kira sepuluh hari sebelum pengangkatan mereka berikutnya.

Hal ini biasanya memungkinkan cukup waktu bagi mahasiswa untuk menemukan dokumen yang perlu dipersiapkan dan dapat ditandatangani oleh klien.

Program Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dilaksanakan pada FLAP Faculty of Law Monash University ini merupakan persyaratan dari layanan yang semua jenis dokumen yang disyaratkan, misalnya aplikasi surat pernyataan kesaksian, alat bukti, dan sebagainya. Selain itu, FLAP Faculty of Law Monash University juga memiliki standar yang jauh lebih baik daripada yang dihasilkan oleh praktek hukum rata-rata. FLAP Faculty of Law Monash University telah membangun sistem tersebut selama bertahun-tahun satu set preseden yang mencakup setiap topik yang bisa dibayangkan. Mahasiswa dapat dengan mudah menemukan contoh dari hampir setiap dokumen dalam sistem hukum keluarga dan ratusan preseden.

Undang-Undang Hukum Keluarga di Australia memberikan kewenangan kepada tiga pengadilan yang berbeda untuk menangani masalah-masalah hukum keluarga. Hakim Lokal Pengadilan Negara ini memiliki suatu yuridiksi yang terbatas untuk mendengar hal-hal yang harus diaplikasikan menjadi penentangan, di mana hakim dapat membuat perintah interim tetapi harus tetap mengacu ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi lebih luas.

Keberadaan *Federal Magistrates Court* yang diciptakan sekitar 11 tahun yang lalu untuk mengisi kebutuhan yang dirasakan untuk kasus kurang kompleks di bawah yurisdiksi federal untuk ditangani secara resmi menjadi lebih cepat dan kurang. Meskipun dibuat untuk semua bidang hukum federal, kenyataannya lebih dari 80 % kasus yang ditangani oleh *Federal Magistrates Court* adalah masalah-masalah hukum keluarga. Selain itu, ada pula beberapa batasan kekuasaan bagi *Federal Magistrates Court* ketika berhadapan dengan masalah hukum

keluarga. Pengadilan ini saat ini telah berganti nama menjadi *Federal Circuit Court* dan petugas pengadilan sekarang Hakim.²⁴

Kemudian ada *Family Court of Australia* yang memiliki kewenangan untuk menangani semua kasus yang masuk di bawah tindakan hukum keluarga. Pengadilan di Dandenong tercatat sebagai Pengadilan Keluarga dan Circuit Pengadilan Federal yang diatur berdasarkan Undang-Undang Hukum Keluarga Australia. Para hakim yang ada pada *Family Court of Australia* telah ditarik dari wilayah Dandenong dan digantikan oleh hakim *Federal Circuit Court*. Kasus-kasus yang berada dalam yurisdiksi *Family Court of Australia* masih dapat diajukan ke dalam wilayah Dandenong, tetapi percobaan didengar di Melbourne.

Sejak kehadiran FLAP Faculty of Law Monash University pertama kalinya di Family Court Dandenong, program FLAP telah mengalami kerjasama tertinggi dari staf pengadilan. Sebuah ruangan besar telah dibuat dan tersedia setiap hari Senin yang diperuntukan bagi mahasiswa dan lien untuk melakukan wawancara penanganan kasus dan dilakukan penyelesaiannya di waktu yang sama. Pengadilan juga menyediakan fasilitas minum “Teh dan Kopi Gratis”, serta manfaat lainnya bagi klien. Dengan demikian terbentuk suatu hubungan yang sangat baik antara staf pengadilan dan anggota FLAP dan tanpa bantuan yang tulus dan keramahan mereka, tentu program FLAP Faculty of Law Monash University di Pengadilan Dandenong tidak akan mencapai keberhasilan tersebut.²⁵

²⁴ Lihat Editor, “Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

²⁵ Dalam kunjungan studi dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada tahun Juni 2013 dan Juli 2016 ditemukan fakta bahwa para hakim dan staf di pengadilan staf Dandenong memberikan apresiasi dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran paralegal mahasiswa yang magang di FLAP MOLS Faculty of Law Monash University.

Senin adalah hari yang sibuk di Pengadilan Dandenong karena sebagian besar kasus sebelum masuk ke pengadilan memang banyak ditangani terlebih dahulu untuk pertama kalinya pada FLAP Faculty of Law Monash University. Sekitar sepertiga dari pihak yang datang ke pengadilan pada hari Senin tidak didampingi mahasiswa FLAP. Hal ini tentunya merupakan sebagian dari peran FLAP Faculty of Law Monash University dalam memberikan saran kepada klien, bernegosiasi atas nama mereka, dan memungkinkan mewakili mereka di pengadilan.

Sistem yang diterapkan untuk membantu klien di pengadilan adalah sama seperti yang terjadi di FLAP Faculty of Law Monash University. Pengadilan Dandenong dibuka pada pukul 08.30 pagi dan proses dengar pendapat dimulai pada 10.00. Para klien umumnya datang secara bergantian ke ruang kerja FLAP Faculty of Law Monash University secepat kantor pengadilan dibuka. Para mahasiswa yang terlibat dalam membantu para klien ini dan melihat secara langsung bagaimana sistem pengadilan bekerja. Sering, para mahasiswa melihat klien di pengadilan bahwa mereka telah membantu beberapa minggu sebelumnya di FLAP Faculty of Law Monash University.

Jumlah kasus sebelum pengadilan bervariasi setiap hari Senin tetapi biasanya itu adalah sekitar 25 dan telah diketahui setinggi 40. Ada sebuah protokol ada antara pengadilan dan layanan hukum, di mana mahasiswa FLAP Faculty of Law Monash University dapat muncul hal-hal kecil di pengadilan anak pada Peradilan Anak (*Children's Court of Victoria*)²⁶ tetap berada di bawah pengawasan pengacara profesional. Bahkan ada juga beberapa klien yang datang untuk mengajukan pertanyaan ke pengadilan pertanyaan tentang proses hukum atau hal-hal yang mendesak seperti di mana seorang anak belum kembali setelah menghabiskan waktu dengan pihak lain.

²⁶ Mahasiswa yang magang pada FLAP MOLS Faculty of Law Monash University adakalanya dituntut mampu membantu klien yang memiliki kasus dalam lingkup Peradilan Anak (*Children's Court of Victoria*).



Mahasiswa magang sedang sibuk menyelesaikan berkas-berkas perkara di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Para mahasiswa yang melek dengan sistem informasi dan komputer dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyimpannya dalam buku dokumen. Sehingga mereka juga dapat dengan mudah dan singkat mengatasi kesulitan yang dialami klien di pengadilan. Hal ini merupakan suatu hal yang luar biasa di mana tidak setiap orang memiliki kemudahan dalam mendapatkan akses dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya.

Sebagai hasil dari efisiensi tersebut, angka yang cukup dari klien dapat dilihat, secara teratur hingga 20 hari. Rekor ini 30 klien terlihat pada hari Senin. Satu Hakim *Federal Circuit Court* telah mengambil minat dalam mahasiswa. Jika pernah ada istirahat dalam proses pagi dan dia meninggalkan bangku, mereka juga selalu meminta izin kepada para staf pengadilan untuk mengundang para mahasiswa ke kamarnya,

sehingga mereka dapat berbicara secara langsung kepada mereka tentang hukum dan studi mereka.²⁷

Mahasiswa yang mencalonkan untuk mengambil salah satu mata kuliah yang ditawarkan pada umumnya memiliki minat dalam hukum keluarga dan mereka ingin mengalami sisi praktis itu. Sehingga mereka termotivasi diri dari awal dan pendekatan program dengan beberapa semangat. Ada prasyarat sebelum siswa dapat mendaftarkan diri di subjek praktek profesional di FLAP Faculty of Law Monash University. Mereka harus baik telah berhasil menyelesaikan subjek hukum keluarga atau dilakukan subjek praktek profesional lain.

Sesi pendampingan kepada mahasiswa dilakukan untuk memungkinkan mereka dapat membiasakan diri dengan sistem kantor dan lapangan sebelum mereka menghadiri FLAP Faculty of Law Monash University. Sesi ini biasanya berlangsung sekitar 90 menit dan mahasiswa disediakan dengan buku pegangan menetapkan informasi yang relevan yang mereka akan menemukan manfaat. Seperti disebutkan sebelumnya, proses mentoring digunakan dimana mahasiswa lebih junior mendampingi mahasiswa yang lebih senior.

d. Program Kerja

Ada dua mata kuliah pilihan (subyek) yang tersedia bagi mahasiswa hukum. Bentuk pertama bagian dari subjek hukum keluarga diajarkan selama satu semester. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Klinik Hukum dapat memilih subyek ini sebagai bagian dari bukti keikutsertaan mereka dalam kegiatan pembelajaran di FLAP Faculty of Law Monash University untuk empat sesi, satu sesi di pengadilan dan

²⁷ *Federal Circuit Court* merupakan lembaga pengadilan yang sebelumnya bernama *Federal Magistrates Court*, yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara baik pidana ringan maupun perdata keluarga yang sifatnya menuntut proses penyelesaian perkara dengan segera.

penyerahan tugas ribu kata. Dua puluh lima persen dari nilai siswa yang dikaitkan dengan kehadiran mereka dan partisipasi di FLAP Faculty of Law Monash University dan dua puluh lima persen untuk tugas-tugas mereka.

Subyek pilihan yang kedua adalah "praktek profesional" Mata Kuliah Klinik Hukum. Mahaiswa dapat memilih untuk menghadiri FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne untuk "trimester" sekitar 15-16 minggu. Selama waktu itu, mereka diharapkan untuk menghadiri layanan setidaknya dua kali dalam seminggu dan di Pengadilan pada hari Senin. Mereka ditugaskan sejumlah file klien dan diharapkan untuk mengelola. Pada akhir waktu mereka, para siswa menyerahkan tugas seluas hukum keluarga yang menarik minat mereka atau membahas secara detail, file mereka telah bekerja pada.²⁸

Klien menghadiri program jatuh ke dalam beberapa kategori umum. Beberapa tidak mampu pengacara pribadi dan tidak memenuhi syarat untuk bantuan hukum atau tidak ingin menyediakan sendiri dana bantuan hukum. Beberapa telah mencapai langit-langit bantuan hukum mereka dan tidak lagi memenuhi syarat untuk bantuan hukum. Beberapa memiliki masalah psikologis ringan atau berat dan pengacara swasta enggan untuk bertindak bagi mereka. Beberapa tidak memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan merasa sulit untuk berkomunikasi.

Pengalaman yang diperoleh oleh siswa antara mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University berbagai pengalaman dan manfaat sebagai berikut:²⁹

²⁸ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

²⁹ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

- 1) Mereka dapat belajar bagaimana mewawancarai dan mendapatkan informasi dari klien yang sering memiliki masalah psikologis yang besar dan miskin atau tidak ada pemahaman tentang bahasa Inggris, atau secara umum memiliki kemampuan komunikasi yang rendah, atau menggunakan juru bahasa, dan pekerja kasus untuk mendapatkan informasi dari klien;
- 2) Belajar untuk memberikan saran kepada klien-klien yang sama surat permohonan/surat gugatan dan dokumen pengadilan lainnya.
- 3) Berkomunikasi dengan klien mereka, pengacara dan pihak lain melalui telepon dan email tentang tata cara memperoleh pengetahuan dari sistem pengadilan;
- 4) Memberikan pelayanan konsultasi singkat untuk memberikan beberapa saran atau nasihat kepada audiensi;
- 5) Belajar untuk bernegosiasi di bawah tekanan di lembaga pengadilan, yakni mahasiswa akan semakin akrab dengan dokumen yang diperlukan untuk berhasil mengadili kasus-kasus di bawah Undang-Undang Hukum Keluarga dan mempelajari berbagai prosedur di kantor hukum.

Manfaat tak terduga lainnya adalah Program Klinik Bantuan Hukum pada FLAP Faculty of Law Monash University merupakan program unggulan yang telah tumbuh, bermanfaat, dan telah muncul sejak awal berdirinya universitas. Oleh karena itu, keberadaan FLAP Fakultas Hukum Monash University di sekitar pengadilan dan pinggiran kota sekitar sangat dikenal. Selain itu, para mahasiswa juga lebih mudah menemukan akses mendapatkan pekerjaan, karena kehadiran mereka di FLAP terbukti memberikan pengalaman yang sangat berharga.

Terlebih lagi dalam hukum perusahaan yang berlaku di Australia telah mengatur proses rekrutmen pekerja yang memiliki pengalaman, sehingga bahwa banyak perusahaan di Australia ingin mempekerjakan

para pengacara junior yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman yang cukup di lembaga bantuan hukum universitas seperti dilakukan pada FLAP Faculty of Law Monash University

Lebih dari itu, beberapa firma hukum telah menghubungi staf di FLAP Faculty of Law Monash University dan meminta sejumlah mantan mahasiswa (para alumni) untuk dirujuk dan direkomendasikan serta untuk diseleksi serta direkrut sebagai karyawan pada perusahaan mereka. Mahasiswa dengan banyak pengalaman sebelumnya pada FLAP Faculty of Law Monash University telah mengambil peranan penting di pengadilan, yakni sebagai rekan kerja para hakim di pengadilan negara bagian dan juga *Federal Circuit Court of Australia*.

Sebagai program menangani lebih masalah hukum keluarga daripada kebanyakan jasa hukum lainnya Pemerintah Federal Australia menyadari bahwa keberadaan lembaga seperti FLAP Faculty of Law Monash University sangat dibutuhkan keberadaan dan peranannya untuk membantu masyarakat. Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Federal Australia telah memberikan hibah dari sebesar \$100.000 untuk menerapkan *pilot project* ini dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, mulai dari proses mediasi hingga litigasi.

Dana bantuan lebih lanjut juga telah dibuat oleh Pemerintah Federal Australia untuk program yang bekerja dengan Pusat Mediasi dan Layanan Bantuan Hukum (*Mediation and Legal Aid Service Center*) untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan jasa mediasi untuk hal-hal perlindungan anak dan orang-orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Banyak mahasiswa yang tidak merasa puas dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka peroleh setelah menyelesaikan magang pada FLAP Faculty of Law

Monash University. Sebagian dari mereka ada yang mengabdikan dirinya kembali menjadi relawan meskipun mereka telah lulus atau menyelesaikan studinya.

e. Rekam Jejak Penanganan Perkara

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap laporan tahunan-nya, FLAP Fakultas Hukum Monash University Melbourne Australia juga memiliki pengalaman banyak didatangi oleh para klien dan telah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada mereka. Tercatat selama tahun 2012-2013 ada 2109 klien yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum. Kemudian sebanyak 1418 kasus mendapatkan bantuan pendampingan hukum, 1287 kasus yang sedang ditangani dan 626 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan, termasuk 7 non kasus yang sifatnya kegiatan bantuan hukum.³⁰

Kemudian memasuki periode tahun 2013-2014, dalam laporan tahunan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne telah mencatat ada 1323 kasus dan 962 kasus lainnya telah mendapatkan bantuan konsultasi dan bantuan hukum dari para mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.³¹ Adanya peningkatan jumlah kasus yang ditangani tersebut semakin menambah rekam jejak dan pengalaman mahasiswa yang telah didatangi para klien. Hal tersebut juga memberikan menjadi suatu bukti keberadaan mahasiswa sangat berperan di dalam memberikan konsultasi dan bantuan konsultasi hukum kepada masyarakat.³²

³⁰ Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2011-2012.

³¹ Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.

³² Peningkatan jumlah kasus yang ditangani merupakan implikasi positif dari adanya dukungan Pemerintah Federal Australia telah memberikan hibah dari sebesar \$100.000 untuk menerapkan *pilot project* ini dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, mulai dari proses mediasi hingga litigasi.

Mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang mengambil mata kuliah praktik profesional dalam beberapa tahun terakhir telah mewawancarai para klien dan memberikan saran hukum di bawah supervisi ketat seorang pengacara (*solicitor*) yang berpengalaman dan memenuhi kualifikasi. Melalui layanan ini, anggota masyarakat dapat memperoleh saran hukum secara gratis untuk berbagai perkara hukum, termasuk perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan kendaraan bermotor;
- 2) Pernikahan dan perkara keluarga;
- 3) Penuntutan oleh Polisi;
- 4) Utang-piutang;
- 5) Sewa-menyewa dan Perselisihan Hidup Bertetangga;
- 6) Kontrak; dan
- 7) Kesejahteraan social.

Oleh karena itu, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh para mahasiswa yang magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada dasarnya tetap berada di bawah arahan dan bimbingan para dosen, serta supervisi para pengacara (*solicitor*) yang dipekerjakan oleh *Monash Law School*. Demikian pula kehadiran para relawan senior yang berasal dari kalangan industri hukum juga telah menawarkan saran hukum yang bebas biaya kepada masyarakat melalui pelayanan hukum yang diberikan oleh mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa paling tidak ada 10 mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Klinik Hukum pada periode kuliah manapun dan berperan aktif memberikan pendampingan hukum kepada klien di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Keikutsertaan mereka pada mata kuliah ini dan mendampingi klien pada umumnya ditawarkan

tiga kali dalam setahun dan berlangsung selama 17 minggu, yang berarti setara dengan perkuliahan dalam 1 semester.

Setelah mata kuliah ini berhasil dituntaskan, tiap mahasiswa akan mendapatkan 12 unit (semacam SKS) untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Para mahasiswa akan bekerja selama 1-1,5 hari per minggu di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dan bergantian bekerja pada setiap hari Senin pada *Family Court of Australia* di Dandenong. Dengan mengikuti praktik di lapangan, mahasiswa dapat menimba berbagai pengalaman berharga tentang bagaimana menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh klien.



**Professor Malcom Bennet bersama mahasiswa magang di FLAP
Faculty of Law Monash University Melbourne Australia**

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia ini juga memberikan edukasi lanjutan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, dengan menyediakan pendekatan multidisipliner untuk memenuhi kebutuhan klien. Masing-masing klien umumnya dibantu oleh setidaknya seorang mahasiswa yang akan membantu mereka memperoleh pemahaman secara luas. Bahkan apabila memungkinkan, mereka juga akan mendapatkan

penyelesaian atas masalah hukum keluarga oleh para mahasiswa yang berada di bawah supervisi pengacara yang berkualitas dan telah memenuhi kualifikasi pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

B. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Klinik bantuan hukum merupakan sebuah wadah untuk konsultasi dan bantuan pada para pihak yang mencari keadilan dalam masalah yang dihadapinya. Dengan jalan memberikan saran-saran hukum serta merumuskan dasar hukum, sehingga para pihak mengerti dengan masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Clarence J. Dias yang mempergunakan istilah "*legal service*" yang diartikan dengan pelayanan hukum.

Pelayanan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat.³³

Program Studi Ahwal Syakhshiyah sejak tahun 2015 mengadakan mata kuliah ini sebagai sarana bagi para mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam bidang peradilan, terutama dalam masalah keluarga dalam

³³ Lihat Yogie Arif, "Klinik Bantuan Hukum" dalam <https://asuinbdg.wordpress.com/2016/01/05/klinik-bantuan-hukum/> diakses 28 Agustus 2016.

ruang lingkup Kekuasaan Peradilan Agama, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentunya klinik bantuan hukum ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan bekal untuk peningkatan kualitas mutu pada Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah untuk terjun dalam dunia peradilan, serta mencetak manusia yang ahli dalam bidang Peradilan dan Hukum Keluarga.

Selain mata kuliah, Program Studi Ahwal Syakhshiyah juga membuat sarana praktik yaitu dengan adanya Bantuan, Konsultasi, Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) yang bertempat di Kabupaten Sumedang (depan Pengadilan Agama Sumedang) dan di Kabupaten Bandung (Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A). Dengan sarana seperti ini mahasiswa mampu menganalisis, menggali, mengetahui, memahami dan memberikan solusi pada para pencari keadilan. Hal ini dilakukan agar tercapainya pemberian bantuan hukum, yang menekankan pada tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, diusaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan.

Magang kerja ini bukan hanya sekedar pelaksanaan Praktik Keahlian mahasiswa, tapi juga sarana pembelajaran bagi mahasiswa mengenal dunia kerja dengan lebih dekat. Subtansi dari kegiatan ini adalah mahasiswa semester VII melakukan magang kerja di instansi/lembaga yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa. Tujuan kegiatan praktik keahlian ini meliputi tiga aspek pembelajaran baik kognitif, afektif, psikomotorik dan juga mengasah keterampilan (*soft skill*) mahasiswa.

Keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan praktis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga dapat menjadi

bagian dari program pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di masyarakat yang telah terampas hak-haknya, sehingga mereka dapat memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup.



**Rapat Kerja Pengembangan Layanan Hukum Pencari Keadilan
Melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas di Bandung
Tanggal 5-7 Mei 2014**

Dengan demikian upaya Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan dengan cara: pertama, pengembangan konsep dan operasional klinik bantuan hukum melalui proses pembelajaran kepada mahasiswa; kedua, memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menangani perkara-perkara yang diajukan oleh klien; ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang pada Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan keempat, menjalin kerjasama dengan semua instansi yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan institusi dan sumber daya manusia.

2. Upaya Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan Program Asistensi Hukum Keluarga, merupakan suatu layanan hukum dalam bentuk klinik hukum swabantu (*self-help*) yang dirancang untuk membantu mereka yang terlibat dalam litigasi Hukum Keluarga namun tidak memiliki representasi (wakil/kuasa) hukum. Program ini diselenggarakan oleh Monash University dan didanai oleh *Attorney General's Department* Australia.³⁴

Program ini bertujuan memberikan informasi tentang prosedur hukum keluarga, mediasi, dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, serta menyampaikan berbagai jenis informasi tentang kemungkinan dampak perpecahan keluarga pada pihak yang terlibat di dalamnya. Surat/dokumen untuk keperluan litigasi disiapkan atas nama klien.

Program ini juga memberi edukasi lanjutan bagi para mahasiswa Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dengan menyediakan pendekatan studi secara multidisipliner untuk memenuhi kebutuhan para klien. Masing-masing klien biasanya dibantu oleh setidaknya seorang mahasiswa yang akan membantu mereka memperoleh pemahaman secara luas. Bahkan apabila memungkinkan mereka juga akan mendapatkan penyelesaian atas masalah hukum keluarga mereka. Seluruh mahasiswa berada di bawah supervisi pengacara yang berkualitas/memenuhi kualifikasi.

³⁴ Lokasi dan kontak klinik bantuan hukum di Kampus Universitas 60 Beddoe Avenue, Clayton, Victoria 3168 Telepon 03 9905 4336 dan semua informasi dapat diakses melalui website: <http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap.html>. Selain itu, FLAP juga menyelenggarakan *drop-in service* (layanan kunjungan ke cabang) di Dandenong, Victoria di bawah *Family* atau *Federal Circuit Court* yang berlokasi di 53-55 Robinson Street, Dandenong. Kantor dibuka setiap hari Senin, dimulai sekitar pukul 8.30 pagi. Tidak perlu membuat perjanjian terlebih dahulu.

Upaya pengembangan Kilinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dilakukan secara efektif dan efisien dapat mengarah kepada universitas kelas dunia. Untuk itu, sistem manajemen dan tata kelola yang dikembangkan mengarah kepada: (1) sistem manajemen yang lincah namun tetap memiliki akuntabilitas yang tinggi; (2) manajemen mutu; dan (3) tata kelola yang tepat guna.

Untuk membuat sistem organisasi yang baik, pengembangan sistem pelayanan dan pengambilan keputusan agar menjadi lebih cepat dengan cara mendesentralisasikan beberapa wewenang kepada pemimpin tingkat menengah, dalam hal ini Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Ketua Pusat. Desentralisasi penuh akan dilakukan terhadap bidang akademik, sedangkan desentralisasi sebagian akan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan dan kepegawaian.

Bidang akademik akan didesentralisasikan penuh kepada Ketua Program Studi untuk dapat mengambil keputusan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan akademik. Desain kurikulum, mata kuliah, tema-tema penelitian, karya-karya ilmiah, dan tema-tema pengabdian masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada fakultas untuk mengambil keputusan. Bagaimana kurikulum tersebut bisa dikembangkan untuk dapat menjadi jurusan-jurusan yang mampu berperan di tingkat regional dan internasional.

Demikian pula dengan mata kuliah-mata kuliah yang harus ada agar jurusan-jurusan di semua fakultas bisa memiliki daya saing tinggi dengan universitas lainnya. Termasuk pula tema besar apa yang akan ditetapkan untuk penelitian dalam satu rumpun ilmu sehingga mampu menghasilkan temuan-temuan penelitian yang dapat menjadi rujukan luas. Selanjutnya karya ilmiah seperti apa yang perlu ditumbuhkembangkan dan dipresentasikan dalam forum-forum ilmiah regional dan internasional, serta

bagaimana tema-tema pengabdian masyarakat ditetapkan agar mampu memberikan sumbangsih positif terhadap penyelesaian masalah.

Adapun dalam hal pengelolaan keuangan didesentralisasikan sepenuhnya karena beberapa alasan, yaitu:³⁵ (1) sangat terkait dengan transparansi dan pertanggungjawaban publik; (2) diperlukan sinkronisasi antar bagian; dan (3) terkait dengan pejabat pelaksana. Pengelolaan keuangan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, besar anggarannya ditentukan oleh Pemerintah Federal dan Pimpinan Universitas karena sangat tergantung kepada kebutuhan pelayanan hukum yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam hal penggunaan keuangan, diaudit oleh Lembaga Audit Internal dan Eksternal. Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan tersebut diperlukan dengan untuk menjamin tranparansi dan akuntabilitas.

Untuk mendorong pihak luar institusi terkait dengan internal universitas, maka pengaturan dan sinkronisasi terhadap anggaran dilakukan secara otonomi. Hal ini karena sebagian anggarannya diberikan oleh *Victoria Legal Aid Service (VLAS)* Dengan demikian, maka pengaturan anggaran operasional untuk Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan regulasi dan berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran.³⁶

Kemudian untuk mempercepat aliran birokrasi, setelah dilakukan proses pengalokasian anggaran dilakukan secara desentralisasi, sehingga

³⁵ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

³⁶ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

berbagai kebutuhan sumber daya untuk operasional fakultas dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dapat dipenuhi dengan cepat. Demikian pula untuk sumber daya manusia, setelah ditempatkan pada fakultas, lembaga, dan masing-masing bagian, maka mereka bertanggung jawab kepada pihak pimpinan fakultas, lembaga, atau unit tempatnya bekerja tersebut.

Melalui upaya-upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas paa FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia sebagai salah satu universitas kelas dunia. Pusat studi dan praktik harus mampu mengembangkan keilmuan dan keahliannya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya secara mandiri. Untuk mendorong pusat studi-pusat studi dan praktik tersebut mampu berperan pada aktifitas-aktifitas keilmuan internasional maka dilakukan pemfasilitasan laboratorium, bengkel, dan klinik hukum yang penggunaan dan pengelolaannya bekerjasama dengan program studi.

Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan manajemen dan tata kelola seperti diuraikan di atas, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas paa FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi, komitmen, dan kesadaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah dicita-citakan. Sedangkan upaya pengembangan institusi juga dilakukan melalui kerjasama dengan instansi lainnya yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama.

Dengan sistem seperti yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia didorong untuk memperpendek kesenjangan, meningkatkan kebanggaan bagi masing-masing orang dalam porsi jabatan apapun, pengembangan super-

visi dan evaluasi yang lebih jelas dan lebih adil, serta berbanding lurus dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh semua pegawai. Melalui upaya-upaya tersebut dimungkinkan bagi semua pihak yang bekerja Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada klien.

C. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas Yang Dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan sesuai dengan Tujuan Instruksional Umum Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yakni untuk melatih mahasiswa untuk mengenal dunia praktek hukum dan administrasi keperdataan Islam sehingga diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan *soft skill* (kognitif, afektif dan psikomotorik) mahasiswa dalam memahami keilmuan syari'ah dan hukum baik pada tataran teoritis maupun praktis.

Sedangkan Tujuan Instruksional Khusus Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum diuraikan sebagai berikut:³⁷

- a. Secara kognitif, Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum bertujuan untuk melatih kepekaan mahasiswa dalam dunia kerja praktek hukum,

³⁷ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

administrasi keperdataan Islam, administrasi peradilan agama untuk memberikan pengalaman kerja di bidang keahlian tersebut;

- b. Secara afektif, Mahasiswa dapat menerapkan etika dan tanggung jawab keilmuan syari'ah dan hukum dalam dunia kerja praktek keahlian tersebut;
- c. Secara psikomotorik, mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitas ide dalam dunia kerja praktek hukum dan administrasi keperdataan Islam di KUA, PA atau Lembaga Hukum lainnya yang relevan agar terampil dalam memberikan gambaran solusi terhadap permasalahan praktis yang terjadi.

Penyelenggara Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum adalah Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) setelah memperhatikan arahan dari pimpinan fakultas kemudian membentuk tim pengelola Praktik Keahlian. Tugas dan tanggung jawab pengelola Praktik Keahlian adalah:³⁸

- a. Mengkoordinasikan teknis dan rencana pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dengan Pembantu Dekan Bidang Akademik;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- c. Mempersiapkan kebutuhan surat-menyurat mahasiswa yang melaksanakan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- d. Mengkoordinasikan penunjukkan dosen pembimbing, dosen pemberi materi pembekalan dan penilai laporan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dengan Program Studi;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga tujuan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;

³⁸ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- f. Memberikan penilaian ketertiban administrasi dan etika peserta Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Praktik Keahlian kepada Dekan.

Praktik Keahlian Mahasiswa Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga) ini dilakukan dalam bentuk rangkaian kegiatan pembekalan, magang kerja, dan penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan hal tersebut, meliputi jenis-jenis praktik sebagai berikut:

a. Praktik Administrasi Keperdataan

1) Praktik Pencatatan Akta Nikah

- a) Pemberitahuan kehendak nikah;
- b) Pemeriksaan nikah;
- c) Pengumuman kehendak nikah;
- d) Pelaksanaan Akad nikah dan pencatatannya;
- e) Penolakan kehendak nikah;
- f) Pencegahan pernikahan;
- g) Biaya pencatatan nikah;
- h) Pencatatan dan prosedur rujuk;
- i) Biaya pencatatan rujuk;
- j) Dan lain-lain.

2) Praktik Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- a) Pendaftaran ikrar wakaf;
- b) Pemeriksaan persyaratan ikrar wakaf;
- c) Pelaksanaan ikrar wakaf;
- d) Penandatanganan akta ikrar wakaf;

- e) Penggandaan akta ikrar wakaf;
- f) Proses Sertifikasi ikrar wakaf;
- g) Dan lain-lain.

b. Praktik Administrasi Perkara Perdata Peradilan

1) Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara

- a) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
- b) Surat Penugasan Panitera Pengganti;
- c) Penetapan Hari Sidang (PHS);
- d) *Relaas* Panggilan kepada Penggugat/kuasa penggugat/tergugat/tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/saksi/saksi ahli;
- e) Penetapan Perintah Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan penetapan Hari Sidang;
- f) Penetapan Hari Sidang Setelah Penetapan Sita;
- g) Penetapan Penolakan Sita Jaminan dengan Penetapan Hari Sidang;
- h) Penetapan Penangguhan/Pengangkatan Sita Jaminan;
- i) Penetapan Perintah Memanggil Tergugat untuk *Aanmaning*;
- j) Penetapan Eksekusi/Sita Eksekusi/Eksekusi Riil;
- k) *Relaas* Panggilan *Aanmaning*;
- l) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Gugur/Putusan Verstek;
- m) Pemberitahuan Putusan Penggugat/Tergugat tidak hadir pada Waktu Pembacaan Putusan;
- n) Berita Acara Persidangan;
- o) Berita Acara Sita jaminan;
- p) Berita Acara Penyitaan Eksekusi;
- q) Berita Acara Eksekusi;
- r) Dan lain-lain.

2) Prosedur Penerimaan Perkara Banding

- a) *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding;
- b) Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding;

- c) *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding;
- d) *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa aberkas sebelum dikirim ke PTA;
- e) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Banding;
- f) Akta Permohonan Banding;
- g) Tanda Terima Memori Banding.

3) Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi

- a) *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;
- b) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi;
- c) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi;
- d) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Kasasi;
- e) Akta Permohonan Kasasi;
- f) Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama;
- g) Dan lain-lain.

4) Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali

- a) *Relaas* Pemberitahuan dan Permohonan Peninjauan Kembali;
- b) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban Peninjauan Kembali;
- c) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali;
- d) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
- e) Dan lain-lain

5) Pemberkasan Perkara

- a) Bundel A;
- b) Bundel B;
 - (1) Bundel B Banding;
 - (2) Bundel B Kasasi;
 - (3) Bundel B PK.

6) Register Perkara

- a) Register Induk Perkara Gugatan;
- b) Register Induk Perkara Permohonan;
- c) Register Permohonan Banding;
- d) Register Permohonan PK;
- e) Register Ekonomi Islam;
- f) Register Mediasi;
- g) Dan lain-lain.

c. Praktik Klinik Hukum

- 1) Surat Kuasa;
- 2) Surat Permohonan;
- 3) Surat Gugatan;
- 4) Surat Jawaban Gugatan;
- 5) Replik;
- 6) Duplik;
- 7) Konklusi Para Pihak;
- 8) Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- 9) Dan lain-lain.

Pembimbing Praktik Keahlian terdiri dari para dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:³⁹

a. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, pendidikan minimal Strata 2 (Magister Hukum) yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan. Tugas pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum:

³⁹ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- 1) Melakukan konsultasi awal tentang materi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan berkoordinasi dengan pengelola kegiatan praktik ini;
- 2) Melakukan proses pembimbingan mulai pengusulan topik hingga penyusunan laporan;
- 3) Memberi masukan mengenai substansi laporan dan materi yang dibahas;
- 4) Mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan berargumentasi mengenai landasan konsep yang dibangun dalam proses Praktik Keahlian;
- 5) Mengevaluasi proses Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum mahasiswa melalui laporan kemajuan.

b. Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan adalah para pembimbing dari kalangan praktisi dan pegawai lembaga peradilan yang memiliki tugas mengarahkan mahasiswa selama mengikuti kegiatan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Para Pembimbing Praktik Keahlian Lapangan tersebut memberikan nilai terhadap aktifitas, inisiatif, kreatifitas dan etika kerja mahasiswa selama Praktik Keahlian di instansi tempat magang.

Selanjutnya, Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dapat ditempuh baik pada semester ganjil maupun genap. Persyaratan menempuh Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yang terdiri atas:⁴⁰

a. Syarat Akademik

Syarat Akademik yaitu Mahasiswa dapat memprogram Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum melalui Pengajuan KRS untuk Mata Kuliah Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum setelah menempuh 125 SKS.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

b. Syarat Administrasi:

Syarat administrasi meliputi:

- 1) Mengisi formulir permohonan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yang disiapkan oleh Program Studi .
- 2) Melampirkan salinan Kartu Rencana Studi (KRS), transkrip nilai terakhir.
- 3) Menyerahkan usulan jenis dan tempat praktik.

Tahapan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi proses pendaftaran, penunjukkan dosen pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum, pembekalan dan perizinan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengisian formulir permohonan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan pengajuan rancangan Praktik Keahlian sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran panduan ini.
- 2) Pengajuan rancangan praktik Keahlian disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil.
- 3) Pemilihan lokasi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum yang tertulis dalam pengajuan awal disesuaikan dengan konsentrasi minat mahasiswa. Mahasiswa dapat memilih lokasi Praktik Keahlian sendiri tetapi diutamakan untuk memilih lokasi Praktik Keahlian pada instansi/lembaga yang disarankan oleh pengelola. Mahasiswa tidak diperbolehkan memilih lokasi dengan dasar pertimbangan hubungan kekerabatan.
- 4) Penunjukan Dosen Pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum berdasarkan inventarisir bentuk dan jenis Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Penunjukan Pembimbing dikoordinasikan pengelola dengan Ketua Program Studi AS dan disahkan dengan Surat

Tugas Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- 5) Pembekalan peserta Praktik Keahlian dengan materi tata tertib, etika kerja magang dan teknik penyusunan laporan oleh Instruktur. Sesi pembekalan ini akan memberi masukan terhadap usulan topik laporan praktikum.
- 6) Pengusulan Bentuk dan jenis Praktik Keahlian dan Penyusunan laporan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dengan arahan Dosen Pembimbing.
- 7) Perizinan kepada instansi yang dituju dengan surat pengantar pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum untuk instansi dibuat oleh fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.
- 8) Penguatan materi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum sebagai pematangan kesiapan pemahaman mahasiswa terhadap substansi yang diangkat melalui sesi konsultasi dengan pembimbing.
- 9) Pembekalan pembuatan laporan dan pengembangan *soft skill* (keterampilan lunak) meliputi etika, inisiatif dan kreatifitas mahasiswa selama Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Pembekalan ini dikoordinasi pelaksanaannya oleh Pengelola Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum.
- 10) Pembekalan tambahan dapat dilakukan secara insidental oleh Pengelola Praktik Keahlian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum pada instansi dan laporan kemajuan selama pelaksanaan kegiatan ini, yang mencakup:⁴¹

⁴¹ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- 1) Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dilaksanakan selama 1 Bulan atau 24 Hari kerja.
- 2) Waktu dimulainya magang kerja menyesuaikan dengan kesanggupan instansi/lembaga terkait.
- 3) Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dilaksanakan setelah ujian akhir semester pada libur panjang semester genap.
- 4) Pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
- 5) Aktivitas dan materi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum disetujui oleh pembimbing dan oleh instansi/lembaga yang bersangkutan dengan disesuaikan dengan konsentrasi mahasiswa;
- 6) Pembimbingan mahasiswa di instansi/lembaga dilakukan oleh Pembimbing Lapangan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- 7) Mahasiswa Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan magang (*progress report*) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kepada Dosen Pembimbing Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum;
- 8) Pemantauan pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dilakukan oleh pengelola kegiatan dan dosen pembimbing terhadap aktivitas mahasiswa di tempat Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan/atau menyusun laporan kemajuan (*progress report*).

c. Tahap Pelaporan

Proses akhir yang harus ditempuh mahasiswa dalam evaluasi ini adalah pembuatan laporan, penyajian laporan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum dan perbaikan laporan, yang mencakup atas:⁴²

- 1) Mahasiswa membuat laporan kegiatan dengan bimbingan dan arahan dosen pembimbing;

⁴² Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

- 2) Laporan kegiatan harian yang dibuat mahasiswa harus diketahui oleh atasan di instansi tersebut;
- 3) Laporan akhir yang dibuat mahasiswa harus disetujui oleh pembimbing dengan bukti surat pernyataan bahwa laporan yang dibuat benar-benar sesuai keadaan yang diamati dalam proses Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum, ditandatangani dengan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh mahasiswa dan mengetahui (bertanda tangan) Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum;
- 4) Laporan dikumpulkan kepada Program Studi paling lambat Pekan Pertama Bulan September;
- 5) Mahasiswa mempresentasikan laporan dihadapan dosen pembimbing dan Program Studi sesuai jadwal yang ditetapkan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*);
- 6) Mahasiswa memperbaiki laporan berdasarkan masukan dari pembimbing dan mengumpulkan perbaikan laporan sesuai jadwal yang ditetapkan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum.

d. Tahap Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahhwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup penilaian terhadap keseluruhan proses kegiatan yang terdiri atas evaluasi proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Rentang nilai yang diberikan kepada peserta dalam proses tiap-tiap proses tersebut serendah-rendahnya 60 dan setinggi-tingginya adalah 90. Adapun komponen penilaian mencakup atas skala sebagai berikut:⁴³

⁴³ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2014).

Tabel 4.5
Angka Penilaian Praktik Keahlian

No.	Derajat	Huruf	Kualifikasi	Keterangan
1.	80-100	A	Sangat Baik	Lulus
2.	70-79	B	Baik	Lulus
3.	60-69	C	Cukup	Lulus
4.	50-59	D	Kurang	Lulus
5.	0-49	E	Tidak Lulus	Mengulang

Tabel 4.6
Aspek Penilaian Praktik Keahlian

Aspek Penilaian	Penilai	Komponen Penilaian	Prosen Tase
Ketertiban Administratif	Program Studi	1. Ketepatan waktu pengumpulan laporan. 2. Kehadiran pada pembekalan. 3. Kedisiplinan pengurusan izin Praktik Keahlian. 4. Etika dan keseriusan selama proses Praktik Keahlian.	15 %
Pembekalan dan Bimbingan	Dosen Pembimbing	1. Kelayakan Penguasaan Materi Laporan 2. Keaktifan pada proses pembimbingan laporan 3. Etika selama proses pembimbingan	20 %
Pelaksanaan Praktik Keahlian	Dosen Pembimbing	1. Keaktifan hadir 2. Inisiatif menggali informasi 3. Kreatifitas pengembangan keahlian	30 %

		4. Kejelasan dalam berkomunikasi 5. Etika selama Praktik Keahlian 6. Lembar Kegiatan harian yg diketahui oleh atasan.	
Pelaporan	Dosen Pembimbing	1. Penulisan laporan sesuai format 2. Penyajian laporan dengan argumentasi yang baik dan sistematis.	35 %

Hasil evaluasi dari seluruh komponen tersebut diolah Program Studi dan diumumkan mejadi nilai akhir Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum. Selain Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum berakhir, di mana pelaksana dan pengelola kegiatan juga berkewajiban melakukan evaluasi keseluruhan proses berdasarkan masukan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum, yang merangkum kendala yang terjadi selama proses kegiatan dan merancang antisipasi kendala tersebut, serta merencanakan pelaksanaan program Praktik Keahlian yang lebih baik di semester selanjutnya. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan tersebut ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dirancang sebagai sebuah klinik bantuan hukum swabantu (*self-help*) yang dirancang untuk membantu mereka yang terlibat dalam litigasi Hukum Keluarga namun tidak memiliki kuasa hukum. Program prestisius ini dikelola oleh FLAP Faculty of Law Monash University

Melbourne Australia dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Federal Australia. Pendanaan tersebut didasarkan kepada prinsip *Membantu mereka yang ingin membantu diri sendiri*.

Peneliti melihat bahwa program ini merupakan program unggulan yang dimiliki oleh Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Melalui program, Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dapat mendidik dan melatih mahasiswa dalam memberikan pelayanan dan konsultasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Mahasiswa akan mendapatkan manfaat berupa kemampuan praktis dan mendalam ketika mereka terjun di lapangan untuk menyelesaikan hukum keluarga yang mereka temui.

Sebagai gambaran, peneliti juga melihat bahwa Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga telah dirancang sedemikian rupa untuk:⁴⁴

- a. Mendukung pelayanan Penyelesaian Perselisihan Keluarga untuk individu, keluarga dan komunitas yang mengalami konflik terkait-keluarga;
- b. Mendukung Pusat-pusat Hubungan Keluarga dan pelayanan yang diberikan oleh Program Pelayanan Hubungan Keluarga;
- c. Merujuk pasangan yang berpisah dan bercerai kepada pelayanan penyelesaian perselisihan keluarga.

Berikut ini merupakan gambaran singkat tentang Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia:⁴⁵

⁴⁴ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

⁴⁵ Lihat Editor, "Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_objectives.php diakses tanggal 18 Agustus 2016.

Tabel 4.7

**Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP
Faculty of Law Monash University Melbourne Australia**

Tentang program	<p>Program Bantuan Hukum Keluarga (<i>Family Law Assistance Program</i>, FLAP) adalah sebuah klinik bantuan hukum swabantu (self-help) yang dirancang untuk membantu mereka yang terlibat dalam litigasi Hukum Keluarga namun tidak memiliki kuasa hukum. Program ini dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Monash dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Persemakmuran Australia. Pendanaan tersebut didasarkan pada prinsip “Membantu mereka yang ingin membantu diri sendiri.”</p> <p>Program ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai prosedur hukum keluarga, mediasi dan bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan dan dampak perpecahan keluarga yang dapat dialami oleh mereka yang terlibat. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk litigasi disiapkan atas nama klien.</p> <p>Program ini juga memberikan pendidikan lanjutan bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Monash. Setiap klien dibantu oleh sedikitnya satu mahasiswa yang akan membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan, apabila dimungkinkan, untuk mendapatkan penyelesaian atas permasalahan hukum keluarga mereka. Semua mahasiswa diawasi oleh pengacara-pengacara yang kompeten.</p> <p>Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pendekatan multidisipliner telah dikembangkan untuk membantu para klien menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum mereka. Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pelayanan Sosial dan Bisnis dan Ekonomi, dengan diawasi oleh dosen-dosen yang berkompetensi, juga membantu para klien menyelesaikan permasalahan hukum keluarga</p>
-----------------	--

	<p>mereka. Mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah penerjemahan juga turut serta. Mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum keluarga juga dapat menghadiri 4 sesi FLAP dan 1 sesi di pengadilan.</p> <p>Sejak tahun 2006, tiap pasangan yang mengajukan perceraian diwajibkan untuk menghadiri sesi mediasi (disebut sebagai Penyelesaian Perselisihan Keluarga) apabila terdapat ketidaksepakatan mengenai pengaturan hidup anak-anak. Para pihak diharuskan untuk menghadiri mediasi sebelum mereka dapat mengajukan perkara mereka ke pengadilan. FLAP menerima pendanaan dari Persemakmuran Australia untuk memberikan informasi pada para pihak tentang pusat mediasi terdekat dan juga untuk menerima rujukan dari pusat mediasi tersebut.</p>
Lokasi dan informasi kontak klinik bantuan hukum di kampus universitas	<p>60 Beddoe Avenue, Clayton, Victoria 3168 Telepon 03 9905 4336 http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap.html</p> <p>Penting untuk membuat janji pertemuan, dan karena sifat dari pelayanan dalam program ini, biasanya terdapat masa tunggu sebelum pelayanan dapat diberikan.</p> <p>Senin: Tutup* Selasa: 1–5 sore Rabu: 1–5 sore Kamis: 9.15 pagi–1 siang Jumat: 9.15 pagi–1 siang</p> <p>10 konsultasi dengan klien per sesi selama setengah hari = (10 x 4 hari x 51 minggu= kira-kira terdapat 2.040 konsultasi dengan klien per tahun di klinik bantuan hukum di universitas).</p>

	FLAP juga menerima pendanaan dari Persemakmuran Australia untuk membantu para klien menjalani mediasi, atau yang dikenal sebagai penyelesaian perselisihan keluarga, sehubungan dengan permasalahan mengenai anak-anak.
Lokasi klinik bantuan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Keluarga Australia/Pengadilan Tinggi Federal	<p>FLAP memiliki pelayanan singgah (<i>drop-in</i>) di Pengadilan Keluarga/Pengadilan Tinggi Federal di Dandenong (53-55 Robinson Street, Dandenong) setiap hari Senin mulai pukul 08:30 pagi hingga selesai. Tidak perlu membuat janji pertemuan.</p> <p>Terdapat kurang lebih 26 konsultasi dengan klien pada setiap hari Senin (lebih dari 1300 orang klien yang berkonsultasi di pengadilan setiap tahunnya).</p>
Staff Pengacara	<p>1 orang pengacara purna waktu bertugas sebagai penyelia</p> <p>1 orang petugas administrasi/paralegal (saat ini seorang pengacara)</p>
Mahasiswa	<p>Program ini selalu dilayani oleh 10 orang mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Praktek Profesi. Mata kuliah tersebut dibuka tiga kali setiap tahunnya dan berlangsung selama 17 minggu. Setelah berhasil menyelesaikan mata kuliah Praktek Profesi tersebut, berarti setiap mahasiswa telah mendapatkan 12 satuan kredit semester sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Mahasiswa-mahasiswa tersebut bekerja selama 1-1,5 hari setiap minggunya di klinik bantuan hukum di Universitas Monash dan secara bergantian pada dua hari Senin setiap bulannya bekerja di Kepaniteraan Pengadilan Keluarga Australia di Dandenong.</p> <p>Hingga kini, terdapat 70 mahasiswa yang bekerja sebagai sukarelawan memberikan pelayanan nasihat hukum, selain dari para mahasiswa yang sedang</p>

	mengambil mata kuliah praktek profesi.
Anggaran	<p>FLAP diselenggarakan oleh Universitas Monash dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Persemakmuran Australia.</p> <p>FLAP mendapatkan pendanaan eksternal untuk pemberian pelayanan ini pada tahun 2011-2012, sebesar: \$228,000.</p>
Laporan tahunan	Laporan tahunan FLAP tersedia dalam bentuk dokumen elektronik.
Dokumen-dokumen utama	<p>Formulir Informasi Klien CLSIS</p> <p>Pernyataan persetujuan klien</p> <p>Brosur FLAP: Informasi tentang apa yang dapat diharapkan oleh klien</p> <p>Formulir dan preseden FLAP (seperti misalnya pernyataan di bawah sumpah dan putusan)</p> <p>Daftar pertanyaan yang harus diajukan kepada klien sebagai panduan bagi mahasiswa baru</p> <p>Panduan FLAP bagi Mahasiswa</p> <p>Dokumen-dokumen tersebut tersedia bagi semua mahasiswa dan dapat diakses dalam bentuk dokumen elektronik.</p>
Pelayanan lain yang ditawarkan oleh klinik-klinik bantuan hukum di Universitas Monash	<p>Mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Monash (atau mahasiswa yang memiliki pengalaman terkait) yang terdaftar dalam mata kuliah Praktek Profesi dapat melakukan wawancara dengan klien Pelayanan Hukum dan memberikan nasihat hukum di bawah pengawasan ketat seorang pengacara yang berpengalaman dan juga kompeten.</p> <p>Melalui pelayanan tersebut, anggota masyarakat bisa mendapatkan nasihat hukum tentang beragam permasalahan hukum, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecelakaan kendaraan bermotor • Penuntutan polisi • Hutang

	<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan sewa-menyewa dan kehidupan bertetangga • Kontrak • Kesejahteraan Sosial <p>Pada intinya, Pelayanan Hukum dijalankan oleh para mahasiswa di bawah pengawasan pengacara-pengacara yang dipekerjakan oleh Fakultas Hukum Monash dan oleh para sukarelawan bidang hukum yang juga memberikan nasihat hukum dengan tanpa biaya.</p> <p>Informasi lebih lengkap dapat diakses pada: http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/mols/</p>
--	--

Demikianlah gambaran secara umum tentang Model Pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP MOLS Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang telah dirancang sebagai sebuah klinik bantuan hukum swabantu (*self-help*) untuk membantu mereka yang terlibat bukan hanya dalam perkara yang sifatnya non litigasi, tetapi juga membantu penyelesaian perkara secara litigasi di bidang hukum keluarga yang melibatkan para pihak yang tidak memiliki kuasa hukum.

D. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dalam upayanya mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

Bandung para dosen menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah bagaimana mempersiapkan mahasiswa dapat dibekali dengan kemampuan praktis untuk mendedikasikan ilmu yang telah mereka dipelajari kepada masyarakat agar yang membutuhkan. Hal ini didasarkan kepada argumen bahwa mahasiswa perlu disediakan wadah untuk mempraktikkan ilmu tersebut melalui program klinik hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut, munculnya sebuah rasa tanggungjawab dari para dosen dan mahasiswa untuk menyediakan suatu wadah bagi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Wadah yang dimaksud adalah membuka layanan Klinik Bantuan Hukum Universitas, di mana para dosen dan mahasiswa tingkat akhir dapat secara bersama-sama mengamalkan ilmunya di masyarakat melalui Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) yang telah dirintis sejak tahun 2011.

Menurut pengalaman peneliti sendiri, ada beberapa tahapan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung:⁴⁶

a. Menyusun Rencana Strategis

Rencana Strategis ini disusun sebagai kerangka umum rencana induk pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang isinya bersifat konseptual yang disusun sistematis dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Harry Yuniardi, M.Ag dan Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag), serta perwakilan dari mahasiswa adalah Riyan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

b. Menyusun Rencana Operasional

Rencana Operasional ini disusun sebagai kerangka konkrit rencana induk pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang isinya bersifat tahapan-tahapan operasional penjabaran program kerja yang disusun sistematis dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait.

c. Menyusun Draft Kerjasama (MoU)

Draft Kerjasama atau *Memorandum of Understanding (Mou)* ini disusun sebagai kerangka acuan untuk menjalin kerjasama pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas antara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan sejumlah lembaga peradilan.

d. Merekrut Konsultan dan Voluntir

Proses rekrutmen Dosen Konsultan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana para dosen dan mahasiswa hanya dapat memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien yang bersifat non litigasi. Khusus untuk layanan hukum yang sifatnya litigasi pada umumnya melibatkan pengacara profesional, yang dibiayai dari Dana POSBAKUM atau dari klien sendiri.

e. Melakukan Seleksi dan Pelatihan

Proses seleksi dan pelatihan kepada para calon voluntir Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan selektif, yakni hanya mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah hukum acara dan klinik hukum saja yang dapat magang pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Para mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi,

selanjutnya akan diberikan pelatihan teknis tentang semua prosedur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien. Proses pelatihan ini biasanya memakan waktu hampir 1 minggu atau 5 hari kerja (Senin-Jumat), di mana para mahasiswa melakukan latihan-latihan dan simulasi penanganan perkara, baik yang berbentuk non litigasi maupun litigasi.

f. Melakukan Pendampingan dan Pengawasan

Proses pendampingan dan pengawasan dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa yang magang praktik pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP tersebut diatur sebagai berikut:

1) Pelayanan Hukum

a) Penanggung Jawab

- (1) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- (2) Mahasiswa di bawah pengawasan dosen memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

b) Bentuk Layanan Hukum:

- (1) Dosen memberikan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat, para pihak yang berperkara, potensial pihak untuk memberikan konsultasi hukum, baik hukum perkawinan, hukum waris dan sebagainya;
- (2) Dosen memberikan layanan informasi hukum melalui telepon dalam bentuk konsultasi hukum dan mahasiswa memberikan jasa hukum melalui telepon mengenai mekanisme berperkara di pengadilan agama.
- (3) Mahasiswa memberikan layanan pe-nyusunan gugatan, replik dan duplik untuk para pihak yang akan ber-perkara di pengadilan agama;

- (4) Dosen dan mahasiswa memprioritaskan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin;
- (5) Biaya penyediaan layanan hukum yang diberikan oleh klien secara sukarela.

2) Konsultasi Hukum

a) Penanggung Jawab

Dosen melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan keahlian masing-masing.

b) Bentuk Konsultasi Hukum

- (1) Konsultasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- (2) Ruang lingkup konsultasi berkaitan dengan hukum keluarga dan kewenangan absolut pengadilan.

3) Bantuan Hukum

a) Penanggung Jawab

Advokat sebagai pelaksanaan bantuan hukum

b) Bentuk kegiatan bantuan hukum

- (1) Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang berperkara di pengadilan agama;
- (2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perkara.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain:⁴⁷

- a. Masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk menjadi Pementor dan Voluntir di Klinik Bantuan Hukum;

⁴⁷ Hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Harry Yuniardi, M.Ag dan Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag), serta perwakilan dari mahasiswa adalah Riyan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

- b. Masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi;
- c. Dana operasional yang tidak memadai, terutama untuk sewa tempat, ATK, dan biaya perawatan fasilitas kantor;
- d. Honor staf dan konsultan perolehannya sangat tidak wajar karena masyarakat memberi sumbangan sukarela;
- e. Keterampilan para dosen untuk terlibat di dalam memediasi pihak berperkara dan keterampilan mahasiswa memberikan layanan surat gugatan/permohonan dan jawaban perlu ditingkatkan;
- f. Terbatasnya akses menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Mengacu kepada peluang dan tantangan tersebut, peneliti dapat merumuskan bahwa pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Tridarma Perguruan Tinggi terdiri atas darma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ia juga merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diarahkan untuk mencapai tujuannya, yaitu mendukung pelayanan penyelesaian perselisihan keluarga untuk individu, keluarga dan komunitas yang mengalami

konflik terkait dengan keluarga, mendukung pusat-pusat hubungan keluarga dan pelayanan yang diberikan oleh program pelayanan hubungan keluarga, dan merujuk pasangan yang berpisah dan bercerai kepada pelayanan penyelesaian perselisihan keluarga.

Tercatat sejak 2009 sampai sekarang, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mendapatkan dukungan hibah dari Departemen Hukum Australia (*Attorney-General's Department*). Dana hibah itu digunakan untuk kegiatan seminar publik secara gratis di Pengadilan Dandenong setiap bulan (sejak 2009) dan memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada para klien dalam penyelesaian perselisihan keluarga.

Selain itu, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga mendapatkan dukungan melalui Kemitraan dengan *Victoria Legal Aid Service (VLAS)* dan *Chadstone Family Relationships Centre (CFRC)* di negara bagian Victoria. Adapun bantuan atau dukungan yang diberikan digunakan untuk melayani sesi informasi hukum diselenggarakan setiap minggu dalam bentuk pelayanan hukum melalui telepon (*call center*) dan memberikan bantuan hukum kepada para klien yang tidak mampu.

Berkenaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, pelaksanaan program ini merupakan suatu proses dasar yang secara esensial perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah melalui perencanaan yang matang, terstruktur, dan sistematis mulai dari penyusunan perencanaan dan organisasi hingga pelaksanaan dan evaluasinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan operasional pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP

Faculty of Law Monash University Melbourne Australia tersebut disusun mencakup atas tiga tahap, yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) menetapkan ukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; dan (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikian pula pelaksanaan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien tentu sangat erat kaitannya dengan pengendalian organisasi, yakni suatu kegiatan untuk menilai dan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana. Ada beberapa cara yang ditetapkan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia untuk melakukan berbagai pelaksanaan kegiatan belajar, yaitu:⁴⁸

- 1) Kebijakan umpan maju (*feedforward controls*) yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan;
- 2) Kebijakan konkuren (*concurrent controls*) yaitu usaha memusatkan proses pengendalian pada kegiatan yang sedang berjalan atau proses pelaksanaan suatu pekerjaan. Cara ini disebut juga *steering controls*, yaitu memonitor pekerjaan atau kegiatan yang sedang berjalan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan, proses dan prosedur telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang direncanakan;
- 3) Kebijakan umpan umpan balik (*feedback controls*) atau disebut juga dengan *postaction controls*, yaitu pengukuran dan perbaikan yang dilakukan setelah satu atau semua pekerjaan dilakukan.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

Kemudian dilihat dari segi prosesnya, pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia meliputi tiga tahapan sebagai berikut:⁴⁹

1) Penentuan Standar

Yaitu penentuan ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal merumuskan kebijakan operasional hendaknya ditentukan pula ukuran-ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan.

2) Studi Pendahuluan

Yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang mungkin terjadi, kemudian dibandingkan dengan ukuran-ukuran standar sebelumnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengukuran dan penilaian adalah merupakan proses evaluasi, atau sering juga disebut proses verifikasi. Dari proses evaluasi atau verifikasi tersebut akan ditemukan adanya tingkat pencapaian tujuan serta kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditentukan.

3) Strategi Perbaikan

Yaitu suatu tahapan mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan korelasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat dari kebijakan pengawasan yang tidak tepat.

Tujuan utama dari pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia adalah untuk mengetahui apakah hasil pemberian layanan hukum yang dilakukan oleh pengelola dan mahasiswa telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Dengan merumuskan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

kebijakan operasionalisasi Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, maka akan diketahui sejauhmana hasil dari melaksanakan tugas pokok dan fungsi Klinik Bantuan Hukum Universitas, apakah hasilnya telah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum.

Melalui pemikiran tersebut di atas, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diketahui bahwa program ini memiliki satu tujuan yang mencakup monitoring terhadap keseluruhan kegiatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum. Atas dasar itu, peneliti berpendapat bahwa boleh jadi ada pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien terhadap pemenuhan hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat (*justice seekers*).⁵⁰

Namun tidak dipungkiri pula bahwa program pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas senantiasa dihadapkan kepada berbagai tantangan dan kendala. Seperti halnya terjadi pada banyak perguruan tinggi, maka tantangan paling utama yang dihadapi dalam pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, yaitu: masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk menjadi Pementor dan sukarelawan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas, keterampilan mahasiswa magang dalam menangani perkara-perkara yang sedang dihadapi, dan keterbatasan waktu untuk menangani jumlah perkara yang begitu banyak diajukan oleh klien.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Chelsea dan Jenny, keduanya Staf Pegawai FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

E. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

1. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang perlu turut serta dalam pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan hukum nasional perlu dicermati oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa. Dalam merealisasi hal tersebut mahasiswa tidak serta merta mampu berpartisipasi secara langsung. Pemahaman akan keilmuan dan praktek dibidang hukum seharusnya sudah diperoleh di dalam perguruan tinggi, namun pada kenyataannya perguruan tinggi hanya mengedepankan kemampuan akademik mahasiswa melalui kurikulum pendidikan.

Untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam program Klinik Bantuan Hukum Universitas tentu perlu dilakukan strategi pengembangan kemampuan beracara ataupun praktek dalam mengaplikasikan ilmu hukum dirasakan sangat kurang, karena selama ini wacana mengenai pengembangan praktek mahasiswa hanya diwujudkan dalam pemberian materi dalam suatu mata kuliah. Namun demikian, tetap saja pemberian materi kuliah tersebut hanya sebatas kerangka teori. Hal ini tentu bertentangan arus globalisasi yang lebih menuntut mahasiswa yang memiliki profesionalisme dalam kemampuan akademik ataupun berkarya yang seharusnya sudah terintegrasi dengan baik selama menuntut ilmu dalam perguruan tinggi.

Kebutuhan membangun proporsionalisme di kalangan mahasiswa untuk menghadapi arus globalisme inilah yang harus dilakukan sedini mungkin dengan suatu persiapan baik dalam hal peningkatan kompetensi

akademik maupun membangun komunikasi keluar dunia kampus yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum di dalam civitas akademika diberikan kerangka teori melalui pemahaman akademik, yang mana masih banyak problematika yang harus diselesaikan dalam memahami secara komprehensif ilmu yang diberikan.

Selain itu adanya tuntutan dunia luar tidak semata mata terpaku kepada kemampuan akademik saja yang dibutuhkan, namun juga perlu suatu upaya pengembangan dari segi teori dan praktek haruslah seimbang yang menjadikan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai tenaga terampil dan profesional. Oleh karena itu, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu "ikhtiar" untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi.

Dalam upaya mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2013 Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA – saat itu menjadi Ketua Pusat Kajian Ilmu Syari'ah, Hukum, HAM, dan Kemasyarakatan (PKSHK) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung – mendapatkan kehormatan diundang dan difasilitasi oleh (*Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ)), untuk berkunjung ke beberapa lembaga yang erat kaitannya dengan Klinik Bantuan Hukum di Australia, seperti: *Family Court of Australia di Melbourne dan Dandenong, Federal Magistrate Court di Melbourne, Faculty of Law Monash University*, dan beberapa LSM di Melbourne, Australia.⁵¹

Bersama dengan 24 peserta lainnya yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial kemasyarakatan di bidang hukum telah

⁵¹ Lihat Press Release Pengembangan Klinik Hukum, "Keikutsertaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung dalam Program Layanan Hukum di Melbourne, Australia" dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungan studi khusus ke Melbourne Australia, yang berkaitan dengan program peningkatan bantuan dan pelayanan hukum, terutama bagi masyarakat rentan, seperti: orang tidak mampu, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di tempat terpencil. Rombongan berada di kota Melbourne selama seminggu.

Studi khusus ini bertujuan membangun kemitraan antara pengadilan, klinik bantuan hukum universitas, LSM dan instansi pemerintah dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, terutama berkaitan dengan peningkatan kepemilikan identitas hukum (*legal identity*). Peningkatan kemudahan akses terhadap proses kepemilikan legal identity, yang terdiri dari akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai, khususnya bagi masyarakat rentan, merupakan salah satu program unggulan dari *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ).

Oleh karena itu, AIPJ mengundang unsur-unsur terkait, sebanyak 24 orang. Mereka adalah Dirjen Badilag, Sekditjen Badilum, KPTA Medan, KPA Cimahi, KPA Girimenang, KPA Watampone, KPT Sumut, KPN Ciamis, pejabat dari Bappenas (2 orang), BPHN (2 orang), UIN Bandung, UIN Makassar, UMSU Medan dan Universitas Nusa Cendana Kupang, PEKKA (2 orang), LSM SIGAB Yogyakarta, Puskapa UI, Tim Asistensi Pembaharuan MA, J4P World Bank dan AUSAID. Dari AIPJ itu sendiri yang memandu dan mendampingi kegiatan ini adalah Cate Sumner, Wahyu Widiana dan Hilda Suherman.

Selama berada di Australia, semua peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni melakukan studi khusus yang difokuskan di kota kedua terbesar di Australia ini diarahkan untuk mempelajari, mengamati dan menggali hal-hal yang berkaitan dengan layanan hukum yang dilakukan di

pengadilan, pusat layanan dan bantuan hukum di universitas dan di lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Pengadilan yang dikunjungi adalah Family Court of Australia (FCoA) di Melbourne dan Dandenong, wilayah pinggiran Melbourne, serta Magistrate Court yang ada di Melbourne. Di FCA ini, para peserta disugahi tentang bagaimana kepaniteraan melayani para pencari keadilan sebaik-baiknya, sejak pemberian informasi, pendaftaran, pengelolaan berkas perkara sampai persidangan. Peserta juga diberi informasi dan berdialog dengan Pos Pelayanan dan Bantuan Hukum secara gratis, yang berpraktik di pengadilan, baik dari lingkungan universitas atau lembaga lainnya. Malah peserta diberi kesempatan menghadiri sidang pengadilan.

Sedangkan di Magistrate Court Melbourne, peserta mendapat informasi tentang pengadilan anak, berkaitan dengan perlindungan anak, bantuan hukum dan bagaimana menangani perkara pidana bagi anak. Selain itu, peserta juga dibawa berkunjung ke pusat-pusat pelayanan dan bantuan hukum gratis yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama masyarakat tidak mampu, anak-anak, perempuan dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Di samping pelayanan langsung menerima pencari keadilan secara fisik, pelayanan telepon yang dilola secara profesional merupakan pelayanan yang banyak dikembangkan di Australia. Peserta mendapatkan informasi dan bahkan telah melihat langsung bagaimana tenaga-tenaga profesional, bahkan voluntir, melakukan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum melalui telepon.

Pusat-pusat layanan dan bantuan hukum yang dikunjungi adalah Victoria Legal Aid, Women's Legal Aid Services Australia, Disability Discrimination Legal Services Victoria dan Relationships Australia Victoria. Peserta juga disugahi oleh acara dialog langsung jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi, video link dan sebagainya. Peserta yang

berada di FCoA Melbourne dapat berkomunikasi langsung melalui tayangan gambar di video, dengan *Family Law Courts National Enquiry Center (FLCNEC)* yang berada di daerah Paramata yang jauh dari kota Melbourne. FLCNEC ini semacam pusat informasi nasional khusus berkaitan dengan hukum. Informasi yang diberikanpun sifatnya hanya referensi, tidak berupa substansi hukum.

Khusus yang berkaitan dengan pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas, para peserta diajak untuk mengunjungi Family Law Assistance Program, Faculty of Law Monash University Melbourne. Kunjungan ke FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne yang berjarak tempuh sekitar 45 menit dari Melbourne melalui jalan tol. Di kampus yang sangat terkenal ini, ada Family Law Assistance Programme (FLAP), yang memadukan kegiatan akademis dengan pemberian layanan hukum secara profesional.

Hal paling menarik dari kunjungan ini adalah para peserta diajak untuk melihat secara langsung tentang bagaimana mata kuliah praktek profesi hukum dikelola secara profesional, sehingga pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga ini menghasilkan kepuasan yang tinggi bagi para pencari keadilan. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa pada FLAP mendapat apresiasi masyarakat melebihi apresiasi yang diberikan kepada rata-rata lembaga bantuan hukum profesional lainnya. FLAP ini mempunyai kantor layanan sendiri di FCoA yang ada di Dandenong.

FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne dipimpin oleh Profesor Malcolm Bennett, yang nampak sangat profesional dibantu oleh para mahasiswa senior memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis di pengadilan keluarga yang berada di pinggiran Melbourne ini. Para peserta nampak sangat tertarik dengan program-program selama di Australia

ini. Bahkan di hari terakhir, seharian penuh, para peserta dipandu oleh adviser AIPJ melakukan diskusi pendalaman materi, sekaligus menyusun perencanaan strategis dari masing masing instansi untuk diterapkan di Indonesia, sesuai kondisi masing-masing. Semua peserta berkomitmen untuk dapat menerapkan apa yang telah dipelajari di Australia, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Banyak hal yang menjadi rumusan pada perencanaan strategis yang disusun oleh para peserta. Namun satu hal yang sangat menarik adalah adanya keterpaduan upaya dan layanan hukum yang diberikan di Indonesia, oleh berbagai pihak terkait, seperti pengadilan, universitas, instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Layanan terpadu antara PA, KUA dan Dukcapil yang telah banyak dibahas dan berkembang di Indonesia, perlu terus ditingkatkan persiapan dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat rentan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya.

Demikian pula, di PA-PA yang belum ada Pos Layanan Hukum (dulu, POSBAKUM), di sidang-sidang keliling, atau di pusat-pusat kegiatan masyarakat lainnya (seperti PEKKA Center) dapat dilakukan pelayanan dan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum yang dibayar negara melalui KemenkumHAM. Dapat pula, Fakultas Syari'ah atau Fakultas Hukum memberikan layanan atau konsultasi hukum secara profesional di lokasi-lokasi itu.

Direktur Jenderal Badan Perdilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesiaa pada saat itu, Drs. H. Puwosusilo, SH, MH, dalam sambutan pada acara penutupan kegiatan ini di FCoA, mewakili para peserta menegaskan: *“Yang jelas, setelah kita kembali ke tanah air, kita upayakan pelayanan dan bantuan hukum secara profesional, cepat, mudah, dan kalau bisa gratis, dengan memadukan potensi yang ada di Indonesia”*.



Setelah acara penutupan, Jumat (5/7/2013) di Ruangan Family Court of Australia (FCoA), para peserta berfoto bersama Executive Adviser FCoA Leisha Lister (duduk di kursi, ketiga dari kanan) dan Head Adviser AIPJ Cate Sumner (duduk di kursi paling kiri) dan Hilda Suherman (AIPJ)

Kegiatan yang difasilitasi AIPJ ini mendapat apresiasi dari para peserta. Peserta nampak puas, baik mengenai substansi maupun sistem penyelenggaraannya. Seperti ditegaskan oleh Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA, Perwakilan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menegaskan bahwa *"kegiatan ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman kepada peserta, yang dapat ditransformasikan di Perguruan Tinggi agar mampu berperan aktif menyediakan program layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat di Indonesia"*.⁵²

Di samping menyediakan fasilitas akomodasi dan lainnya yang menyenangkan, AIPJ juga menyiapkan para penterjemah. Tidak tanggung-

⁵² Lihat Press Release Pengembangan Klinik Hukum, "Keikutsertaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung dalam Program Layanan Hukum di Melbourne, Australia" dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

tanggung, ada 4 (empat) orang penterjemah yang bertugas pada kegiatan ini. Dua orang Indonesia dibawa dari Indonesia, seorang Indonesia direkrut dari Melbourne dan seorang Australia direkrut dari Sydney. Banyaknya penterjemah ini sangat wajar, sebab seringkali peserta di bagi kepada beberapa grup kecil. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Arif Christiono, yang mengikuti kegiatan ini, sangat puas dengan adanya sistem penterjemahan ini. *“Semua peserta dapat mengikuti dan menyerap materi kegiatan ini, dan dapat berdialog, menggunakan Bahasa Indonesia, dengan bantuan penterjemah”*.⁵³

Melalui workshop nasional pengembangan klinik bantuan hokum universitas di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Mahkamah Agung beserta *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* berharap bahwa pelayanan akses kepada keadilan dan pemenuhan hakas hokum dan identitas diri di kalangan masyarakat dapat terbantu. Melalui program ini perguruan tinggi sekurang-kurangnya dapat membantu sebagian tanggung jawab pemerintah di bidang pemenuhan hakas hokum dan keadilan bagi masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak.

Hasil workshop ini dalam perkembangannya mendapatkan respond an dukungan dari kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam di mana semua Fakultas Syariah dan Hukum di bawah Kementerian Agama diarahkan untuk mengembangkan Program Klinik Bantuan Hukum Universitas. Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari kunjungan tersebut, kemudian dilakukanlah sosialisasi pertukaran pengalaman melalui Workshop Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Iuniversitas, seperti terlihat dalam rumusan sebagai berikut:

⁵³ Lihat Press Release Pengembangan Klinik Hukum, “Keikutsertaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung dalam Program Layanan Hukum di Melbourne, Australia” dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

Tabel 4.6

**Rekomendasi Hasil Workshop Nasional Rencana Strategis Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas
Di Lingkungan 8 Universitas Islam Negeri (UIN) Hotel JS Luwansa Jakarta, 26 Juni 2014**

No	Rekomendasi	Kendala	Solusi/Tindak Lanjut	Pengampu Kebijakan	Sumber Daya	Jadwal	Hasil
1	Kurikulum	Ada kesulitan dalam mengintegrasikan mata kuliah Bantuan Hukum di PT, karena ada perbedaan Platform yang berbeda mengenai paradigma keilmuan di FH, FS, FSH, dan FSEI	Perlu workshop nasional perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum dalam sistem kurikulum	Rektor Dekan Ketua Prodi LKBH-BKLHK	Dosen Mahasiswa	Juli 2014	Mengintegrasikannya ke dalam mata kuliah wajib yang sudah ada secara interdisipliner dan multidisipliner, seperti: Hukum Acara dan Praktik Peradilan. Untuk beberapa PT diberikan kebebasan menjadikannya sebagai mata kuliah mandiri
		Ada kelemahan metode pembelajaran dan praktik bantuan	Perlu training personal capacity building tentang bantuan	Dekan Ketua Prodi	Dosen Mahasiswa	Agustus 2014	Meningkatnya kapasitas dosen dan mahasiswa berperan di klinik bantuan hukum

		hukum acara di PT	hukum bagi dosen dan mahasiswa				
		Ada masalah status kelembagaan bantuan hukum di bawah Universitas dan Fakultas	Perlu kejelasan aturan mengenai kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas/ Fakultas dalam Statuta	Rektor Dekan	Dosen Mahasiswa	September 2014	Menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas/Fakultas
2	Database Kasus, SOP, Sistem Pengawasan dan Pelaporan	Database Kasus, SOP, Sistem Pengawasan dan Pelaporan di Klinik Hukum Universitas masih berbentuk manual	Perlu transfer model Database System dari FLAP dan terkoneksi dengan OBH lainnya termasuk dengan Lembaga Pengadilan	Rektor Dekan Ketua LKBH	Dosen Mahasiswa	Januari 2015	Sistem informasi dan pelayanan klinik hukum melalui universitas akan semakin optimal
		Database Kasus, SOP,	Database System LBKH	Rektor Dekan	Dosen Mahasiswa	Maret 2015	Sistem informasi dan pelayanan klinik hukum

		Sistem Pengawasan dan Pelaporan LBKH Universitas belum terkoneksi dengan lembaga pendukung lainnya	perlu terkoneksi dengan OBH-OBH lainnya, termasuk pula dengan Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian	Ketua LKBH			melalui universitas akan mudah diakses oleh para pencari keadilan
		Memperkuat Klinik Hukum dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait	Need Assessment CSO, pengembangan database development, KKN/KKM atau Magang, Sharing experience; dan Alumni network.	Rektor Dekan Ketua LKBH	Dosen Mahasiswa	Juni 2015	Terjalinnya kerjasama yang baik antara Klinik Hukum Universitas dengan CSO dan lembaga terkait

Tabel 4.6

**Rekomendasi Hasil Workshop Nasional Rencana Strategis Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas
Di Lingkungan 8 Universitas Islam Negeri (UIN) Hotel JS Luwansa Jakarta, 2-4 Mei 2015**

No	Program	Rekomendasi	Strategi
1	Klinik Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Perlunya membentuk Lembaga Klinik Hukum; dan2. Memperkuat Lembaga Klinik Hukum.	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat kebijakan Dekan;2. Memasukan Klinik Hukum sebagai bagian penting dari Fakultas;3. Memanfaatkan alumni;4. Benchmarking;5. Case Management System/IT based system;6. Pelatihan/TOT
2	Perubahan Kurikulum	Diperlukan melihat kembali kurikulum untuk memperkuat keahlian dan penguatan community outreach PT	<ol style="list-style-type: none">1. Mengintragisikan dalam sistem perkuliahan;2. Diberikan beban SKS;3. Non SKS tetapi menentukan;4. Bagian dari tugas dari mata kuliah tertentu; dan5. Bagian dari KKN/KKM.
3	Kerjasama CSO	Memperkuat Klinik Hukum dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Need assessment CSO;2. Menjalin/memperkuat kerjasama dengan CSO;3. Database development;4. KKN/KKM atau magang;5. Sharing experience; dan6. Alumni network.

Tabel 4.7

**Satuan Acara Perkuliahan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi/Jurusan	: S.1 (Ilmu Syariah/Ilmu Hukum)
Mata Kuliah	: Konsultasi dan Bantuan Hukum
SKS/Durasi	: 2 (Dua) SKS / 1 Semester
Durasi	: 100 Menit/16 Pertemuan
Dosen	: Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA/Burhanuddin Hamnach, SH, MH
Standar Kompetensi	: Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai berbagai topik dari hasil riset yang aktual dan menarik tentang konsultasi dan bantuan hukum baik secara konsepsional maupun operasional

NO	KOMPETENSI DASAR	HASIL BELAJAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI	METODE	EVALUASI	REFERENSI
1	Mahasiswa memahami konsep dan teori konsultasi dan bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengetahui pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen tentang pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian Dasar hukum Prinsip & Asas Ruang lingkup Tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Tanya Jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Test Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i>

		<p>hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum • Mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menjelaskan kembali pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum • Mahasiswa menyampaikan ulasan tentang pengertian, dasar hukum, prinsip dan asas, ruang lingkup dan tujuan mempelajari konsultasi dan bantuan hukum 				<ul style="list-style-type: none"> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
2	Mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui sejarah dan perkembangan bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen tentang sejarah dan perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode Klasik • Periode Pertengahan • Peiode 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami sejarah dan perkembangan bantuan hukum • Mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan bantuan hukum 	bantuan hukum <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menjelaskan kembali sejarah dan perkembangan bantuan hukum • Mahasiswa menyampaikan ulasan tentang sejarah dan perkembangan bantuan hukum 	Modern			<ul style="list-style-type: none"> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di PA</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
--	--	---	--	--------	--	--	---

3	Mahasiswa memahami model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mampu memahami pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mampu menjelaskan pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen tentang pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mahasiswa menjelaskan kembali pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum • Mahasiswa menggambarkan pemetaan model-model upaya hukum penyelesaian perkara dalam bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Litigasi • Non Litigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana</i> ,
---	---	---	---	--	---	--	--

							<i>Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasa- lahannya</i>
4	Mahasiswa memahami sistem dan administrasi peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui sistem dan administrasi peradilan • Mampu memahami sistem dan administrasi peradilan • Mampu menggambarkan sistem dan administrasi peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami sistem dan administrasi peradilan • Mahasiswa menjelaskan sistem dan administrasi peradilan • Mahasiswa menggambarkan sistem dan administrasi peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • TUN • Militer 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di</i>

							<i>Peradilan Agama</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
5	Mahasiswa memahami prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mampu memahami prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mampu menggambarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mahasiswa menjelaskan prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana • Mahasiswa menggambarkan prosedur pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Penyelidikan • Prosedur Penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di</i>

		n prosedur pendampingan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana	penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana				<i>Indonesia</i> <ul style="list-style-type: none"> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
6	Mahasiswa memahami tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan • Mampu memahami tata cara pendampingan pembuatan surat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan • Mahasiswa menjelaskan tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Surat Kuasa • Surat Gugatan • Replik • Duplik 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan</i>

		<p>permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mensimulasikan tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan 	<p>gugatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mensimulasikan tata cara pendampingan pembuatan surat permohonan, surat kuasa, dan surat gugatan 				<p><i>Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
7	<p>Mahasiswa memahami prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan • Mampu memahami prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memahami prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Perkara • Pemeriksaan Kelengkapan Pengajuan Perkara • Pembayaran Biaya Panjar Perkara • Penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i>

		pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mensimulasikan prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan 	kembali prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mensimulasikan prosedur pendampingan pengajuan perkara ke pengadilan 	Majelis Hakim <ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan Persidangan • Pemanggilan (release) 			<ul style="list-style-type: none"> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
8	----- UTS ----	----- UTS ----	----- UTS -----	---- UTS ----	--- UTS ----	- UTS -	----- UTS ----
9	Mahasiswa memahami prosedur pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui prosedur pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas Perkara • Identitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di</i>

	perkara di pengadilan	perkara di pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan • Mampu mempresentasikan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan 	perkara di pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa mampu menggambarkan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan 	Para Pihak <ul style="list-style-type: none"> • Fakta Hukum dan Dasar Hukum (Posita) • Tuntutan (Petitum) 	<ul style="list-style-type: none"> • Simulasi 		<i>Indonesia</i> <ul style="list-style-type: none"> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
--	-----------------------	--	--	---	--	--	--

10	Mahasiswa memahami prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur pendampingan pembuktian perkara di pengadilan • Mampu memahami prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan • Mampu mensimulasikan prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan • Mahasiswa mensimulasikan prosedur pendampingan pemeriksaan dan pembuktian perkara di pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Pembuktian • Dasar Pembuktian • Jenis-jenis Alat Bukti • Mekanisme Pembuktian 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
----	---	---	---	--	---	--	---

11	Mahasiswa memahami prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Mampu memahami prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Mampu mensimulasikan prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa mensimulasikan prosedur hukum dalam proses pengambilan keputusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstatir • Kualifisir • Konstituir 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana</i> ,
----	---	---	--	---	---	--	--

							<i>Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasa- lahannya</i>
12	Mahasiswa memahami pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Mampu menjelaskan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Mampu mempresentasikan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan • Mahasiswa secara individual dan kelompok menggambarkan pendampingan menghadapi vonis atau amar putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Vonis / Putusan • Jenis-Jenis Vonis / Putusan • Konsekuensi Vonis / Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan • Wawancara • Presentasi • Simulasi • Tanya Jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di</i>

							<i>Peradilan Agama</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
13	Mahasiswa memahami pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Mampu memahami pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Mampu mensimulasikan pendampingan upaya hukum mediasi (non 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Secara individual dan kelompok mahasiswa menjelaskan pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi) • Mahasiswa secara individual dan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Teori Mediasi • Jenis-jenis Mediasi • Lembaga Mediasi • Mekanisme Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i>

		litigasi)	menyimulasikan pendampingan upaya hukum mediasi (non litigasi)				<ul style="list-style-type: none"> • M. Karyadi, <i>Peradilan di Indonesia</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
14	Mahasiswa memahami pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali • Mampu menjelaskan pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali • Secara individual dan kelompok mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Test • Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution, <i>Bantuan Hukum di Indonesia</i>

		upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali • Mampu mensimulasikan pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali	menjelaskan pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali • Mahasiswa secara individual dan kelompok mensimulasikan pendampingan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali				• Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i>
15	Mahasiswa memahami tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>)	• Mampu mengetahui tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) • Mampu	• Mahasiswa mengetahui tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) • Secara individual dan kelompok	• Pembentukan Kelompok • Skenario Persidangan • Role Play Persidangan	• Presentasi • Tanya Jawab • Simulasi	• Test • Non Test	• Abdurrahman, <i>Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia</i> • Adnan Buyung Nasution,

		<p>menjelaskan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mensimulasikan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) 	<p>mahasiswa menjelaskan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa secara individual dan kelompok mensimulasikan tata cara atau simulasi persidangan (<i>moot court</i>) 				<p><i>Bantuan Hukum di Indonesia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soerjono Soekanto, <i>Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis</i> • Yahya Harahap, <i>Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama</i> • Lilik Muliadi, <i>Hukum Acara Pidana , Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya</i> • CST Kansil, <i>Pengantar Hukum Perdata</i>
--	--	---	--	--	--	--	--

							<ul style="list-style-type: none"> • Van Vollen Hoven, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia • Dan lain-lain
16	----- UAS -----	----- UAS -----	----- UAS -----	----- UAS -----	--- UAS --	- UAS -	----- UAS -----

Bandung, 25 Agustus 2015
Tim Teaching,

Dr. Deni K. Yusup, MA
H. Burhanuddin, MH

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melalui proses yang cukup panjang, termasuk dengan segala dinamika dan problematikanya. Secara perlahan namun pasti – meskipun tanpa adanya dukungan finansial dari pihak pemerintah dan universitas – Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat berjalan sesuai dengan tujuan semula.

Dengan demikian, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas mencakup atas: (1) perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum dalam sistem kurikulum; (2) melaksanakan training personal capacity building tentang bantuan hukum bagi dosen dan mahasiswa; (3) kejelasan aturan mengenai kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas/Fakultas dalam Statuta; (4) melakukan transfer model *Database System* dari FLAP dan terkoneksi dengan OBH lainnya termasuk dengan Lembaga Pengadilan; dan (5) memperkuat Klinik Bantuan Hukum Universitas dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait.

2. Strategi Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia

Ada beberapa strategi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dilakukan melalui beberapa program, antara lain:⁵⁴

a. Pendidikan Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*)

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang mengembangkan Program Klinik Bantuan Hukum Universitas, Faculty of Law Monash

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

University Melbourne berkomitmen untuk memberikan standar tertinggi dalam program pendidikan dan pelatihan hukum. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui pusat-pusat pelayanan dan studi hukum yang dimilikinya. CLS ini salah satunya adalah satu aspek yang unik dari pendidikan hukum di Monash University, bahkan telah melampaui teori dan menanggulangi berbagai kasus dalam kehidupan nyata, serta menjadi salah satu program unggulan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Monash University.

Program Pendidikan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Monash University ini boleh dikatakan jenis pelayanan hukum yang pertama kali diberikan oleh universitas di Australia. Para mahasiswa akan belajar dan saling bekerjasama dengan klien dalam menangani kasus-kasus nyata di lapangan di bawah pengawasan dosen dan ahli hukum. Mahasiswa juga akan merasa tertantang, meningkat pengetahuannya, dan mencerahkan masa depan mereka kelak setelah lulus kuliah.

Oleh karena itu, Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman tentang pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, dan memberikan kontribusi dalam pemenuhan hak-hak atas hukum. Melalui program ini para mahasiswa juga akan memperoleh suatu kepercayaan diri yang tinggi dalam menerapkan keterampilan hukum di dunia nyata setelah mereka lulus.

b. Pelayanan Hukum Oakleigh Monash (*Monash Oakleigh Legal Service*)

The Monash-Oakleigh Legal Service (MOLS) adalah suatu program kemitraan antara *Monash Law School* dengan *Victoria Legal*

Aid Service. Melalui program layanan hukum MOLS ini, anggota masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis di berbagai masalah hukum, antara lain:⁵⁵

- 1) Kecelakaan Kendaraan Bermotor;
- 2) Hukum Perkawinan dan Keluarga;
- 3) Penuntutan Polisi;
- 4) Utang-piutang;
- 5) Sewa-menyewa
- 6) Perselisihan dengan Tetangga;
- 7) Perjanjian atau Kontrak;
- 8) Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Dari sekian jenis pelayanan hukum yang diberikan oleh MOLS, secara substansial dijalankan oleh para mahasiswa di bawah pengawasan pengacara yang dipekerjakan oleh *Monash Law School* dan para relawan dari kalangan industri hukum (Kantor Firma Hukum) yang juga menawarkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis (*prodeo*). Program MOLS ini memang dirancang sebagai program pendidikan dan pelatihan hukum bagi mahasiswa untuk mengabdikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Pelayanan Hukum Springvale Monash (*Springvale Monash Legal Service*)

Springvale Monash Legal Service (SMLS) adalah organisasi komunitas yang menyediakan pelayanan hukum secara gratis dan rahasia kepada semua anggota masyarakat yang membutuhkan. Sejak munculnya pusat-pusat pelayanan hukum masyarakat pada 1970-an, dasar filosofis

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Chelsea dan Jenny, keduanya Staf Pegawai FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

pendirian SMLS ini telah memberikan pelayanan bantuan hukum dan dapat diakses melalui berbagai pusat informasi layanan hukum, pusat pendidikan hukum masyarakat, dan pusat reformasi hukum. Sehingga anggota masyarakat yang kurang mampu akan memperoleh pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dari lembaga ini.

Program Klinik Bantuan Hukum pada *Springvale Monash Legal Service (SMLS)* dikembangkan sebagai pusat pelayanan klinik hukum kepada masyarakat dan dirancang untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam berbagai masalah hukum. Para mahasiswa di SMLS seringkali mendampingi klien dalam perkara-perkara yang sifatnya litigasi bagi klien yang tidak memiliki penasihat hukum. Program SMLS ini dikelola oleh *Monash University Law School* dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Federal Australia.

Program SMLS ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang berbagai prosedur penyelesaian hukum, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa dan pemecahan masalahnya yang berdampak kepada keluarga. Dokumentasi disusun atas nama klien untuk penyelesaian kasus yang menggunakan upaya hukum litigasi. Program SMLS ini juga akan memberikan pendidikan hukum lanjutan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh studi pada Faculty of Law Monash University Melbourne, dengan menggunakan pendekatan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan klien.

Program Klinik Bantuan Hukum *Springvale Monash Legal Service (SMLS)* secara umum dapat memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dalam bidang berikut.⁵⁶

1) Masalah Pidana;

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

- 2) Hutang dan Denda;
- 3) Diskriminasi;
- 4) Klaim Sipil/Sengketa;
- 5) Masalah Ketenagakerjaan;
- 6) Pengacara atau Pengaduan ke Polisi;
- 7) Kompensasi Kejahatan;
- 8) Sengketa Sekitar Kecelakaan Kendaraan Bermotor dan Pelanggaran Lalu Lintas;
- 9) Perceraian Hukum Keluarga dan Hak Asuh Anak
- 10) Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 11) Menguntit atau Memata-matai Orang Lain;
- 12) Perwalian dan Hukum Administrasi;
- 13) Perlindungan Hukum dari Pengacara;
- 14) Masalah *Centrelink Wills*;
- 15) Sewa-Menyewa;
- 16) Perlindungan Konsumen;
- 17) Dan lain-lain.

d. Program Bantuan Hukum Keluarga (*Family Law Assistance Program*)

Program Bantuan Hukum Keluarga yang dikembangkan dalam bentuk *Family Law Assistance Program (FLAP)* adalah *self-help* pelayanan klinik hukum yang dirancang untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam proses berperkara secara litigasi di Pengadilan Keluarga (*Family Court*) dan klien tidak memiliki penasihat hukum atau pengacara. Program ini dikelola oleh Faculty of Monash University dan didanai oleh Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Federal Australia.

Hampir sejenis dengan SMLS dan MOLS, Program FLAP ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang prosedur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum keluarga, pelayanan mediasi dan bentuk-bentuk pelayanan hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara hukum keluarga dan pemecahannya bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Program ini memberikan semua akses yang dibutuhkan oleh klien berupa bantuan hukum penyediaan dan pengurusan dokumen-dokumen penting yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara pada Pengadilan Keluarga (Family Court of Australia (FCoA)).

Program FLAP ini telah memberikan pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Faculty of Law Monash University dengan menyediakan pendekatan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan klien. Setiap klien akan dibantu oleh setidaknya satu orang mahasiswa yang akan membantu mereka dalam memperoleh pemahaman yang luas di bidang hukum dan menemukan resolusi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga yang sedang mereka hadapi. Semua mahasiswa yang melakukan magang pada FLAP ini akan diawasi dan dibimbing oleh para pengacara yang berkualitas.

Program Bantuan Hukum Keluarga pada FLAP Faculty of Law Monash University ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan hukum yang baik kepada mahasiswa agar mereka mampu memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan sebelum masyarakat menempuh upaya hukum formal melalui pengadilan. Para mahasiswa juga akan mendapatkan bantuan dari seorang *Barrister* apabila mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditanganinya.

Para mahasiswa magang di FLAP membantu klien dalam menyelesaikan perkara melalui upaya hukum formal (litigasi) akan memberikan berbagai informasi berupa formulir yang diperlukan, bagaimana menga-

jukan aplikasi, dan jika perlu membantu klien tentang bagaimana prosedur pendaftaran perkara, persidangan oleh hakim, pembayaran perkara melalui e-ticket di pengadilan dan berbagai prosedur lainnya yang diperlukan di pengadilan.

Mahasiswa pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne juga akan membantu klien dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan mereka tentang berbagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga (*Alternative Family Dispute Resolution*), konsultasi dan bantuan hukum lainnya sesuai dengan keperluan klien untuk melakukan proses penyelesaian perkara mereka.

Klien tentu saja akan memperoleh berbagai manfaat dari pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh para mahasiswa pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne, antara lain:⁵⁷

- 1) Mediasi penyelesaian kasus;
- 2) Menemukan bantuan dari konseling dan pusat FDR;
- 3) Melindungi dan melestarikan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam pemecahan hubungan keluarga;
- 4) Mengajukan kasus mereka dengan pemahaman yang baik tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan di masa akan datang;
- 5) Mengembangkan rasa prestasi dan kepuasan bathin dan pemahaman yang menyeluruh dari proses yang diperlukan;
- 6) Menghemat uang dan bergerak maju dengan hidup mereka.

Mahasiswa yang melakukan magang praktik dalam program Klinik Bantuan Hukum Keluarga pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne akan menjadi spesialis praktisi hukum yang berguna bagi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

masyarakat . FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne kini menjelma menjadi satu-satunya Pusat Pelayanan Hukum Keluarga di Australia dan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Di bawah pengawasan para pengacara ahli yang berkualitas, mahasiswa akan memberikan nasihat hukum kepada klien, melakukan kerja kasus yang sedang berlangsung dan konsultasi singkat. Dan dalam kasus yang tepat – mereka juga dapat mewakili para klien di Pengadilan, serta menghadiri proses persidangan di pengadilan. Adakalanya mahasiswa memberikan saran kepada klien selama mereka menjalani persidangan di pengadilan. Mahasiswa juga dapat menghadiri layanan tugas pengacara di Pengadilan Keluarga Dandenong pada setiap hari Senin untuk membantu dan memberikan saran ber perkara kepada klien yang tidak memiliki pengacara atau penasihat hukum.

Melalui program pendidikan hukum yang sistematis tersebut, mahasiswa akan memperoleh beragam keterampilan hukum praktis, seperti: kemampuan untuk melakukan penelitian hukum dan menerapkan penelitian hukum untuk skenario faktual; kemampuan untuk mensintesis pengetahuan profesional, teknis dan etika yang diperoleh dalam gelar sarjana hukum dan menerapkannya dalam konteks hukum praktis; keterampilan berpikir kritis dan penilaian hukum; kapasitas untuk mandiri merancang solusi hukum untuk masalah hukum yang rumit; dan kapasitas untuk mengidentifikasi dan menanggapi dilema etika, moral dan profesional dalam praktik hukum.

Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan apresiasi diri mereka dalam merespon isu-isu keadilan sosial dan memiliki kesadaran yang tinggi dari pengoperasian sistem peradilan, reformasi hukum dan masalah kebijakan publik. Keterampilan belajar hukum praktis pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne ini akan berguna bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan praktek hukum acara, terutama hukum keluarga), bersa-

maan dengan mahasiswa lainnya yang tertarik dalam masalah-masalah kebijakan pemerintah dan keadilan sosial.

Para mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne ini akan:⁵⁸

- 1) Mandiri melakukan penelitian hukum dalam bidang hukum yang kompleks keluarga dan undang-undang terkait, termasuk anak-anak dan harta masalah, dukungan anak dan spousal pemeliharaan dan, dengan menggunakan penelitian tersebut, seperti:
 - a) Menilai dan mengartikulasikan pilihan permusuhan dan non-permusuhan untuk klien, termasuk kekuatan dan kelemahan dari pilihan hukum yang tersedia;
 - b) Pro-aktif mengembangkan solusi untuk masalah hukum yang rumit; dan
 - c) Menunjukkan kapasitas untuk mengenali dan tepat menanggapi implikasi strategis dan etika pendekatan hukum yang berbeda.
- 2) Efektif berkomunikasi (baik secara lisan maupun tertulis) nasihat hukum, informasi, pilihan untuk sadar hukum dan non-litigasi jalur, argumen dan strategi dengan berbagai khalayak yang terlibat dalam sistem peradilan;
- 3) Menunjukkan keterampilan hukum praktis wawancara, advokasi dan penyusunan; dan penggunaan yang tepat dari metode non-permusuhan dan prinsip-prinsip untuk penyelesaian sengketa klien (mediasi, negosiasi kerjasama, arbitrase);
- 4) Kaji kemampuan dan kinerja sebagai praktisi hukum masa depan mereka sendiri dengan memiliki keterampilan yang dikembangkan dari mana-

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Chelsea dan Jenny, keduanya Staf Pegawai FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

jemen diri, dan mandiri mensintesis informasi ini untuk membantu dalam pelaksanaan keputusan profesional dan etis suara;

- 5) Independen mengidentifikasi, reformasi hukum praktis atau masalah kebijakan yang relevan dengan klinik, mengisolasi dan kritis menganalisis prinsip-prinsip hukum masalah yang relevan, dan mengartikulasikan masalah ini melalui pengetahuan teoritis dan teknis lanjutan dari masalah yang ditunjuk.

Proses penilaian akhir dari pelaksanaan magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne diharuskan terpenuhi dengan bobot 70% dan menyusun makalah penelitian (minimal 1500 kata) tentang topik yang akan disetujui oleh dosen pengampu klinik hukum dengan bobot 30%. Sedangkan persyaratan beban kerja minimum yang diharapkan untuk mencapai hasil belajar untuk unit ini adalah sebagai berikut:

- 1) Satu hari penuh orientasi dan seminar hukum keluarga dan teratur satu-ke-satu tutorial;
- 2) Satu setengah hari sesi wawancara klien per minggu di FLAP selama 17 minggu (termasuk selama periode non-mengajar);
- 3) partisipasi dalam program seminar selama 6-8 minggu melibatkan 2 kontak jam per minggu;
- 4) 14 jam per minggu untuk konsultasi klien-kelompok, penelitian swasta dan kerja kasus;
- 5) Kegiatan yang dijadwalkan dapat mencakup kombinasi dari guru diarahkan belajar, klien wawancara dan saran sesi, pengawasan dan keterlibatan secara online.

Dengan demikian, pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mencakup atas: (1) menjadikan mata kuliah klinik hukum sebagai mata kuliah unggulan (*subyek*) dalam sistem kurikulum; (2) melaksanakan berbagai pendidikan,

pelatihan praktis dan magang tentang pelayanan bantuan hukum yang wajib diikuti oleh para mahasiswa; (3) Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne mendapatkan pengakuan yang jelas oleh pihak universitas, fakultas, pemerintah, dan masyarakat; (4) model pelayanan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne telah menggunakan *Database System* yang terkoneksi langsung dengan semua organisasi bantuan hukum dan lembaga pengadilan; dan (5) Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne juga telah lama menjalin kerjasama dengan semua lembaga terkait yang berkenaan dengan pemenuhan hak atas hukum dan keadilan (*access to justice*).

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia tampaknya sudah masuk dalam kategori sangat matang dan mapan. Meskipun mereka mengalami berbagai tantangan, namun dalam perjalanannya – peneliti dapat mengatakan bahwa program pendidikan klinik hukum pada Faculty of Law Monash University Melbourne menjadi salah satu model Klinik Bantuan Hukum Universitas terbaik di dunia.

Keberhasilan mereka bukan semata-mata karena motivasi dan semangat yang kuat dari kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) – atau karena adanya dukungan finansial dari pihak pemerintah dan universitas – namun karena semangat mereka untuk belajar dan menjadi terampil di bidang keahlian hukum praktis. Lebih dari itu, hampir semua lulusan Faculty of Law Monash University Melbourne yang pernah magang di Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne lebih mudah mendapatkan pekerjaan di bidang hukum, di mana semua lulusannya banyak dicari dan diterima oleh para pengguna lulusan (*stake holders*).

F. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

1. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

Pada bagian akhir ini, peneliti mencoba untuk bersikap obyektif tentang pengakuan orang lain terhadap kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penegakan hukum dan keadilan. Peneliti ingin mencoba untuk merujuk kepada testimoni dua mahasiswi senior Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia yaitu Jasmine dan Taylor yang telah melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang. Keduanya mengaku kagum dan sangat mengapresiasi model dan praktik pelayanan Klinik Hukum yang diberikan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung kepada masyarakat di Pengadilan Agama Sumedang.

Lebih lanjut Jasmine dan Taylor juga menjelaskan bahwa mereka menaruh respek dan apresiasi dengan model pelayanan Klinik Hukum pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang. Karenanya dalam studi banding ini mereka juga ingin bertukar pengalaman dan menyerap model, serta bentuk-bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kedua mahasiswa senior ini datang ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang didampingi Senior Advisor AIPJ (Drs Wahyu Widiana, MA) dan Coordinator for Legal Identity AIPJ (Hilda Suherman). Semua tamu yang datang diterima

oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Dr. Ah. Fathoni, M.Ag), Wakil Dekan I (Dr. H.A. Hasan Ridwan, M.Ag), Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Dr. H. Usep Saefulloh, M.Ag) dan Sekretarisnya (H. Burhanudin, S.Ag, MH), didampingi oleh Dosen Pembimbing Dr. H. Ramdani Wahyu, M.Ag dan Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA, serta para mahasiswa yang magang di BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



Jasmine dan Taylor (dua mahasiswi senior FLAP Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia) saat berkunjung ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia Tahun 2014⁵⁹

Jasmine dan Taylor sengaja melakukan kunjungan studi langsung untuk meninjau praktik Klinik Bantuan Hukum Universitas yang melibatkan mahasiswa BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

⁵⁹ Lihat Press Release testimoni dua mahasiswi dua mahasiswi senior Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia yaitu Jasmine dan Taylor yang telah melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang yang dipublikasikan dalam <http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/berita/monash-university-kagum-pada-klinik-hukum> diakses tanggal 28 Agustus 2016.

Bandung di Pengadilan Agama Sumedang. Selain itu, keduanya juga melakukan studi banding tentang model dan bentuk-bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung kepada masyarakat. Manfaat utama dari kunjungan ini adalah mereka dapat bertukar pengalaman dengan para mahasiswa di BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang praktik klinik hukum.

Testimoni paling menarik dari keduanya adalah pelayanan Klinik Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sumedang dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat). Sedangkan di Pengadilan Keluarga Dandenong Melbourne University hanya 1 hari dalam, yaitu hanya hari Senin saja. Hasil dari kunjungan studi ini menghasilkan usulan penting bagi pimpinan kedua universitas/fakultas untuk menjalin kerjasama yang lebih baik lagi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Klinik Bantuan Hukum Universitas yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua universitas.

Disamping pengakuan dari dua mahasiswa senior Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia tersebut, BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga mendapatkan apresiasi dari Cate Sumner dan Peter De Meij. Keduanya merupakan penasehat senior pada *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Dalam 10 tahun terakhir ini, AIPJ di bawah Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Australia (*Department for Foreign Affairs and Trading, DFAT*), telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hak atas identitas hukum (*legal identity*) dan bantuan hukum (*legal aid*) di Indonesia.

Cate Sumner⁶⁰ menjelaskan bahwa model pelayanan Klinik Hukum pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

⁶⁰ Penjelasan Cate Sumner tentang Kontribusi BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penyediaan klinik bantuan hukum di

Bandung di Pengadilan Agama Sumedang ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan ia secara tegas menyebutkan di berbagai forum seminar bahwa model pelayanan Klinik Hukum pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang hampir sama dengan model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

Menurutnya, kontribusi BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bidang bantuan hukum, merupakan hasil positif dari kemitraan antara pengadilan, klinik bantuan hukum universitas, LSM dan instansi pemerintah dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, terutama berkaitan dengan peningkatan kepemilikan identitas hukum dan akses kepada keadilan. Peningkatan kemudahan akses terhadap proses kepemilikan identitas hukum dan keadilan mencakup atas pemilikan akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai, khususnya bagi masyarakat rentan, serta membantu masyarakat miskin, hak-hak perempuan dan anak-anak dalam mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Menurut Cate Sumner, AIPJ memahami bahwa BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat menyediakan klinik bantuan hukum di Pengadilan Agama lainnya di Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang. Hal ini merupakan kontribusi pelayanan publik yang luar biasa oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai hasil kolaborasi yang sangat mengesankan dengan sejumlah Pengadilan Agama di Jawa Barat, di mana pelayanan ini juga akan memastikan bahwa akses terhadap pelayanan bagi kelompok rentan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Pengakuan berikutnya dikemukakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. UIN Jakarta menaruh perhatian serius terhadap model pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat di BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terutama ketika mahasiswa mampu menangani berbagai macam perkara.

Perwakilan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diterima oleh Dekan Dr. Ah. Fathoni, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, Wakil Dekan III Drs. Dudang Gojali, M.Ag, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Dr. H. Usep Saefulloh, M.Ag dan Sekretarisnya H. Burhanudin, S.Ag, MH, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Dr. H. Utang Rosidin, SH, MH, Ketua Jurusan MKS Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag, Ketua Laboratorium Dr. Iwan Setiawan, M.Pd, M.E.Sy; dan Sekretaris LBKH Ende Hasbi Nassaruddin, SH, MH,

Meskipun keberadaan BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya sebagai lembaga penunjang (non struktural), namun keduanya diberikan otonomi untuk mengelola dan melaksanakan tupoksinya secara mandiri dan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum baik dalam internal UIN Bandung maupun masyarakat umum. Fungsi BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat - dalam hal ini – memberikan bantuan konsultasi hukum, sosialisasi peraturan, desiminasi, pembuatan berkas perkara dan pendampingan/advokasi baik litigasi maupun non litigasi.⁶¹

⁶¹ Peneliti menghimpun informasi dari berbagai sumber informasi dan data, salah satunya dari Press Release Kunjungan Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id/site/detail/berita/uin-jakarta-belajar-ke-uin-bandung> diakses 28 Agustus 2016.



Perwakilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pun ingin mengembangkan Klinik Hukum seperti yang dilakukan FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Perwakilan dari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta banyak menggali aktivitas Klinik Hukum dalam program Pos Bantuan Hukum di sejumlah Pengadilan Agama, karena di FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah memiliki klinik hukum, meskipun jejaringnya belum sebanyak di FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berkontribusi dengan menjalin kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Jawa Barat berupa penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama di Jawa Barat. Selain itu, kerjasama dalam penyelenggaraan konsultan hukum serta advokat pada

klitik konsultasi hukum (PEKKA) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga (SEKNAS PEKKA), termasuk pula dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) dalam menyediakan kebutuhan saksi Ahli oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara.

2. Kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam Pene-gakan Hukum dan Keadilan

Untuk menjelaskan kontribusi Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam penegakan hukum dan keadilan, peneliti mengutip beberapa penjelasan dari Malcom Bennet bahwa kesulitan utama mengembangkan klinik hukum adalah bagaimana melayani kebutuhan hukum masyarakat dan mendidik mahasiswa untuk tidak begitu mudah ingin pergi dari apa yang pelajari di klinik hukum.

Kesulitan seperti yang disebutkan di atas, menurutnya banyak terjadi di semua perguruan tinggi, karena klinik hukum memang diarahkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih berorientasi sosial. Kedua hal tersebut merupakan tujuan ideal didirikannya klinik hukum agar setiap mahasiswa dapat terjun langsung di lapangan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang mereka hadapi.

Selain itu, semua klinik hukum di perguruan tinggi tak terkecuali juga FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia akan melayani beberapa fungsi. Misalnya, ia tidak bisa mendidik mahasiswa dengan tanpa memberikan pelayanan hukum, sedangkan klinik hukum seharusnya juga mengajarkan berbagai bentuk keterampilan hukum. Hal demikian bertujuan untuk memastikan tingkat pelayanan hukum yang berikan oleh mahasiswa kepada klien dijamin keprofesio-

nalannya. Inilah sesungguhnya hal tersulit untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

Klinik Bantuan Hukum Universitas sejenis FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia boleh dikatakan mewakili cita-cita terbaik dari gerakan klinik hukum dan profesi hukum. Pada dosen dan mahasiswa yang menyediakan waktunya pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia untuk melakukan pengabdian ini karena satu alasan bahwa mereka ingin berkontribusi positif dalam memberikan akses seluas mungkin untuk para pencari keadilan (*justice seekers*).

Lebih dari itu, harapan besarnya adalah semua anggota masyarakat memperoleh alternatif solusi untuk mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang selama ini dipandang cukup mahal dan hanya dapat diakses oleh golongan sosial tertentu yang sangat terbatas. Selain itu, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga ingin menyampaikan pesan yang lebih positif kepada para pecinta keadilan bahwa menjadi pengacara atau paralegal adalah cita-cita profesional yang mulia.

Belajar dari pengalaman pribadi Professor Malcom Bennet sebagai Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak memberikan bimbingan dan kepada mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Monash University, ia menjelaskan bahwa metode yang paling efektif untuk memastikan klinik hukum dapat memberikan keadilan sosial bagi klien adalah memberikan kesempatan dan bekal pengalaman kepada mahasiswa untuk membantu klien dalam berbagai kasus yang dihadapinya. Hal ini akan melatih mereka menjadi lebih mahir dan professional lebih dari sekedar belajar teori di kelas tanpa adanya pengakuan akademis secara formal.

Pada saat yang sama, Profesor Malcom Bennet menjelaskan bahwa klinik hukum bukanlah permainan atau hobi, melainkan sebuah tuntutan bagi setiap insan akademik di bidang hukum. Mengabdikan sebagai mahasiswa magang pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia sekurang-kurangnya menjadi pilihan mengembangkan diri dan membangun komitmen untuk mengabdikan kepada masyarakat di bidang hukum.

Lebih lanjut Malcom Bennet juga menjelaskan bahwa permasalahan yang paling sulit dihadapi adalah menumbuhkan minat dan meningkatkan motivasi mahasiswa mampu melaksanakan tugas mulia ini dengan baik. Ia meyakini usaha semacam ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena selama pengamatannya membimbing mahasiswa dalam program ini, ia telah berhasil melahirkan pengacara-pengacara muda dan sarjana hukum yang profesional serta sangat terampil menyelesaikan perkara-perkara yang rumit.

Masalah utama yang sering dihadapi adalah tidak adanya jaminan setelah mahasiswa lulus dengan kualifikasi mantan voluntir klinik hukum akan mampu menempatkan diri sejajar dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Adanya tuntutan mampu membantu masyarakat (klien) akan menempatkan diri mereka menjadi pihak yang paling tersudut. Namun hal ini akan mendorong mahasiswa lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan di klinik hukum. Jika mereka tidak mau belajar dengan lebih giat di bidang klinik hukum, maka mereka akan menjadi sarjana hukum tanpa pekerjaan.

Oleh karena itu, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia menjadi wadah bagi mahasiswa agar mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum. Mereka dapat belajar untuk menjadi pengacara dan membantu mereka yang paling rentan, baik

secara pro bono atau profesional, dengan mengejar karir di kantor-kantor firma hukum, atau organisasi bantuan hukum atau lembaga yang melayani kepentingan umum. Dengan kata lain, klinik hukum FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diharapkan memberikan efek positif yakni mendorong mahasiswa untuk membantu orang lain yang sedang mengalami masalah hukum atau sekurang-kurangnya mengatasi masalah hukum yang sedang mereka hadapi sendiri.

Semua pengalaman menarik yang diperoleh oleh peneliti dari model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga terekam dan terdokumentasikan dengan baik. Bahkan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah berkolaborasi dengan AIPJ untuk bertukar pengalaman dan transfer data dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hal tersebut telah tercatat dalam kegiatan Workshop Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014. Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 5 universitas di Indonesia yang turut berpartisipasi dalam program bantuan hukum. FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne turut berkontribusi dalam pertemuan ini dengan mengirimkan Professor Malcolm Bennett dan Jennifer Lindstrom. Keduanya menjadi wakil dari FLAP yang banyak pengalaman dalam memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat di Family Court Dandenong, Family Court of Australia, dan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Faculty of Law Monash University.⁶²

⁶² Lihat Press Release Workshop Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014 dipublikasikan dalam http://www.aipj.or.id/en/legal_identity/article/184 diakses 28 Agustus 2016.



Peserta Workshop Nasional Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014 di Bandung

Selama mengikuti workshop di Bandung tersebut, pembahasan lebih difokuskan pada bagaimana memperkuat Klinik Bantuan Hukum Universitas sehingga mampu menyediakan lingkungan belajar yang baik bagi mahasiswa pada aspek praktis, serta memberikan nasihat hukum kepada klien. Hasil dari pertemuan tersebut adalah mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum yang terlibat aktif dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat menjadi paralegal dan membantu klien di lapangan serta mampu membantu perempuan yang miskin, anak-anak, dan orang-orang mereka dengan cacat untuk memiliki akses ke layanan konsultasi hukum sebagai tingkat desa, terutama dalam kaitannya dengan hukum keluarga dan memperoleh dokumen hak atas identitas hukum.



Profesor Malcom Bennet, Cate Sumner dan Jennifer Lindstrom berphoto bersama dengan Ketua dan Staf Pengadilan Agama Sumedang

Peserta workshop kemudian secara bersama-sama mengunjungi tempat praktik klinik bantuan hukum BKLHK di Pengadilan Agama Sumedang yang dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2013, BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah membantu lebih dari 2.500 klien di Pengadilan Agama Sumedang. BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan contoh yang sangat baik dari pelayanan kepada masyarakat yang dibahas dalam lokakarya selama 2 hari berikut.

Dalam kesempatan tersebut, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman mengenai pengelolaan Klinik Bantuan Hukum Universitas, terutama dalam memberikan pelayanan konsultasi dan

bantuan hukum kepada masyarakat, serta sejauhmana keterlibatan para mahasiswa yang ikut mendaftar mata kuliah klinik hukum pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri beberapa perwakilan dari sejumlah universitas di Indonesia antara lain Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Islam Negeri (Jawa Barat dan Makassar), Universitas Mataram (NTB) dan Universitas Nusa Cendana (NTT), LSM dan organisasi penyandang cacat serta Badan Nasional Pembangunan Hukum (BPHN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).



Photo Bersama Peserta Workshop Nasional Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014 di Bandung

Ada beberapa testimoni dari sejumlah lulusan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, antara lain:

Pertama, Caroline. Ia meraih Bachelor of Science atau Sarjana Hukum tahun 2006. Caroline menjelaskan bahwa ia menyelesaikan artikel di Lander & Rogers dan telah bekerja selama dua tahun di grup Work Cover litigasi mereka mengelola hukum umum dan manfaat data hukum pada semua tingkat Pengadilan Victoria. Ia melanjutkan pendidikan Master of Laws di Monash University pada tahun 2010 dan berencana untuk pergi ke bar di beberapa titik di tahun-tahun mendatang.



Menurutnya, keberadaan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah memberikan kesempatan unik untuk mendapatkan benar-benar tenggelam dalam mengarungi napas kehidupan nyata sementara ia masih seorang mahasiswa tingkat S1. Meskipun ia tidak berlatih dalam hukum keluarga, namun sejak menyelesaikan saya dua tahun di FLAP dan ikut mewawancarai klien, ia berhasil menyusun artikel berharga tentang pengalaman dan pengabdiannya selama magang praktik di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Ini adalah suatu keuntungan besar dari beberapa rekan lulusan Monash University, dan tidak dimiliki oleh lulusan fakultas lainnya yang studi di Monash University Melbourne.

Ia menyadari betul bahwa untuk menjadi sukses adalah belajar dengan keras dan berani terlibat langsung dalam semua kegiatan di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Meskipun dikelola secara substansial oleh sejumlah besar mahasiswa relawan, namun ia merasa bangga menjadi bagian sejarah FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia karena ia yakin bahwa FLAP adalah sebuah model yang harus terus dieksplorasi, ditiru, dan dikembangkan oleh berbagai Perguruan Tinggi di seluruh dunia.

Kedua, Katherine. Ia meraih Bachelor of Arts (Hons) atau Bachelor of Laws taun 2006, serta lulus dari Monash Law School pada awal tahun 2006. hingga selesai studi sekitar bulan Desember 2005. Ia telah mengambil mata kuliah klinik hukum pada semester musim panas di bidang hukum keluarga di bawah bimbingan Dr. Adiva Sifris, dengan penempatan magang praktik di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada Januari 2004. Ia mengajukan diri bekerja mulai bulan Januari 2004 hingga September 2004 dan bekerja sebagai Staf Administrasi sejak September 2004 hingga Desember 2005.



Saat ini ia bekerja di McDonald, Slater & Lay, sebuah firma hukum kecil di pinggiran kota dari Januari 2006 hingga Agustus 2008, dan menyelesaikan artikel saya dan berlatih sebagai praktisi hukum yang berkualitas dalam berbagai hukum, terutama dalam hukum keluarga, pemulihan utang dan surat wasiat dan perkebunan. Pada bulan Agustus 2008 ia bergabung dengan *Federal Magistrates Court of Australia* sebagai Deputy Federal Magistrate Riethmuller dan diangkat menjadi Pejabat Asosiasi Peradilan pada bulan Januari 2010.

Pengalamannya selama mengikuti magang praktik di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia tidak terpisahkan dari perjalanan karirnya di bidang layanan hukum keluarga, seperti yang sebelumnya telah memiliki preferensi untuk surat wasiat dan hak milik intelektual. Di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, ia sangat menikmati keberadaannya telah banyak membantu orang lain dengan nasihat hukum.

Selain itu ia juga merasa berterima kasih kepada para pengacara profesional dan hakim yang telah membantunya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman praktis di bidang konsultasi dan bantuan hukum. Ia banyak menimba ilmu dan pengalaman selama menjalani magang di Family Court Dandenong. Ia merasa benar-benar sangat menikmati waktunya selama berada di FLAP dan memiliki banyak teman yang masih sering berkomunikasi hingga saat ini.

Selain itu, dengan dorongan Malcolm Bennett, ia kini menjadi lebih percaya diri dalam memberikan saran hukum kepada klien, dan peranannya sebagai administrator telah mendorongnya untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan yang baik. Peran yang ia persiapkan adalah untuk mengambil posisi kepemimpinan di masa depan, seperti posisi dia saat ini yakni sebagai Pejabat Asosiasi. Oleh karena itu, ia merekomen-

dasikan semua mahasiswa untuk membuka mata dan ikut terlibat pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.

Ketiga adalah Shani yang berhasil meraih gelar Bachelor of Arts atau Bachelor of Laws tahun 2006. Ia telah lulus dari Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada April 2008 dan telah bekerja sebagai praktisi hukum pada Oktober 2009. Ia kemudian bekerja di Federal Magistrates Court of Australia – yakni sebagai Deputy Associate untuk Connolly FM sejak March 2008 hingga November 2008.



Kemudian dilanjutkan dengan menjadi Associate untuk Monahan FM sejak November 2008 hingga December 2009. Pada tahun pertamanya, ia kemudian bekerja sebagai solicitor pada Macpherson + Kelley Lawyers (dalam bidang hukum keluarga) hingga bulan January 2010. Menurutnya, menjadi relawan dan kemudian bekerja di FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia adalah sebuah keputusan terbaik yang pernah ia buat sambil menyelesaikan gelar Sarjana Hukum – seperti ia meyakinkan dirinya untuk benar-benar praktek sebagai pengacara dan pengacara hukum keluarga.

Mengacu kepada uraian pembahasan tersebut, peneliti dapat menganalisis perbandingan model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7

**Perbandingan Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum
Universitas BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash
University Melbourne**

No	Aspek Pemandangan	BKLHK FSH UIN SGD Bandung	FLAP Faculty of Law Monash University	Hasil dan Capaian
1	Kurikulum	Mata Kuliah Klinik Hukum	Mata Kuliah Klinik Hukum	Mahasiswa memiliki pengetahuan di bidang pelayanan hukum keluarga
2	Bobot Kredit	Praktikum Keahlian 4 SKS	Praktikum Keahlian 12 SKS	Mahasiswa mampu menangani perkara hukum keluarga melalui praktik langsung
3	Jenis Mata Kuliah dan Standar Kompetensi	Mata Kuliah Pilihan (<i>Elektif</i>) bersifat teori dan praktik	Mata Kuliah Unggulan (<i>Pilot Project</i>) bersifat teori dan praktik	Mahasiswa memiliki keunggulan dalam kemahiran hukum praktis klinik hukum
4	Cakupan Perkara yang Ditangani	BKLHK menangani bidang hukum keluarga secara non litigasi	FLAP hanya menangani bidang hukum keluarga dan berbagai jenis perkara secara litigasi dan non litigasi	Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menangani semua jenis perkara, baik litigasi maupun non litigasi
5	Pendanaan	Tidak dibiayai sama sekali baik oleh Universitas maupun Fakultas	Dibiayai oleh pihak Universitas/Fakultas dan Pemerintah Federal	Ada perbedaan dalam menangani perkara yang berbiaya besar tidak dapat ditangani sepenuhnya

6	Sarana dan Prasarana	Menyewa gedung dan sarana kantor secara swadaya	Disediakan oleh pihak Universitas/ Fakultas	Ada perbedaan dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien terkait dengan kecepatan, ketepatan, dan kepuasan
7	Sistem Informasi	Masih menggunakan data manual	Data base system sudah terkoneksi secara online dengan lembaga peradilan	Ada perbedaan dalam penanganan perkara kaitannya dengan kecepatan, ketepatan, eder-hana dan berbiaya ringan
8	Jumlah Peserta	Rata-rata ada 7-10 mahasiswa dalam 1 tahun	Rata-rata ada 10-25 mahasiswa dalam 1 tahun	Ada perbedaan minat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan klinik hukum
9	Jumlah Perkara	Mahasiswa rata-rata menangani perkara di atas 2000 kasus per tahun	Mahasiswa rata-rata menangani perkara di bawah 2000 kasus per tahun	Ada perbedaan cakupan perkara yang ditangani berikut tantangan yang dihadapinya
10	Kompetensi Lulusan	Hanya sebagian kecil lulusan yang bekerja sebagai Praktisi Bantuan Hukum	Sebagian besar lulusan bekerja sebagai Praktisi Bantuan Hukum	Ada perbedaan standar kompetensi lulusan di kedua lembaga

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, peneliti berpendapat bahwa pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia cenderung menerapkan prinsip sukarela, di mana fokus mereka pada kalangan masyarakat yang kurang mampu. Keberadaan masiswa pada kedua lembaga tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan klinik hukum pada

umumnya karena memang keduanya mendorong orientasi etika dan moral untuk melibatkan mahasiswa di bidang penegakan hukum.

Peneliti juga melihat bahwa setiap pengurangan kualitas pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diakui mengalami sebuah dinamika. Namun hal ini dapat dimengerti karena naik turunnya tingkat pengawasan penanganan kasus memang ada keterbatasan pada kedua lembaga tersebut. Di satu sisi, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya menangani perkara-perkara non litigasi di bidang hukum keluarga, sedangkan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia menangani semua perkara baik secara litigasi maupun non litigasi.

Alasan perbedaan tersebut tentunya karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia memang berbeda dengan di Australia. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur bahwa dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan membantu klien hingga ke wilayah litigasi secara formal di dalam ruang siding pengadilan. Sedang dalam sistem hukum federal di Australia memberikan keleluasaan kepada dosen dan mahasiswa untuk praktik hingga ke dalam ruang persidangan di pengadilan.

Meskipun ada keunggulan dan kelemahan antara BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, namun dilihat dari rekam jejak penanganan kasus yang dilakukan oleh keduanya perlu diapresiasi, terutama dalam peranannya memperluas akses terhadap keadilan. Potensi ini mengalir dari efektivitas pelaksanaan tugas mereka di masa depan, tetapi perlu diketahui pula bahwa baik BKLHK maupun

FLAP tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membantu masyarakat di bidang pelayanan hukum. Dengan kata lain, pekerjaan klinik hukum yang bersifat sukarela ini jelas memiliki manfaat besar bukan hanya bagi kalangan dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, tapi justru manfaat yang terbesar adalah telah memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*).

Peneliti berpendapat bahwa model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas seperti BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia hendaknya terus dipelihara keberlangsungannya. Argumen yang ingin dikemukakan peneliti di sini adalah keduanya bukan hanya memiliki fungsi pendidikan, di mana para mahasiswa menjadi lebih terlatih dan terampil dalam menangani masalah-masalah hukum, tetapi yang paling utama adalah melihat tujuan yang mereka usung sangatlah mulia, yakni melayani masyarakat di bidang konsultasi dan bantuan hukum.

Di samping itu, mahasiswa juga akan melampaui tingkat pendidikan hukum yang lebih dari standard minimum, dari prinsip tradisionalisme ke modernisme. Apabila mereka sebelumnya hanya banyak belajar teoritis dan tutorial di dalam kelas, tapi melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas ini mereka dapat mengaplikasi semua teori dengan cara praktik langsung di lapangan. Mereka terlatih untuk terus belajar tentang bagaimana menyelidiki dan menangani fakta-fakta hukum, memastikan prosedur hukum, berurusan dengan masalah hukum yang baik tidak diajarkan di sekolah hukum, atau yang melintasi batas subyek tradisional, menulis surat gugatan/permohonan, dan cara berne-

gosiasi, dan semua hal yang banyak terjadi di pengadilan, termasuk pula isu-isu etis di bidang penegakan hukum.

Menurut pendapat peneliti, ada banyak sekali dampak positif dari pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Pengalaman belajar dan magang praktik di lembaga keduanya tentu tidaklah cukup karena di saat yang sama para mahasiswa harus belajar mata kuliah lainnya. Namun, fakta dan pengalaman mereka yang pernah mengabdikan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas seperti BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia telah menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan dan sekaligus pembeda daripada lulusan perguruan tinggi lainnya.

Semua hal yang telah dijelaskan dalam penelitian ini tentu belum sepenuhnya mewakili keseluruhan informasi detail dan lengkap di lapangan, namun paling tidak peneliti **telah mendapatkan sebuah temuan penting yang sangat berharga dari penelitian ini**, yaitu Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan dua model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada bagian akhir tulisan ini, peneliti ingin menegaskan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan suatu **pembeda (*distingsi*)**

dan sekaligus **keunggulan (ekselensi)** yang harus terus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan keberlangsungannya di masa depan. Sebagai rekomendasi dari penelitian ini tentu sudah saatnya bagi semua pengampu kebijakan dan civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menaruh perhatian yang lebih besar bagi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas. Analogis yang lebih tepat adalah meminjam sebuah istilah: ***“Memutus mata rantai sejarah panjang yang telah dibuat, berarti membunyikan lonceng kematian idealisme dan inovasi para penggiat hukum dan keadilan”***.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab pembahasan sebelumnya, model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diakui memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, termasuk pula kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun terlepas dari semuanya itu, keduanya telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung baru didirikan dipenghujung tahun 2012 dan mulai beroperasi sekitar tahun 2013. Selama tahun 2013, tercatat sebanyak 2493 kasus yang telah ditangani dan tahun 2014 tercatat sebanyak 2171 kasus di Pengadilan Agama Sumedang. Sedangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne Australia sudah ada sejak 1970an dan berkembang pesat sekitar tahun 1980an sampai dengan sekarang. Tercatat selama tahun 2012-2103 sebanyak 2109 klien telah mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dari FLAP. Kemudian sebanyak 1418 kasus mendapatkan bantuan pendampingan hukum, 1287 kasus yang sedang ditangani, dan 626 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan, termasuk pula 7 non kasus yang sifatnya kegiatan bantuan hukum.

Melalui penelitian yang cukup melelahkan, pada bagian akhir ini peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan dengan cara: pertama, pengembangan konsep dan operasional klinik bantuan hukum melalui proses pembelajaran kepada mahasiswa; kedua, memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menangani perkara-perkara yang diajukan oleh klien; ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang pada Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan keempat, menjalin kerjasama dengan semua instansi terkait dalam hubungannya dengan pengembangan institusi dan sumber daya manusia. Sedangkan upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia didorong untuk memperpendek kesenjangan, meningkatkan kebanggaan bagi masing-masing orang dalam porsi jabatan apapun, pengembangan supervisi dan evaluasi yang lebih jelas dan lebih adil, serta berbanding lurus dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh semua pegawai.

Kedua, model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan dengan kewajiban bagi mahasiswa untuk mengikuti Mata Kuliah Klinik Hukum selama 16 pertemuan (setara 2 SKS dalam 1 Semester) sesuai jadwal dan harus pula mengikuti Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum melayani klien di Pengadilan Agama Sumedang setiap hari kerja Senin-Jumat (jam 08.00-16.00) sebanyak 2 SKS selama 1 Semester. Sedangkan model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia adalah mahasiswa wajib mengikuti Mata Kuliah Klinik Hukum selama 17 pertemuan dalam 1 tahun (setara dengan 3 SKS dikali 2 Semester dalam 1 tahun) dan wajib pula

melakukan Praktik Keahlian Klinik Hukum dengan cara magang melayani klien di FLAP jam 08.30-16.00 setiap hari Selasa-Jumat dan di Pengadilan Dandenong (jam 08.30-12.00) pada setiap hari senin dengan bobot keseluruhan sebanyak 12 SKS dalam 1 tahun (setara dengan 6 SKS dikali 2 Semester).

Ketiga, peluang dan tantangan pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada prinsipnya memiliki banyak kesamaan yaitu: (a) masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk menjadi pementor dan tenaga voluntir pada Klinik Bantuan Hukum Universitas; (b) masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi; dan ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa yang terlibat langsung dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang diajukan oleh klien.

Keempat, Strategi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas mencakup atas: (a) perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum dalam sistem kurikulum; (b) melaksanakan *training personal capacity building* tentang bantuan hukum bagi dosen dan mahasiswa; (c) kejelasan aturan mengenai kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas/Fakultas dalam Statuta; (d) melakukan transfer model *Database System* dari FLAP dan terkoneksi dengan OBH lainnya termasuk dengan Lembaga Pengadilan; dan (e) memperkuat Klinik Bantuan Hukum Universitas dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait. Sedangkan strategi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mencakup atas: (a) menjadikan mata kuliah klinik hukum sebagai mata kuliah unggulan (*subyek*) dalam sistem

kurikulum; (b) melaksanakan berbagai pendidikan, pelatihan praktis dan magang tentang pelayanan bantuan hukum yang wajib diikuti oleh para mahasiswa; (c) Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne mendapatkan pengakuan yang jelas oleh pihak universitas, fakultas, pemerintah, dan masyarakat; (d) model pelayanan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne telah menggunakan *Database System* yang terkoneksi langsung dengan semua organisasi bantuan hukum dan lembaga pengadilan; dan (e) Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne juga telah lama menjalin kerjasama dengan semua lembaga terkait yang berkenaan dengan pemenuhan hak atas hukum dan keadilan (*access to justice*).

Kelima, meskipun keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya sebagai lembaga penunjang (non struktural), namun ia diberikan otonomi untuk mengelola dan melaksanakan tupoksinya secara mandiri dan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum baik dalam internal UIN Bandung maupun bagi masyarakat umum. Fungsi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat - dalam hal ini – memberikan bantuan konsultasi hukum, sosialisasi peraturan, desiminasi, pembuatan berkas perkara dan pendampingan/advokasi baik litigasi maupun non litigasi. Demikian pula dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia menjadi wadah bagi mahasiswa agar mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum. Mereka dapat belajar untuk menjadi pengacara dan membantu mereka yang

paling rentan, baik secara *pro bono* atau profesional, dengan mengejar karir di kantor-kantor firma hukum, atau organisasi bantuan hukum atau lembaga yang melayani kepentingan umum. Efek positif yakni mendorong mahasiswa untuk membantu orang lain yang sedang mengalami masalah hukum atau sekurang-kurangnya mengatasi masalah hukum yang sedang mereka hadapi sendiri.

Hasil penelitian ini telah mengantarkan peneliti sampai pada **temuan penting dan sangat berharga**, yaitu Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan dua model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*). Selain itu, Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut juga telah menjadi **pembeda (*distingsi*)** dan sekaligus **keunggulan (*ekselensi*)** yang harus terus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan keberlangsungannya di masa depan.

B. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini tentu sudah saatnya bagi semua pengampu kebijakan dan kalangan civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menaruh perhatian yang lebih besar bagi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas. Demikian pula dengan pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk secara bersama-sama membangun komitmen dan dukungan bagi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada semua Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di

semua perguruan tinggi di Indonesia. Peneliti menggunakan sebuah analogi untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, dengan meminjam sebuah istilah: ***“Memutus mata rantai sejarah panjang yang telah dibuat, berarti membunyikan lonceng kematian idealisme dan inovasi para penggiat hukum dan keadilan”***.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Abu Bakar. Zainal Arifin, “*Hukum Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*” dalam *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 1992).
- Alan W. Houseman & Linda E. Perle, *Securing Equal Justice for All: A Brief History of Civil Legal Assistance in the United States*, (Center for Law and Social Policy, November 2003).
- Allan C. Reiter dan Stam, *Democracies at War* (Princeton, USA: Princeton University Press, 2002).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Mawardi. Abu Hassan, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Dînniyah* (Kairo: Musthafa al-Bâb al-Halaby, 1973).
- Al-Maududi. Abul ‘Ala, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976).
- Al-Syathibi. Abu Ishaq. T.Th. *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Salam. ‘Izuddin bin Abd. T.Th. *Qawâ'id al-Ahkâm fi al-Mashâlih al-Anâm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Yusufi. Muslim Muhammad Zaudat. T.Th. *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al-Syariat al-Islamy*. Cairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Asfinawati. 2009. *Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada*. Jakarta: Jurnal Jentera.
- Azizy. A. Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media Press.
- Bakti. Aspari Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Barnett. Helaine M. 2005. *Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans*. USA: Legal Services Corporation, September 2005.
- Bisri. Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya.
- Black. Duncan. 1958. *The Theory of Committees and Elections*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bonner. Robert J. 1927. *Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis of the Legal Profession*. New York: Benjamin Blom.
- Buchanan. James M., and Gordon Tullock, *The Calculus of Consent* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962).
- Buchori. Mochtar. 1989. *Kebebasan Akademik dalam Konteks Pengembangan IPTEK Dan Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Basis.
- Catherine Morris, ed. *Negotiation in Conflict Transformation and Peacebuilding: A Selected Bibliography*. (Victoria, Canada: Peacemakers Trust, 2006).
- Crook. John A., *Law and Life of Ancient Rome* (Ithaca: Cornell University Press, 1967).
- C. Theodoor van Boven. 1982. *Survey of the Positive International Law of Human Rights*, dalam *"The International Dimensions of Human Rights"*, ed. Karel Vasak. Westport-Connecticut: UNESCO and Greenwood Press.
- Daniel S. Lev. 1996. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesiambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Dardji Darmodihardjo dan Arif Sidharta. 2002. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Editor. 1990. *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, "Clinical Legal Studies," St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Erna Ratnaningsih dan Muji K. Rahayu. 2007. *Pandangan Terhadap Kebutuhan Undang-Undang Bantuan Hukum Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Ed. Gatot dan Virza. Jakarta: LBH Jakarta.
- Freeman. Samuel. 1999. "John Rawls" dalam In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 774. London: Cambridge University Press.

- Garuda Nusantara. Abdul Hakim. 1983. *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Harahap. M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, Cetakan Ke-5. Jakarta: Penerbit Sinar Grafik.
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- . 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jur Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice*. Eevised Edn. Oxford: OUP.
- Kusumohamidjojo. Budiono. 2004. *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Kusnadi. Didi. 2009. *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung djati Bandung.
- Levine. Andrew. T.Th. *Human Rights and Freedom, "The Philosophy of Human Rights"* Ed. Alan S. Rosembum. London: Aldwych Press.
- Lubis. Todung Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3S.
- . 1992. *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia: Sebuah Studi Awal"* dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*. andung: Alumni.
- Mohammad Mahfud MD., Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto. 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media.
- M. Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muri. Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.
- Nasution. Adnan Buyung. 1977. *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*, makalah dalam *First International Colloquium on Legal Aid and Legal Service*, 25-28 Oktober 1976 (London-England: International Committee Law Exchange Society 1976/ 1977).

- , 2007. *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Ed. Gatot dan Virza. Jakarta: LBH Jakarta.
- , 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- O. Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen,.
- Paul Goodwin and Robert Clemen. 1996. *Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis*, 2nd Edition. Belmont CA: Duxbury Press.
- Paul S. Baut. 1980. *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Pipes. Daniel. 1997. *Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes from*. New York: The Free Press.
- Praja. Juhaya S. 1996. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: UNISBA Press.
- , 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Rosda Karya.
- , 2009. *Teori-teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Pulungan. Jalaludin Suyuthi. 1996. *Pengantar Fikih Siyasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2001. *Advokasi Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Prakoso. Djoko. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rengka. Frans J. 1992. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*. Jakarta: Tesis Magister Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Rafiq. Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Raiffa. Howard. 1982. *The Art and Science of Negotiation*. USA: Belknap Press.
- Rahardjo. Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*. Bandung: Sinar Baru, Bandung.

- Rasjidi. Lili M. 1990. *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*. Bandung: Alumni.
- , 1996. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ramulyo. M. Idris. 1985. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: In Hill Co.
- Rahman. Asjmuni. 1976. *Kaidah-kaidah Fiqih (Qawa'id al-Fiqhiyyah)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid. A. Roihan. 1995. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Rosyadi. Rahmat. 2000. *Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembudayaan Hukum di Masyarakat*, Karya Tulis Ilmiah Jurnalistik Bidang Hukum antar Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dan Banten oleh Forum Diskusi Hukum (FORDIKUM) dan diterbitkan dalam HU Pikiran Rakyat.
- Ronald M. Shapiro and Mark A. Jankowski. 1998. *The Power of Nice: How to Negotiate So Everyone Wins - Especially You!* USA: John Wiley & Sons, Inc..
- Rosada. Dede 1994. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Riduan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Russell. Bertrand. 1946. *History of Western Philosophy*. New York: Simon & Schuster Publication.
- R. Duncan & Raiffa Luce Howard. 1989. *Games and Decisions: Introduction and Critical Survey*. New York: Dover Publications.
- Ruslan. Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjali. Munawir. 1991. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Santosa. Mas Achmad. 2007. *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Editor: Gatot dan Virza. Jakarta: LBH Jakarta.
- Schacht. Joseph. 1985. *An Introduction of Islamic Law*, terj. M. Said, dkk. Jakarta: PPS & PTAI & Ditjen Binbaga Islam Depag RI.

- Schulz. Fritz. 1946. *History of Roman Legal Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, Donald Eugene. 1978. *Religion and Political Development*. Boston: Little, Brown and Co..
- Soekanto. Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stumpf. Christoph A. 2006. *The Grotian Theology of International Law: Hugo Grotius and the Moral Fundament of International Relations*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Sri Soemantri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Syafruddin Kalo. 2013. *Kuliah Hukum Pidana Pascasarjana USU*, Rabu, 23 Oktober 2013.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siti Mulyani. 2011. *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 Pasca Yudisial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Malang)*. Laporan Penelitian, FH UMM.
- Tim Penyusun, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Departemen Pendidikan Nasional badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Desember 2008.
- Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).
- Ted Honderich. 1995. *The Oxford Companion to Philosophy*. New York: Oxford University Press.
- The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2009. *Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum*. Jakarta: ILRC.
- Tim *The Indonesian Legal Resource Center* dan Forum Solidaritas. 2010. *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan LKBH Kampus*. Jakarta: Delapan Cahaya Printing.
- Tim Penyusun. 2013. *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.

- Tim Penyusun. 2014. *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.
- Tim Penyusun. 2013. *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.
- Tim Penyusun. 2013. *Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.
- Tim Penyusun. 2009. *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*. Jakarta: Bapennas.
- Thomas Nagel. 2005. *The Problem of Global Justice: Philosophy and Public Affairs* 33. USA: OUP.
- Uli Parulian Sihombing. 2014. *Pendidikan Hukum Klinis*. Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*.
- Usman. Mukhlis. 2000. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wardiman Djojonegoro. 1995. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud.
- Wehr. Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed). London: Mac Donald & Evan Ltd..
- William Hernandez Requejo & John L Graham, 2008. *Global Negotiation: The New Rules*. Canada: Palgrave Macmillan.
- Winata. Franz Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Azasi Manusia dan Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elek Media Kompatindo.
- Winata. Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Wirjanto. Soemarno P. 1979. *Profesi Advokat*. Bandung: Alumni.
- Wright. George. 2004. *Decision Analysis for Management Judgment*, 3rd Edition Chichester: Wiley.
- Yusup. Deni K.. 2009. *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Artikel/Jurnal/Makalah/Internet

- Abdullah Gofar, "*Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum*", artikel dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 61 Tahun XIV Edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 2003).
- Ahmad Azhar Basyir, "*Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia*", dalam *Mimbar Hukum* No.13 tahun V (Jakarta: al-Hikmah &Ditbinpera Islam Depag RI, 1994).
- Anonimous, *Hukm al-Mahammatt ladi al-Muhakimu al-Wadh'iyati* dalam <http://www.muslimuzbekistan.net/ar/islam/fatawa/article.php?ID=8501> diakses 12 Februari 2016.
- Anonimous, "Uniform Local Rules Of The United States District Courts For The Eastern, Middle, And Western Districts Of Louisiana, LR83.2.13, dalam http://www.laed.uscourts.gov/LocalRules/Civil_83.htm diakses tanggal 28 Juli 2016.
- Anonimous, *Conception of the Natural Rights of Thomas Hobbes* dalam Peter Jones, *Rights*, (Palgrave: Macmillan, 1994), hlm. 73 dan Jonathan Wallace *Natural Rights Don't Exist: The Ethical Spectacle* (2000-2004) dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right diakses tanggal 18 September 2016.
- Anonimous, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", kutipan artikel dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel149.php> diakses tanggal 28 September 2016.
- Ali Jar al-Naby, *Al-Mahammah wa Afaqa al-Qanuni fi al-Mustaqbal*, lihat dalam <http://www.brbrnet.net/vb/archive/index.php/t-2106.html> diakses 28 Agustus 2016.
- Annual Report Family Law Assisstance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.
- Binziad Kadafi, "*RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*", kutipan artikel dari *Jurnal Online Pemantau Peradilan* (Jakarta: MAPPI-UI, t.th) artikel yang dipublikasikan dalam <http://www.pemantauperadilan.com> diakses 28 September 2016.
- Editor, "Legal Aid" dipublikasikan dalam [www.legalinfo.gov.cn/ English/Legal Aid/LegalAid1.htm](http://www.legalinfo.gov.cn/English/LegalAid/LegalAid1.htm) diakses tanggal 16 Juni 2016.
- Editor, "Legal Clinic at Louisiana Supreme Court Rule XX", dalam <http://www.lasc.org/rules/supreme/RuleXX.asp> diakses 28 Juli 2016.

- Editor, *University Utrecht School of Law Clinical Programme on Conflict, Human Rights and International Justice* dalam International Journal on Human Rights at Utrecht University, dipublikasikan 30 January 2010.
- Editor, “What is a Legal Clinic”, dipublikasikan dalam <http://lawschool.about.com/od/lawschoolculture/a/legalclinic.htm> diakses tanggal 28 Juli 2016.
- Editor, *Legal Aid in england, Wales Entering the Endgame*, dalam International Legal Aid Group, diakses pada 24 Agustus 2016.
- Editor, *Sejarah Perkembangan Klinik Hukum*, (Bandung: FH UNPAD, 2015), lihat pula uraian lengkap tentang sejarah dan perkembangan klinik hukum di Indonesia dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 28 September 2016.
- Editor, “Sejarah dan Perkembangan Klinik Hukum di Indonesia”, lihat dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 28 September 2016
- Editor, “Kiprah LBH Kampus Digilas Roda Waktu” dalam www.hukumonline.com., dipublikasikan pada Jumat, 13 Agustus 2004 dan diakses tanggal 28 September 2016.
- Editor, “History and Backgorund of *Monash-Oakleigh Legal Service Monash University*” dipublikasikan dalam http://www.communitylaw.org.au/clc_monashoakleigh/cb_pages/about_us_history.php diakses 18 Agustus 2016.
- Editor, “Company Profile Family Law Assistant Program Monash Oakleigh Legal Service Faculty of Law Monash University Melbourne Australia, dalam <http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap.html> diakses tanggal 18 Agustus 2016.
- European Network for Clinical Legal Eduation, “Definition of Legal Clinic”, dalam <http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic> yang diakses tanggal 28 Juli 2016.
- Executive Summary hasil wawancara Tim Peneliti dengan Nurkholis Hidayat dan Jennifer Lindstrom berkaitan dengan Program *Access to Justice* yang dilaksanakan LBH Jakarta bekerjasama dengan AIPJ selama tahun 2011-2015 (Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2016).
- Executive summary hasil wawancara penulis dengan Nurkholis Hidayat (Konsultan Senior Bidang Pengembangan Bantuan Hukum pada Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) berkaitan dengan program pengembangan klinik bantuan hukum universitas dan

- pemenuhan hak atas identitas hukum. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 di Melbourne, Australia.
- Franz H. Winarta, “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional*”, artikel dalam <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html> diakses tanggal 28 September 2016.
- Cik Hasan Bisri, “*Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*” dalam Jurnal Ilmiah *Al-I'tibar* edisi 2 tahun 1996 (Kopertais Wilayah II Jawa Barat).
- Helynn Stephens, "Price of pro bono representations: examining lawyers' duties and responsibilities: for many reasons lawyers owe a duty to provide legal services to those who can't afford them, and the mandatory pro bono model is best for that goal," (Defense Counsel Journal 71, No. 1 January 2004).
- Ismail Sunny. 1991. “*Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*” makalah dalam *Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok* (Festival Istiqlal Jakarta tanggal 21-24 Oktober 1991).
- Kusnu Goesniadhie S., *Konsep Negara Hukum*, petikan artikel yang dipublikasikan dalam <http://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/perkembangan-konsep-negara-hukum/> diakses tanggal 12 Agustus 2012.
- Kusnadi. Didi, “*Prinsip-prinsip dan Azas-azas Bantuan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum Islam di Peradilan Agama*”, makalah kuliah *Teori-teori Hukum Islam* pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2007.
- Press Release Pengembangan Klinik Hukum, “Keikutsertaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung dalam Program Layanan Hukum di Melbourne, Australia” dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id> diakses tanggal 28 Agustus 2016.
- Press Release testimoni dua mahasiswi senior Faculty of Law Monash University, Melbourne Australia yaitu Jasmine dan Taylor yang telah melakukan kunjungan studi ke BKLHK Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Pengadilan Agama Sumedang yang dipublikasikan dalam <http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/berita/monash-university-kagum-pada-klinik-hukum> diakses tanggal 28 Agustus 2016.
- Press Release Cate Sumner tentang Kontribusi BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penyediaan klinik bantuan hukum di Pengadilan Agama di Jawa Barat, dipublikasikan

- dalam http://www.aipj.or.id/in/legal_identity/article/78 diakses 28 Agustus 2016.
- Press Release Kunjungan Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ke BKLHK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipublikasikan dalam <http://www.fsh.uinsgd.ac.id/site/detail/berita/uin-jakarta-belajar-ke-uin-bandung> diakses 28 Agustus 2016.
- Press Release Workshop Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di Indonesia yang berlangsung tanggal 05-07 Mei 2014 dipublikasikan dalam http://www.aipj.or.id/en/legal_identity/article/184 diakses 28 Agustus 2016.
- Suen Herief, "*Bantuan Hukum Suatu Keharusan*", artikel yang dipublikasikan dalam <http://suenherief.wordpress.com/2008/07/15/bantuan-hukum-suatu-keharusan/> diakses tanggal 28 Agustus 2016.
- Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Unpar Press, 2006). Lihat pula Tim Penyusun, *Metode Penelitian*, ddalam [http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14741/BAB+IV+Buku+\(Baru\).doc](http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14741/BAB+IV+Buku+(Baru).doc) diakses tanggal 28 September 2016.
- Taufik, "*Sarjana Syari'ah dan Problematika Kepengacaraan*", artikel dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 61 Tahun XIV Edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 2003).
- Yogie Arif, "Klinik Bantuan Hukum" dalam <https://asuinbdg.wordpress.com/2016/01/05/klinik-bantuan-hukum/> diakses 28 Agustus 2016.

C. Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

- Dokumentasi hasil pengamatan dan wawancara dengan Ramdani Wahyu, Wawan Muhwan Hairi, Ende Hasbi, Riyan Ramdani dan Jamaludin – Pengelola BKLHK dan LBKH yang turut merintis pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil wawancara tanggal 12 Juli 2016.
- Dokumentasi hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Harry Yuniardi, M.Ag dan Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag), serta perwakilan dari mahasiswa adalah Riyan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

Dokumentasi hasil wawancara dengan Professor Malcom Bennet, Direktur FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

Dokumentasi hasil wawancara dengan Chelsea dan Jenny, keduanya Staf Pegawai FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia yang banyak berperan membimbing para mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Hasil wawancara tanggal 28 Agustus 2016.

Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum